

Bidang Ilmu: 593/Hubungan Internasional

LAPORAN AKHIR TAHUN PERTAMA
Penelitian Hibah Bersaing



Judul

Studi terhadap Model dan Dampak Kerjasama antara Lembaga Filantropi Islam Internasional dan Domestik dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Pasca Bencana

Peneliti

HILMAN LATIEF, MA., PH.D.

NIDN: 0512097502

ARIE KUSUMA PAKSI, M.A.

NIDN : 0511028401

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2015

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH BERSAING

Judul Kegiatan

Studi terhadap Model dan Dampak Kerjasama Lembaga Filantropi Islam Internasional dan Organisasi Kemanusiaan Domestik dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Pasca Bencana

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 593/Hubungan Internasional

Ketua Peneliti

A. Nama : Dr. Hilman Latief, M.A.
B. NIDN : 0512097501
C. Jabatan : Lektor
D. Program Studi : Hubungan Internasional
E. Nomor HP : 082126010203
F. Surel (email) : h_latief@umy.ac.id

Anggota Peneliti (1)

A. Nama : Arie Kusuma Paksi, M.A.
B. NIDN : 0511028401
C. PT : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Biaya tahun berjalan : Rp. 49.500.000,-

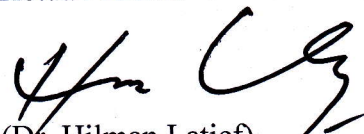
Biaya Keseluruhan : Rp. 150.000.000,-



Mengetahui
Dekan Fispol

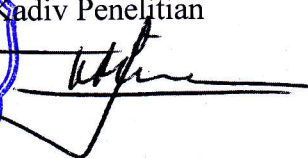
Ali Muhammad, Ph.D.
NIP. 197107312005011001

Yogyakarta 30- 10 - 2015
Ketua Peneliti


(Dr. Hilman Latief)
NIK. 1975091200004113033



a.n. Kepala LP3M
Kadiv Penelitian


(Drs. Sudarisman, M.Sc., Ph.D.)
NIP. 195905021987021001

**Studi terhadap Model dan Dampak Kerjasama antara Lembaga
Filantropi Islam Internasional dan Domestik dalam Bidang
Kesejahteraan Sosial Pasca Bencana**

SUBSTANSI PENELITIAN

Abstract

The proposed research attempts to analyze the extent to which Islamic aid associations from the West and the Middle East define and address domestic welfare issues, establish partnership with local institutions, as well as place their missions in the Indonesia's social, cultural and political landscape. This research will also take a look further at the socio-political implication of the flow of international aid agencies for domestic Islamic charities as well as for the communities in disaster affected areas. This paper focuses on four Muslim NGOs, which are two UK-based Muslim NGOs (The Muslim Aid [MA] and Islamic Relief [IR]), as well as two Middle East-based Muslim NGOs (Qatar Charity [QC] and Asian Muslim Charity Foundation [AMCF]). While acting as philanthropic organizations in their country of origin, these four Muslim NGOs have emerged in the Indonesia soon after 2004 Tsunami disaster as well as in the aftermath of the 2006 Yogya earthquake. In particular, the objective of this research is to discover the impact of the presence of international Islamic aid agencies in Indonesia on the welfare of the communities, in general, as well as on the institutional capacity of grassroots institutions.

Keywords: Islamic Philanthropy, international aid, disaster relief, community development

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tujuan Khusus
- Keutamaan Penelitian
- Tinjauan Pustaka
- Metode Penelitian
- Jadwal Kegiatan

BAB 2 BANTUAN INTERNASIONAL DAN LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA

- Kehadiran Lembaga Internasional di Indonesia
- Organisasi Filantropi Islam Internasional
- Antara Kegiatan Kemanusiaan dan Keagamaan

BAB 3 LEMBAGA FILANTROPI ISLAM INTERNASIONAL DI INDONESIA

- Dinamika Praktik Filantropi Islam di Aceh
- Peran Lembaga Filantropi Islam Internasional dalam Kegiatan Dakwah dan Bantuan Kemanusiaan
 1. *AMCF (Asia Muslim Charity Foundation/ Yayasan Muslim Asia)*
 2. *OIC Alliance di Banda Aceh*
 3. *Muslim Aid Indonesia*
 4. *Qatar Charity Indonesia*

BAB 4 MODEL DAN DAMPAK KERJASAMA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN DOMESTIK

- Model Kerjasama
 1. *Kerjasama Kelembagaan*
 2. *Kerjasama untuk Pelaksanaan Program*
 3. *Kerjasama untuk Pengawasan Program*
 4. *Kerjasama untuk Evaluasi Program*

- Dampak Kerjasama Pasca Bencana
 1. *Dampak Sosial-Budaya*
 2. *Dampak Sosial-Ekonomi*
 3. *Dampak Sosial Keagamaan*
 4. *Dampak Sosial-Politik*
 5. *Dampak Sosial-Pendidikan*

BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam satu dasawarsan terakhir, terutama setelah terjadi bencana besar Tsunami di Aceh tahun 2004 dan Gempa di Yogyakarta tahun 2006, Indonesia menjadi tempat berlabuhnya ratusan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Sebagian dari lembaga-lembaga tersebut berasal dari organisasi yang berbasis keagamaan atau disebut dengan *Faith-based Organizations* (FBOs). Keterlibatan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional yang berdasarkan agama Islam merupakan fenomena baru yang cukup dominan dalam kegiatan tanggap bencana di Indonesia dewasa ini. Kegiatan tanggap bencana di beberapa wilayah di Indonesia yang rawan bencana seperti Aceh, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Papua, dan sebagainya juga diwarnai dengan kehadiran lembaga-lembaga internasional berbasis keagamaan.

Hadirnya organisasi-organisasi kemanusiaan (*Islamic relief organizations*) di Indonesia pasca bencana besar juga cukup massif, baik yang berasal dari Eropa maupun Timur Tengah. Meningkatnya peran organisasi kemanusiaan internasional di Indonesia dalam kegiatan kemanusiaan seiring dengan modernisasi tradisi filantropi Islam di kalangan Muslim di seluruh dunia yang memungkinkan mereka menjalankan programnya tidak hanya di negara asal, tetapi juga di negara lain. Organisasi filantropi Islam adalah organisasi yang didirikan untuk mengelola dana-dana masyarakat yang berasal dari zakat, sedekah infak dan wakaf. Organisasi filantropi Islam saat ini tidak hanya berperan pada tingkat domestik, tetapi pada tingkat nasional dan internasional. Mereka telah menunjukkan peran penting dalam kegiatan tanggap bencana, di pelbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Pasca bencana alam Tsunami di Aceh dan Gempa di Yogyakarta, beberapa lembaga filantropi Islam internasional menjalankan program tanggap darurat, dan selanjutnya menjalankan program rekonstruksi dan rehabilitasi di lokasi bencana. Yang disebut kegiatan tanggap darurat adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka merespons kondisi darurat akibat bencana, seperti adanya banyak korban jiwa dan terluka serta menempatkan masyarakat yang terkena bencana dalam situasi yang sulit

dan membutuhkan pertolongan segera. Untuk kegiatan tanggap darurat bencana diwarnai oleh pemberian bantuan berupa kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, dan papan. Tahap selanjutnya adalah rekonstruksi yang kegiatannya berupa membangun kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan akses masyarakat ke lokasi-lokasi strategis, sekolah-sekolah, gedung perkantoran, tempat ibadah, dan rumah-rumah penduduk. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan program rehabilitasi, yaitu membangkitkan kembali masyarakat korban bencana untuk dapat kembali normal menjalankan aktivitasnya, atau mengantarkan mereka agar siap menjalani kehidupan pasca bencana. Untuk membangun kesiapan itu, program rehabilitasi (termasuk mengurangi trauma) dilakukan agar masyarakat siap tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis.

Untuk menjalankan misi kemanusiaannya, lembaga filantropi internasional bisa menjalankan programnya sampai berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Faktanya, beberapa lembaga filantropi yang menjalankan program tanggap bencana “menetap” di Indonesia dengan membuka cabang kantor di beberapa daerah, seperti yang dilakukan oleh Islamic Relief Worldwide (IR) yang berasal dari Birmingham, Inggris; Muslim Aid dari London, Inggris Qatar Charity (Qatar) dan Asia Muslim Charity Foundation dari Uni Emirat Arab. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan program-program rehabilitasi dan *livelihood* di lokasi bencana dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi domestik, baik kerjasama jangka pendek maupun kerjasama jangka panjang. Tentu saja, kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam waktu yang lama memberikan banyak konsekuensi di bidang sosial, ekonomi, politik dan keagamaan bagi masyarakat di lokasi bencana.

Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

Pertama, untuk menelaah cara-cara, alasan-alasan, dan faktor-faktor yang menentukan pemilihan kerjasama oleh lembaga filantropi Islam internasional terhadap lembaga kemanusiaan domestik yang ada di Indonesia. Dalam studi-studi yang dilakukan tentang organisasi-organisasi kemanusiaan internasional telah banyak digambarkan bahwa kerjasama atau kemitraan (*partnership*) harus dilakukan oleh

lembaga asing yang beroperasi di Indonesia. Untuk itu, tidak mudah bagi sebuah lembaga asing untuk menentukan partner lokal mereka karena sebuah kerjasama juga ditentukan oleh kesamaan visi, misi, dan bahkan ideologi. Untuk itulah penelitian ini bertujuan model-model kerjasama yang dipilih oleh lembaga filantropi Islam internasional dalam menentukan partner mereka di Indonesia.

Kedua, untuk mengetahui tujuan, alasan dan agenda lembaga-lembaga internasional untuk mendirikan kantor cabang organisasi di Indonesia secara permanen, khususnya di lokasi-lokasi bencana. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis model-model kerjasama yang dilakukan oleh organisasi Islam internasional bersama organisasi kemanusiaan domestik, khususnya dalam menjalankan program-program jangka panjang, terutama dalam hampir satu dasawarsa pasca bencana.

Ketiga, untuk mengetahui dampak dari kehadiran lembaga filantropi Islam internasional dan program-programnya di bidang sosial, ekonomi dan keagamaan terhadap masyarakat yang berada di lokasi bencana dan sekitarnya. Sebagaimana akan kita lihat pada bagian selanjutnya, beberapa lembaga Islam internasional yang menjadi subjek penelitian ini memiliki pelbagai jenis program sosial, mulai yang bersifat karitatif sampai program pengembangan ekonomi masyarakat, juga mulai program pendidikan sampai kegiatan dakwah Islam. Lembaga filantropi Islam internasional menjadi aktor penting dalam mesponsori pelbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang diselenggarakan oleh pelbagai komunitas di masyarakat.

Keutamaan Penelitian

Salah satu fenomena yang menarik dewasa ini adalah menguatnya pelbagai peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi non-negara yang berorientasi kesejahteraan (*non-state welfare agencies*) di dalam menggantikan negara sebagai aktor utama penyedia kesejahteraan. Lembaga filantropi Islam saat ini menjadi sebuah gerakan global yang melampaui batas-batas negara dan benua. Gerakan filantropi Islam di negara-negara maju, secara umum, dan negara-negara Teluk, secara khusus, telah memainkan peran penting dalam menjalankan apa yang disebut dengan '*international development project*' dengan memberikan pelbagai jenis bantuan bagi masyarakat di

Benua Asia dan Afrika.¹ Para peneliti telah mengungkapkan bahwa internasionalisasi lembaga filantropi Islam, khususnya di Timur Tengah, tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi negara-negara teluk dan proses islamisasi yang disponsori oleh negara-negara seperti Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya.²

Di era globalisasi, lembaga filantropi Islam mengalami proses transformasi kelembagaan sebagai respons terhadap pelbagai krisis yang terjadi di pelbagai belahan dunia, khususnya dimana kaum Muslim menjadi korban krisis tersebut. Di Palestina, organisasi kemanusiaan Islam internasional menjalankan program mereka, sementara organisasi filantropi Islam domestik juga semakin berkembang sebagai respons terhadap krisis politik dan ekonomi di teritorial yang berada dalam pendudukan Israel.³ Krisis yang diakibatkan bencana alam maupun karena ulah manusia seperti perang yang terjadi di negara-negara Afrika dan Asia telah menstimulasi “negara-negara minyak” (*petro-dollar countries*) untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan mendirikan LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang khusus bekerja dalam bidang tanggap bencana.⁴

Dalam dua dekade terakhir, lembaga-lembaga filantropi yang pendiriannya di sponsori negara-negara penghasil minyak, begitu pula organisasi-organisasi kemanusiaan yang didirikan komunitas yang berdomisili di negara-negara Barat telah mulai menjalankan operasi kemanusiannya di pelbagai belahan dunia. Didirikannya International Islamic Relief Organizations (IIROSA-*Haiah al-Igasah al-Islamiyyah al-Alamiyyah*) pada 1979, yang disponsori oleh Liga Muslim Dunia (*Rabitah ‘Alam Islami*), dapat dilihat sebagai sebuah terobosan baru dalam keterlibatan dunia Islam di bidang operasi kemanusiaan di lokasi krisis.⁵ Pada dekade berikutnya, khususnya

¹Lihat Mayke Kaag, “Aid, Ulama and Politics: Transnational Islamic NGOs in Chad,” in Benjamin F. Soares and René Otayek, *Islam and Muslim Politics in Africa* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 85-102.

²Samadia Sadouni, “New Religious Actors in South Africa: The Example of Islamic Humanitarianism,” in Benjamin F. Soares and René Otayek, *Islam and Muslim Politics in Africa* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 103-120; also J. Millard Burr and Robert O. Collins, *Alms for Jihad: Charity Terrorism in the Islamic World* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

³Matthew Levit, *Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad* (New Haven and London: Yale University Press, 2006), 143-170.

⁴Jonathan Benthall and Jerome Bellian-Jourdan, *The Charitable Crescent: Politics of Aid in the Muslim World* (London & New York: I.B. Tauris, 2003)

⁵Sejak didirikannya IIRO telah menjadi sebuah organisasi Islam transnasional yang mensponsori gerakan dakwah salafi, dan dituduh telah mensponsori gerakan-gerakan radikal Islam. Tidak diragukan lagi bahwa IIRO saat ini menjadi lembaga donor atau kemanusiaan berbasis Islam terbesar di dunia dan beroperasi di banyak negara-negara Muslim.

pada tahun 1980an dan 1990an, beberapa lembaga filantropi Islam internasional juga didirikan di negara-negara Barat dan Timur Tengah.

Di tengah dinamika geo-politik global, para peneliti menaruh perhatian pada pertumbuhan lembaga filantropi di dunia Muslim khususnya pasca peristiwa serangan 11 September. Saat itu, muncul apa yang disebut oleh Jonathan Benthall dengan “*overreaction against Islamic charities*”⁶ (reaksi [kecurigaan] berlebihan terhadap filantropi Islam), karena banyaknya aksi-aksi kekerasan yang diorganisasikan oleh kelompok garis keras Muslim yang dipercaya telah dibiayai oleh kegiatan filantropi Islam, baik secara domestik maupun internasional. Dengan menggunakan perspektif keamanan (*security perspective*), para pembuat kebijakan dan para pengamat telah melihat hubungan erat antara kelompok-kelompok radikal dan gerakan Islam internasional. Misalnya, segera setelah peristiwa serangan 11 September dan peristiwa Bom Bali, beberapa lembaga filantropi dan yayasan-yayasan Islam telah dituduh terlibat dalam mendukung aksi-aksi kekerasan dan terorisme. Alhasil, aktivitas-aktivitas dan sumber-sumber keuangan beberapa yayasan Islam baik yang berada di Timur Tengah maupun Indonesia dibekukan oleh komunitas internasional atas inisiatif Amerika dan beberapa negara Eropa.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa maraknya aktivitas dari lembaga filantropi Islam dapat dihentikan begitu saja oleh kebijakan dunia internasional yang juga didukung PBB. Alih-alih berlindung atau menghilang dari publik, beberapa lembaga filantropi Islam tampil lebih aktif dan atraktif di masyarakat.⁷ Mereka bahkan telah meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas dan kapasitas kelebagaannya, dan pada saat yang sama memperluas ekspansi cakupan “Islamisasi bantuan” (*Islamization of aid*).⁸ Kendati negara-negara Barat saat ini masih melakukan pengawasan ketat terhadap lembaga-lembaga filantropi Islam di dunia internasional, tetapi intervensi kemanusiaan di lokasi konflik dan bencana oleh lembaga filantropi Islam terus meningkat termasuk yang dilakukan oleh organisasi yang dikategorikan kelompok Islam radikal. Oleh karena itu, pertanyaan tentang bagaimana organisasi filantropi Islam internasional dari negara-negara Barat dan Timur Tengah menentukan mitra

⁶ Jonathan Benthall. “The Overreaction against Islamic Charities,” *ISIM Bulletin* (2007).

⁷ Jonathan Benthall, “The Overreaction against Islamic Charities,” *ISIM Bulletin* (2007).

⁸ Baca selanjutnya Marie Juul Peterson, “Islamizing Aid: Transnational Muslim NGOs after 9.11,” *Voluntas*, 23 (2012): 126-155.

domestik mereka; dan bagaimana dinamika politik dalam konteks domestik memberikan pengaruh pada orientasi lembaga Islam internasional masih menarik dan penting untuk dikaji, khususnya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang penduduk Muslim nya menganut—dan dipengaruhi oleh—bermacam ragam orientasi keislaman yang berasal dari balahan dunia Islam lain.

Di Indonesia, kehadiran lembaga-lembaga filantropi Islam internasional tidak hanya memperkaya sektor LSM pada wilayah diskursus dan praktiknya, melainkan juga mengubah bentuk dan karakter aktivisme Islam secara lebih luas. Organisasi-organisasi filantropi Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan organisasi-organisasi Muslim di arena global. Sayangnya, dalam studi-studi sektor LSM dan organisasi kemanusiaan saat ini, peran organisasi filantropi Islam internasional kurang diperhatikan atau lebih tepatnya sering diabaikan (*under-represented*). Oleh karena itu, di tengah banyaknya studi yang telah dilakukan mengenai lembaga kemanusiaan dan peran mereka dalam mendorong kesejahteraan sosial di Indonesia,⁹ studi tentang perkembangan lembaga filantropi Islam internasional dan peran mereka dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat domestik masih belum banyak dieksplorasi dengan baik. Padahal, lembaga filantropi Islam internasional saat ini, sangat aktif menjalankan pelbagai program dan kegiatan, seperti, tanggap darurat bencana, pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan dan juga program peningkatan penghasilan masyarakat.

Dalam konteks inilah, urgensi penelitian ini dilakukan, yaitu untuk menganalisis bagaimana lembaga filantropi Islam internasional yang berasal dari Barat dan Timur Tengah bersentuhan dengan isu-isu kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia, membangun kerjasama dengan lembaga atau organisasi masyarakat lokal, dan menempatkan misi mereka di Indonesia dalam bidang sosial, budaya, dan politik. Penelitian ini ini juga akan melihat secara lebih dekat implikasi sosial ekonomi dari membanjirnya lembaga filantropi Islam internasional terhadap organisasi filantropi

⁹Hasil-hasil studi y tentang filantropi Islam dan perkembangan gerakan sosial Islam di Indonesia bisa dibaca dalam Chaider S. Bamualim et al (ed.), *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia* (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2006); Amelia Fauzia. (ed.), *Filantropi untuk Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2006).

Islam di tingkat domestik. Untuk mempertajam unit analisis, penelitian ini difokuskan pada lima lembaga filantropi Islam internasional dengan profil sebagai berikut:

- Islamic Relief Worldwide (IR) adalah salah satu organisasi filantropi Islam terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1984, IR telah melakukan pelbagai bentuk projek kemanusiaan dan pembangunan (humanitarian aid and development projects) di pelbagai belahan dunia. Lembaga ini berbasis di Birmingham, Inggris. Target fundraising nya tidak terbatas pada komunitas Muslim yang berada di Inggris melainkan juga dari banyak negara, mulai dari Amerika Utara, Eropa, Afrika Selatan dan Malaysia.
- Muslim Aid (AA), didirikan di pada tahun 1985 dan berbasis di London Inggris. Muslim Aid memainkan peran penting seperti yang dilakukan Islamic Relief, yakni berperan sebagai LSM internasional yang spesialis di bidang tanggap bencana dan program pembangunan. Saat ini, Muslim Aid Indonesia (MAI) telah didirikan sejak tahun 2005 atau setahun setelah bencana Tsunami di Aceh.
- Asian Muslim Charity Foundation (*AMCF-Muassasah Muslimy Asia Al-Khairiyah*) adalah lembaga yang berasal dari Uni Emirat Arab yang berperan sebagai lembaga filantropi dan lembaga dakwah sekaligus. Pendirian lembaga ini dapat ditelusuri pada peristiwa tahun 1992 ketika Muhammadiyah dan Dar al-Bir Society membuat kesepakatan untuk membuat 'sekretariat bersama' dalam menjalankan program pendidikan, dakwah, kemanusiaan, dan kegiatan sosial. Secara organisatoris, AMCF telah menjadi yayasan terendiri di Indonesia. Dengan mengusung bendera Yayasan Muslim Asia, AMCF secara resmi terdaftar pada Kementerian Hukum dan dan HAM Republik Indonesia sejak tahun 2002.
- Qatar Charity didirikan oleh Amir Qatar (Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani) pada tahun 1992 dan telah berkembang menjadi salah satu organisasi nirlaba yang secara khusus focus pada tiga bidang: Program pembangunan berkelanjutan, Program siaga dan tanggap bencana, serta program sosial regular lainnya. Sebagai buah dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2002, Qatar Charity Indonesia (QCI) mendirikan cabangnya di Indonesia pada tahun 2006

- OIC Alliance berbasis di Saudi Arabia dan didirikan oleh beberapa lembaga filantropi Islam dan donor sebagai respons terhadap STsunami Aceh. OIC Alliance berperan sebagai penyalur dana-dana yang diperoleh dari lembaga donor, khususnya dari Timur Tengah atau beberapa negara OKI untuk kepentingan kemanusiaan.

Profile lembaga yang diteliti

Nama Lembaga	Asal negara	Pendirian	Kehadiran di Indonesia	Aktivitas utama
Muslim Aid	London, United Kingdom	1985	2005	Bantuan penanggulangan bencana, rekonstruksi, rehabilitasi, kemiskinan pelayanan sosial dan pemberdayaan.
Islamic Relief	Birmingham, United Kingdom	1984	2005	Bantuan penanggulangan bencana, rekonstruksi, rehabilitasi, kemiskinan pelayanan sosial dan pemberdayaan.
Qatar Charity	Qatar	1992	2006	Bantuan penanggulangan bencana, rekonstruksi, rehabilitasi, kemiskinan pelayanan sosial dan pemberdayaan.
Asian Muslim Charity Foundation	The United Arab Emirate	1992	First arrival in 1992, and officially registered 2002	Dakwah, pendidikan, dan bantuan penanggulangan bencana.
OIC (Organization of Islamic Conference) Alliance-IDB	Saudi Arabia	2005	2005	Bantuan penanggulangan bencana, rekonstruksi, rehabilitasi, kemiskinan pelayanan sosial dan pemberdayaan.

Tinjauan Pustaka

Budaya berderma di dalam masyarakat Muslim telah menstimulasi pertumbuhan lembaga-lembaga filantropi Islam. Muslim diperintahkan mendermakan sebagian harta mereka dalam rangka membantu kaum tidak mampu, melayani orang-orang yang terpinggirkan, dan untuk membantu saudara Muslim mereka yang mendapatkan kesulitan akibat krisis, baik disebabkan bencana alam atau konflik dan peperangan. Bagi kaum Muslim, Islam bukanlah sekedar sebuah agama yang

didasarkan pada teks-teks spiritual, tetapi juga simbol soliditas dan solidaritas para penganutnya di seluruh dunia. Al-Quran dan hadith (informasi yang dinisbatkan kepada Nabi) memberikan penekanan pada pentingnya memperkuat solidaritas, dalam pengertian bahwa seluruh kaum Muslim diperintahkan untuk membangun hubungan resiprokal (*al-takaful*) satu sama lainnya.¹⁰ Gagasan tentang kohesivitas Muslim dapat dimanifestasikan dalam pelbagai bentuk, termasuk budaya berderma, memberikan dukungan finansial dan politik terhadap sesama anggota komunitas (*umma*) yang menderita akibat dari ketidakadilan sistem sosial, ekonomi dan politik. Keterlibatan organisasi-organisasi Islam dalam pemberian bantuan, perlindungan dan pertahanan atas nama kesatuan umat dengan memberikan bantuan kemanusiaan sangatlah dinamis dan bahkan telah memicu perdebatan di kalangan para peneliti dan pengambil kebijakan.

Kepustakaan tentang bantuan-bantuan kemanusiaan dan filantropi Islam setidaknya bersentuhan dengan beberapa isu yang berbeda. Dalam menganalisis pengaruh organisasi Islam transnasional di Chad, Afrika, Mayke Kaag, berargumen bahwa bagi organisasi Islam, “*aid and umma are tightly entangled.*”¹¹ *Umma*, dalam pengertian komunitas Islam adalah konsep dasar yang digunakan kaum Muslim dalam memproyeksikan aktivitas sosial, ekonomi dan politik mereka. Bagi kaum Muslim, mendorong kesejahteraan ummat memiliki banyak makna, yaitu melindungi komunitas Muslim dari ancaman, memperkuat aktivitas ekonomi, dan menegakkan suprioritas Islam ataupun Islamisasi pada domain sosial dan politik. Melalui bantuan organisasi transnasional bisa menjadi bersifat politik karena adanya anggapan bahwa bantuan tersebut hanya untuk memperluas umat (“*to enlarge the umma*”).¹² Peneliti lainnya melihat bahwa masalah bantuan Islam dari segi keamanan (*security perspective*). Karena organisasi Islam transnasional dapat bekerja di pelbagai belahan dunia dan pada saat yang sama mereka memiliki orientasi politik dan ideologi yang berbeda. Oleh

¹⁰Lihat misalnya Olivier Roy, *Globalized Islam: the Search for a New Umma* (London: Hurst & Company), 65.

¹¹Mayke Kaag, “Aid, Ulama and Politics,” 86.

¹²Mayke Kaag, “Aid, Ulama and Politics,” 86.

karen aitu, menerapkan regulasi tentang dana-dana internasional dipandang perlu di berbagainegara.¹³

Dewasa ini, gerakan filantropi Islam telah menjadi fenomena global. Organisasi-organisasi filantropi Islam yang besar dan berasal dari Timur Tengah, bahkan bisa menjalankan programnya di pelbagai belahan dunia, tidak hanya di wilayah Timur Tengah tetapi juga di Afrika, dan bahkan mereka memiliki kantor-kantor cabang di Amerika Utara, Australia, Inggris, dan Eropa Barat. Dengan pelbagai motif, mulai dari motif keagamaan sampai politik, komunitas Muslim di negara-negara Barat telah mencoba terlibat dalam misi-misi kemanusiaan dengan menjadi gagasan kedermawan sebagai wacana utama.

Observasi yang menarik tentang organisasi filantropi Islam internasional telah dilakukan oleh Marie Juul Petersen yang berpandangan bahwa terdapat dua strategi yang digunakan oleh lembaga filantropi Islam di area internasional, yaitu: “*developmentalising Islamic aid*” (memberikan orientasi pembangunan pada bantuan Islam) and “*Islamising development aid*” (mengislamkan bantuan pembangunan). Istilah yang pertama, “*developmentalising Islamic aid*”, menandakan upaya-upaya yang dilakukan lembaga filantropi Muslim dari negara-negara Teluk untuk menyesuaikan ideologi mereka dengan budaya pembangunan, yang dengan budaya pembangunan tersebut mereka dapat sebanding dengan agensi-agensi internasional lainnya (“*to adjust their ideologies to the culture of development aid, thereby hoping to create resonance with other international agencies*”). Sementara istilah yang kedua, “*Islamising development aid*”, mengindikasikan upaya-upaya dari lembaga-lembaga kemanusiaan Muslim yang berasal dari negara-negara Barat untuk menciptakan ideologi yang secara simultan menarik donor-donor Muslim konservatif dan agenso-agensi sekular (“*to create ideologies that simultaneously appeal to conservative Muslim donors and secular aid agencies*”).¹⁴

Argumen tersebut di atas didasarkan pada studi yang dilakukan Marie-Juul Petersen terhadap 4 organisasi finatropi Muslim, yaitu Muslim Aid, Islamic Relief (IR), Saudi-based-International Islamic Relief Organization (IIROSA), organisasi yang

¹³James Shaw Hamilton, “Recognizing the Umma in Humanitarianism: International Regulation of Islamic Charities,” in Jon B. Alterman and Karin von Hippel (eds.), *Understanding Islamic Charities*, (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2007), 15.

¹⁴Marie Juul Petersen, “For Humanity or for the Umma: Ideologies of aid in four Transnational Muslim NGOs,” Dissertation, University of Copenhagen, 2011, 15-16.

berasal dari Kuwait Islamic Charitable Organisation (IICO). Marie-Juul Petersen seterusnya mencatat sebagai berikut:

“The two Gulf-based organisations and their audiences are firmly positioned in a Middle Eastern Islamic aid culture, but at the same time, they are beginning to reach out to audiences in the development culture. The two UK-based organisations, on the other hand, have become increasingly embedded in a Western development culture, but seek to maintain strong relations to the culture of Islamic aid.”

(Kedua organisasi yang berbasis di Teluk tersebut berada dalam budaya bantuan Timur Tengah, akan tetapi mereka mencoba menjangkau audiens yang berada dalam budaya pembangunan. Sementara di sisi lain, dua organisasi Islam dari Inggris itu telah menyatu dengan budaya pembangunan Barat akan tetapi mereka mencoba memelihara hubungan yang kuat dengan budaya sumbangan Islam)

Berdasarkan pada studi di atas, seorang peneliti tidak bisa mengabaikan gerakan Islam transnasional secara luas dalam mengamati organisasi filantropi Islam. Pasalnya, dalam dua dekade terakhir, banyak literatur yang telah ditulis mengenai gerakan Islam transnasional dengan pendekatan dan disiplin yang berbeda-beda. Kehadiran gerakan Islam transnasional dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah dan gelombang gerakan salafisme di Asia Tenggara telah menarik perhatian para peneliti dan pengambil kebijakan. Sebab, Saudi berperan besar dalam mendanai gerakan-gerakan Islam Salafi yang saat ini mewarnai ruang publik, setidaknya sejak tahun 1980an atau 1990an. Penyebaran sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren Salafi, dan pertumbuhan jumlah yayasan-yayasan dakwah Islam dan sosial, serta perkembangan organisasi-organisasi filantropi Islam di beberap anegara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina dapat dilihat sebagai hasil dari hubungan dialektis antara kaum Muslim di Asia Tenggara dan gerakan transnasional Islam yang berasal dari Timur Tengah.

Kendati Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, itu tidak berarti bahwa hadirnya gerakan Salafi berjalan mulus begitu saja. Dalam beberapa kasus, ketegangan juga kerap terjadi antara kelompok arus utama Islam baik yang berorientasi modernis maupun konservatif, dapat dianggap sebagai upaya sukses Saudi Arabia dalam mempromosikan kepemimpinannya dalam konstelasi global maupun dalam menerapkan kebijakan Islam transnasionalnya (*“leadership position in the global*

politics of the Muslim world” maupun dalam konteks “*transnational Islamic policy*”).¹⁵ Selaras dengan hal itu, gerakan Islam transnasional seperti Hizbut Tahrir dari Palestina¹⁶ Ikhwanul Muslimin di Mesir,¹⁷ juga memiliki pengaruh besar bagi ruang publik serta dinamika politik Islam di Indonesia saat ini. Meskipun pemerintah menaruh perhatian besar terhadap konsekuensi dari kehadiran gerakan Islam transnasional yang kadang memiliki orientasi sangat politis, jumlah lembaga-lembaga filantropi di Indonesia tumbuh secara signifikan dan memainkan peran penting di pedesaan maupun perkotaan. Sejak tahun 1990an, khususnya setelah krisis ekonomi dan politik, Indonesia juga menyaksikan pertumbuhan lembaga filantropi yang luar biasa yang sumber dananya didapatkan dari sumbangan masyarakat lokal maupun lembaga internasional.

Sebelum lebih jauh mengupas profil lembaga filantropi Islam internasional yang menjadi fokus penelitian ini, perlu digambarkan terlebih dahulu studi-studi terdahulu yang perbandingan karakteristik filantropi Barat dan filantropi Islam. Perbandingan tersebut penting dan akan memberikan kepada kita kerangka kerja konseptual untuk menanalisis sifat dari organisasi Islam transnasional dan organisasi domestik di Indonesia. Seperti halnya di tempat lain, terdapat kompetisi atau persaingan antara ‘*Western Aid*’ dan ‘*Islamic Aid*’. Studi yang dilakukan Jerome Bellion Jourdan di Sudan, Samadia Sadouni di Afrika Selatan, dan Mayke Kaag di Chad, menyimpulkan bahwa organisasi filantropi Islam dipengaruhi oleh visi dakwah, dan pada saat yang sama diwarnai oleh ketegangan atau persaingan antara kelompok Muslim moderat dan kelompok islamis, antara organisasi yang memiliki orientasi karitatif dan berorientasi pembangunan, dan antara Muslim dan missionaris Kristen, serta persaingan antara organisasi filantropi yang berasal dari dunia Muslim dan dunia Barat.

Isu kunci lainnya yang perlu dielaborasi adalah bagaimana perbedaan antara budaya LSM ala Barat (‘*western type of NGOs*’) dan budaya lembaga filantropi Islam. Lembaga donor ala barat (‘*development aid*’) di Indonesia telah diadopsi oleh banyak LSM-LSM domestik. Dalam kaitan ini, perlu ditekankan bahwa kemunculan

¹⁵Noorhaidi hasan, “Between Transnational Interest and Domestic Politics: Understanding Middle Eastern fatwas on Jihad in the Moluccas,” *Islamic Law and Society*, 12, 1 (2005), 91.

¹⁶M. Iqbal Ahnaf, “Between Revolution and Reform: The Future of Hizbut Tahrir Indonesia,” *Dynamics of Asymmetric Conflict* (July, 2009), 1-17.

¹⁷For the profile of PKS, See Kikue Hamayotsu, “The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia,” *Asian Survey*, vol. 51 (2011), 971-992.

organisasi-organisasi Islam yang memiliki program pembangunan dan advokasi juga karena dipicu oleh massif nya lembaga serupa di kalangan sekular maupun komunitas Kristiani. Secara historis kehadiran lembaga donor barat di Indonesia bisa dilihat sejak tahun 1950an. Bahkan LSM-LSM di Indonesia sudah cukup dekat dengan lembaga-lembaga asing yang mengangkat isu-isu demokrasi, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan sebagainya sejak tahun 1960an. Beberapa lembaga donor dari Barat, yang direpresentasikan oleh LSM-LSM asing, aktif melibatkan LSM-LSM lokal, yayasa-yayasan keagamaan dan sebagainya dalam mendorong perubahan sosial. Selaras dengan itu menguatnya lembaga-lembaga donor sekular dari Barat, organisasi-organisasi keagamaan yang berasal dari Amerika Utara dan Eropa Barat juga menguat di Indonesia. Bahkan, di wilayah Indonesia Timur yang dihuni oleh mayoritas non-Muslim, organisasi-organisasi donor dari Barat seperti Amerika, Jerman dan Belanda aktif bekerjasama dengan gereja.

Berdasarkan pada studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya maka penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam studi sektor non profit dan gerakan sosial di Indonesia, secara umum, dan studi filantropi Islam secara khusus. Di bidang studi filantropi Islam saat ini, belum banyak literatur di Indonesia yang mendiskusikan tentang lembaga filantropi Islam internasional dan dampaknya dalam bidang kesejahteraan sosial pasca bencana. Buku penulis pertama yaitu *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: Gramedia 2010) mendiskusikan tentang peran sosial organisasi terbesar Islam di Indonesia dalam bidang pengelolaan filantropi, sedangkan buku kedua yaitu *Politik Filantropi Islam di Indonesia: negara, Pasar dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Ombak 2013) mengelaborasi aspek-aspek legal dan politik dari pengelaan filantropi Islam, baik yang dikelola lembaga masyarakat sipil, perusahaan-perusahaan swasta baik BUMN maupun non-BUMN, serta lembaga yang disponsori pemerintah, seperti BAZ. Namun demikian, organisasi filantropi Islam internasional belum mendapatkan pembahasan yang memadai.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di empat daerah dimana lembaga-lembaga filantropi Islam internasional menjalankan program-

programnya, baik berupa program tanggap darurat bencana, rekonstruksi, rehabilitasi, program pembangunan berkelanjutan, program sosial karitatif, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Penelitian itu melakukan studi etnografis dan mengeksplorasi data penelitian dengan beberapa cara.

Pertama, adalah studi pustaka yang akan dilakukan untuk mendalami studi-studi terbaru tentang LSM, filantropi Islam, lembaga kemanusiaan, gerakan sosial Islam, kebijakan pemerintah terhadap organisasi asing, dan sebagainya. Penelitian dilakukan baik melalui penelusuran literatur terbaru di perpustakaan maupun dengan membeli buku-buku terbaru.

Kedua, wawancara dilakukan dengan para pengelola lembaga filantropi Islam internasional, baik pimpinan maupun relawan, lembaga filantropi domestik, dan para pengambil kebijakan. Hal ini perlu dilakukan untuk memahami lebih jauh visi, misi, persepsi dan pandangan para pelaku filantropi Islam terhadap isu-isu sosial dan ekonomi di Indonesia serta rumusan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikannya.

Ketiga, observasi di lapangan yang dilakukan di lokasi dimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan programnya. Model kajian etnografis akan digunakan untuk memahami lebih dekat kegiatan aoa yang terjadi di lapangan, dan bagaimana masyarakat mempersepsikan kehadiran lembaga filantropi Islam internasional. Penelitian etnografis akan dilakukan di beberapa kota, yaitu Aceh, Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Peneliti akan mengunjungi dan mengeksplorasi informasi yang didapatkan dari lembaga-lembaga keagamaan, sosia, yayasan-yayasan, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, pimpinan tokoh masyarakat, dan sebagainya.

Keempat, untuk memahami dan mengetahui dampak sosial, keagamaan, dan politik dari organisasi filantropi Islam, (pada tahun kedua) akan dilakukan FGD (*Focus Group Discussion*) di beberapa tempat, baik sebelum maupun pada saat berada di lapangan.

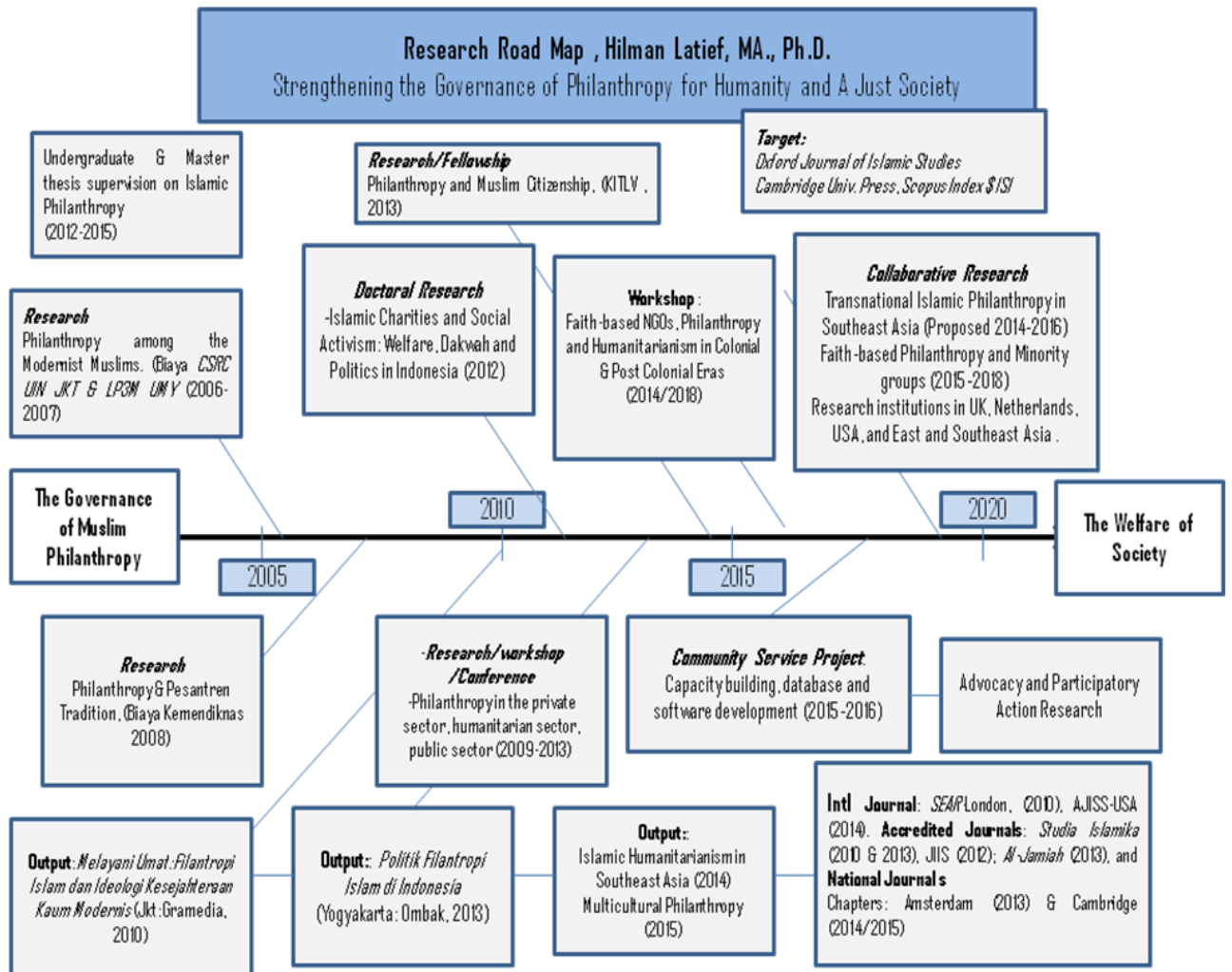
Langkah Penelitian

Tujuan	Kegiatan	Luaran	Indikator	
Tahun pertama <i>Pertama</i> , untuk menelaah cara-cara, alasan-alasan, dan faktor-faktor yang menentukan pemilihan kerjasama oleh lembaga filantropi Islam internasional terhadap	Persiapan studi, pengumpulan data-data kepustakaan yang relevan	Kepustakaan	Ketersediaan kepustakaan dan bahan awal	
	Studi awal terhadap profil lembaga-lembaga internasional di Indonesia. Kunjungan	Peta karakteristik lembaga filantropi asing yang beroperasi di Indonesia pasca	Ketersediaan data profil lembaga filantropi Islam internasional di	

<p>lembaga kemanusiaan domestik yang ada di Indonesia.</p> <p>Kedua mengetahui tujuan, alasan dan agenda lembaga-lembaga internasional untuk mendirikan kantor cabang organisasi di Indonesia secara permanen di lokasi-lokasi bencana.</p> <p>Ketiga, Menganalisis model-model kerjasama yang dilakukan oleh organisasi Islam internasional bersama organisasi kemanusiaan domestik, pasca bencana.</p>	ke lokasi lembaga tsb berada.	bencana	Indonesia.	
	Pengamatan tahap satu di 4 lokasi. Kunjungan ke lokasi tempat lembaga itu menjalankan programnya, baik di pedesaan maupun perkotaan	Peta sosial-ekonomi masyarakat, karakteristik desa atau kota tempat dijalankannya program, beneficiaries dari program, dan pelaksana.	Teridentifikasinya masalah sosial, budaya dan ekonomi di lokasi bencana Tersedianya data tentang lokal partner serta karakteristiknya.	
	Penentuan subjek penelitian di lokasi penelitian	Subjek penelitian: lembaga filantropi Islam internasional	Peta subjek yang diteliti: jumlah dan jenis lembaga yang bekerjasama, serta model-model kerjasama serta program yang dijalankan di lokasi penelitian	
	Seminar hasil penelitian	Revisi laporan	Laporan	
	Penulisan laporan	Laporan	Draft untuk publikasi tahap 1	
<p>Tahun Kedua</p> <p>Pertama, mengetahui dampak dari kehadiran lembaga filantropi Islam internasional dan program-programnya di bidang sosial</p> <p>Kedua, mengetahui dampak dari kehadiran lembaga filantropi Islam internasional dan program-programnya di bidang ekonomi</p> <p>Ketiga, mengetahui dampak dari kehadiran lembaga filantropi Islam internasional dan program-programnya di bidang keagamaan.</p>	Observasi dan Studi etnografi pada lembaga sosial dan pendidikan	Dampak dari kerjasama di bidang sosial dan pendidikan	Tersedianya gambaran yang terukur tentang dampak di bidang sosial dan pendidikan	
	Observasi dan Studi etnografi pada lembaga kesehatan.	Dampak dari kerjasama di bidang kesehatan	Tersedianya gambaran yang terukur tentang dampak di bidang kesehatan	
	Observasi dan Studi etnografi pada lembaga keagamaan	Dampak sosial di bidang keagamaan	Tersedianya gambaran yang terukur tentang dampak di bidang sosial dan pendidikan	
	Penggalan data tambahan pada lembaga pemerintah mengenai kebijakan tentang LSM atau donor asing di provinsi yang diteliti	Kebijakan pemerintah di tingkat nasional dan daerah	Tersedianya peta kebijakan tentang donor dan LSM asing	
	Penguatan kualitas laporan penelitian	Draft artikel journal (Bahasa Inggris)	Terpublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal internasional	

Jadwal Kegiatan

No	Aktivitas/Kegiatan	April	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov
	Pembuatan proposal								
	Penyiapan instrument dan kelengkapan dokumen								
	Studi Pustaka dan dokumen yang terkait								
	Pengumpulan data tahap 1: mencari profile lembaga observasi/wawancara di Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan Banda Aceh.								
	Pengumpulan data tahap 2: Observasi dan studi etnografi Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan Banda Aceh.								
	Analisis data								
	Pembuatan laporan								



BAB 2

BANTUAN INTERNASIONAL DAN LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA

Pasca Orde Baru, organisasi filantropi Islam transnasional di Indonesia jumlahnya kian meningkat. Mereka datang dari pelbagai negara, terutama negara-negara kaya penghasil minyak di wilayah Teluk (Timur Tengah), seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Saudi, maupun dari negara-negara Barat, seperti Inggris dan Amerika. Kehadiran organisasi filantropi Islam transnasional di Indonesia menyisakan beberapa pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam: mengapa dan bagaimana Indonesia menjadi target lembaga bantuan (donor) internasional? Bagaimana kontestasi ideologis dan politis dari kehadiran lembaga-lembaga tersebut di kalangan Muslim Indonesia? Dalam konteks seperti apa kehadiran lembaga filantropi transnasional membentuk karakteristik ideologis dan model aktivisme sosial Islam Indonesia?

Kehadiran Lembaga Donor Internasional di Indonesia

Lembaga keagamaan merupakan salah satu aktor penting dalam mendukung kegiatan-kegiatan sosial dan pembangunan di dalam masyarakat baik yang dipelopori oleh pemerintah maupun lembaga bantuan asing. Sejak akhir abad ke sembilan belas dan awal abad ke dua puluh, khususnya pada masa kolonial Belanda, skema bantuan asing yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup sosial dan ekonomi masyarakat sudah banyak dipelopori oleh lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah kolonial. Pada masa kolonial Belanda, misionaris Kristen dari Belanda dan Jerman, misalnya, sudah menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok keagamaan, khususnya gereja di tanah air.

Ketika komunitas Muslim masih bergelut dalam menemukan jati diri keislamannya, seiring dengan pelbagai pengaruh dari para pemuda yang pulang belajar di Timur Tengah, yang kemudian melahirkan organisasi-organisasi keagamaan, gereja-gereja Kristen sudah banyak menjalankan kegiatan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan klinik-klinik kesehatan model Barat.

Lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan modern di kalangan Muslim sendiri baru beberapa tahun muncul setelah lembaga pendidikan dan kesehatan Kristen. Salah satu organisasi keagamaan yang kental dengan kegiatan sosial, pendidikan dan kesehatan adalah Muhammadiyah yang didirikan Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dan beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1920an menginisiasi pendirian klinik-klinik kesehatan.¹⁸

Peran-peran masyarakat sipil berbasis keagamaan terus meningkat dari waktu ke waktu, dan memainkan peran penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial lebih intensif menjalankan programnya beserta kaum pribumi. Hal ini terus berlanjut sampai pada masa awal pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Lepasnya Indonesia dari tangan Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang, tidak serta merta memutus hubungan antara Indonesia dengan negara yang pernah mengkoloninya. Interaksi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Belanda, misalnya, terus berlanjut dengan munculnya skema-skema baru pembangunan, dan hubungan tersebut menjadi lebih dinamis seiring dengan keberlanjutan hubungan antara gereja-gereja di tanah air dengan gereja dan pemerintah Belanda.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Karel Steenbrink, seorang Indonesianis asal Belanda, berjudul *“The Power of Money: Development Aid for and through Christian Churches in Modern Indonesia, 1965-1980”* digambarkan bahwa sejak tahun 1950an, organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang diwakili oleh gereja, sangat intensif bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor asing. Di wilayah Indonesia Timur, yang sebagian besar dihuni oleh penganut Kristen, lembaga-lembaga Kristen dari Barat, khususnya Amerika, Belanda dan Jerman telah bekerjasama sama dengan gereja-gereja lokal. Disamping menjalankan misi keagamaan, gereja-gereja lokal bersama mitra luar negerinya juga menjalankan kegiatan pembangunan dan berperan sebagai agen perubahan sosial.

Menurut Steenbrink, kuatnya peran gereja sebagai mitra donor asing pada tahun 1950s dikarenakan pada tahun-tahun tersebut, belum banyak terdapat—untuk

¹⁸Lihat Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: Gramedia, 2010); Health Provision of the Poor: baca juga Hilman Latief, “Health Provision for the Poor: Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia,” *Journal of Southeast Asia Research*, 18, 3 (September 2010), 503-553.

mengatakan tidak ada sama sekali—lembaga masyarakat yang saat ini dapat dikategorikan sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM),¹⁹ yaitu organisasi non pemerintah yang memiliki tujuan khusus dan program-program khusus dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga keagamaan, gereja telah menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkumpul, berkomunikasi, dan selanjutnya merumuskan kebutuhan sosial mereka. Pada tahun-tahun itu pula, pemerintah Jerman dan beberapa gereja Katolik telah menjalankan proyek yang kemudian disebut Flores-Timor Plan (FTP).

Selara dengan itu, gereja-gereja Katolik dan Protestan dari Belanda seperti yang diwakili oleh organisasi Protestan seperti ICCO (*Interkerkelijk Commissie voor Contact inzake Ontwikkelings-samenwerking*) dan organisasi Katolik CEBEMO (*Centrale voor Bemiddeling bij Medefinanciering van Ontwikkelingsprogramma's*) juga telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung proyek-proyek di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, pertanian dan sebagainya yang dijalankan bersama dengan gereja-gereja setempat di Indonesia.

Secara bertahap, seiring dengan kerja-kerja pemberdayaan yang membutuhkan energi yang kuat, gerakan yang lincah, dan model tindakan yang spesialis, para aktivis gereja kemudian mendirikan organisasi-organisasi otonom dalam bentuk LSM agar kerja-kerja sosial, pemberdayaan dan pembangunan menjadi lebih efektif. Untuk itu, sangat bisa dipahami bahwa sektor LSM di kalangan komunitas Kristen muncul lebih awal dibanding dengan komunitas Muslim. Para aktivis gereja di Indonesia sudah lebih dulu 'belajar' melakukan proses pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga kecil yang lebih spesifik kerjanya. Hingga kini banyak LSM yang dipelopori dan dijalankan oleh komunitas Kristen dan secara organisatoris memiliki akar gereja, namun pada saat yang sama bersifat otonom atau malahan independen dari gereja, mulai banyak didirikan sejak awal tahun 1970an. Sebut saja misalnya Bina Swadaya, sebuah LSM besar dan ternama yang didirikan tahun 1967. Kehadiran Bina Swadaya tidak bisa dilepaskan dari Bambang Ismawan dan seorang Pastur Jesuit Fr Chris Melcher yang pada tahun 1958 mendirikan Ikatan Petani Pancasila (ITP), sebagai induk

¹⁹Kareel Steenbrink, "The Power of Money: Development Aid for and through Christian Churches in Modern Indonesia, 1965-1980," in Susane Schöter (ed.), *Christianity in Indonesia: Perspectives of Power* (Berlin: Lit., 2010), 108-18 and 119-22.

dari Bina Swadaya.²⁰ Selain Bina Swadaya, CD-Bethesda adalah contoh lain dari LSM yang didirikan komunitas Kristen Protestan di Yogyakarta pada tahun 1974, dan secara khusus berperan dalam layanan sosial dari Rumah Sakit Kristen Bethesda. Tidak hanya itu, beberapa aktivis Kristen dan Gereja mendirikan lembaga independen berupa LSM advokasi dan pengembangan masyarakat di bidang pertanian, kesehatan, pelestarian lingkungan dan sebagainya untuk menerjemahkan pandangan-pandangan keagamaan dalam ranah publik yang lebih luas.

Pertumbuhan LSM pada tahun-tahun tersebut dapat dimaklumi. Pasalnya, sejak pertengahan tahun tahun 1960an sampai tahun 1980an lah negara-negara Barat semakin gencar membuat kebijakan luar negeri mereka dengan, salah satunya, mengirimkan bantuan pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat tidaklah selalu mulus, terutama pada tingkat pemerintah. Pasalnya pemerintah Indonesia memiliki hubungan yang “pasang-surut” dengan negara-negara Barat. Pada tahun masa Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, Indonesia pernah menarik diri dari keanggotaan PBB (Perserikatan bangsa-bangsa). Presiden Soekarno yang memang dikenal ‘dekat’ dengan kelompok Komunis pada waktu itu menunjukkan sikap yang kurang bersahabat dengan beberapa negara Barat yang berujung pada keputusannya memutus kontak dengan mereka. Bahkan, pertengahan tahun 1960an Soekarno sangat dikenal dengan pernyataannya: “*go to hell with your aid*” yang ditujukan kepada Amerika akibat kekecewaannya terhadap intervensi Amerika terhadap kedaulatan Indonesia.

Baru pada masa awal Order Baru, setelah kejatuhan Soekarno, Indonesai mulai menjadi tempat mengalirnya dana-dana asing.²¹ Sejak itu investasi dan bantuan asing ke Indonesia meningkat kembali. Meski demikian, sejarah kembali terulang pada masa Orde Baru ketika pada tahun 1992, Presiden Soeharto menolak dana bantuan dari

²⁰ Perlu dicatat bahwa Pada masa Orde Baru, ITP berhadapan dengan situasi politik yang sulit karena adanya larangan dari pemerintah Order Baru terhadap organisasi tani independen, sampai kemudian ITP memilih dua strategi: yaitu pertama, mendirikan yayasan baru yang independen bernama YSTM (Yayasan Sosial Tani Membangun) dengan Bina Swadaya sebagai sayap operasionalnya; dan kedua bergabung dengan HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) yang menjadi underbow partai Golkar. Kemudian Bina Swadaya berkembang menjadi sebuah LSM independen. Lihat Bob S Hadiwinata, *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement* (London and New York: RoutledgeCurzon, 2003), 126.

²¹Kareel Steenbrink, “The Power of Money,” 108.

negara Belanda sebagai buah dari persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda mengenai pembantaian di Timor Leste (Timur). Pada waktu itu, Presiden Soeharto menilai bahwa pemerintah Belanda terlalu banyak memberikan tekanan terhadap pemerintah Indonesia mengenai tragedi pembantaian demonstran di Timor Timur tersebut, dan karena itu Belanda dianggap telah mencampuri urusan domestik dan mengganggu kedaulatan pemerintah Indonesia. Masih pada masa Soeharto, bantuan dana asing menjadi kontroversi ketika Indonesia menghadapi krisis moneter pada tahun 1997, dan dengan terpaksa harus menerima intervensi IMF dengan menerima bantuan mereka dan pada saat yang sama mengikuti apa yang ditentukan IMF sebagai pemberi dana bantuan (pinjaman).

Hubungan lembaga bantuan (donor) dari negara-negara Barat dengan yayasan-yayasan atau LSM yang didirikan aktivis Muslim juga dapat dilihat sejak tahun 1970an dan sampai saat ini. LSM-LSM Islam mulai “setara” dengan LSM-LSM lainnya dalam hal kesempatan mengakses dana-dana bantuan dari lembaga donor untuk menjalankan program dan kegiatan pengembangan masyarakat di pelbagai sektor, seperti advokasi, penguatan kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintah, pendampingan kelompok-kelompok marjinal, pelestrarian lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan sebagainya. Munculnya LSM-LSM di kalangan Muslim tidak bisa dilepaskan dari upaya beberapa aktivis Muslim yang pada tahun 1970an mendirikan LP3ES, sebuah lembaga kajian dan penelitian ilmu-ilmu sosial yang cukup prestisius di kalangan aktivis Muslim. Selain melakukan riset-riset di bidang sosial dan ekonomi, LP3ES juga bergerak di wilayah pendampingan masyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan dan program peningkatan ekonomi mikro dan kecil serta masyarakat sipil.

Para peneliti telah mencoba menggambarkan bagaimana sektor masyarakat sipil Islam di Indonesia melalui LSM-LSM yang didirikan oleh aktivis Muslim mulai bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor dari Barat. Martin van Bruinessen dalam studinya tentang masyarakat sipil Islam di Indonesia, menggambarkan perkembangan sektor LSM di Indonesia, arah perkembangannya wacana dan aksinya serta, jaringan yang dimiliki mereka dengan organisasi pengelolaan dana dari luar negeri. Beberapa LSM Muslim mulai merambah isu dan topik yang lebih luas, seperti masalah

kesejahteraan, kesehatan, keadilan gender, demokrasi dan masyarakat sipil.²² Pada tahun 1980an, beberapa LSM didirikan oleh kelompok Muslim tradisional, seperti P3M (Perhimpunan Pesantren dan Pengembangan Masyarakat). Dengan pelbagai program pendampingan masyarakat yang dijalankannya, serta wacana yang dikembangkannya, apa yang dilakukan oleh P3M dan LSM sejenis di kalangan Muslim telah menarik perhatian para donor. Beberapa lembaga donor dari Barat, sebut saja umpamanya Friedrich Naumann Stiftung dari Jerman, HIVOS dari Belanda, the Asia Foundation dan Ford Foundation dari Amerika yang telah menjadi mitra kerja LSM-LSM Muslim selama bertahun-tahun. Sejak itu, termasuk pada tahun 1990 hingga sekarang, persentuhan antara lembaga donor asing dengan LSM lokal dirajut lebih intensif, dan LSM-LSM Muslim pun tumbuh subur dengan menjalankan pelbagai program seperti kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, analisis kebijakan, penguatan masyarakat sipil, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.²³

Perlu ditekankan lagi di sini bahwa tidak semua kelompok Muslim mendapatkan kesempatan serupa. Agaknya, beberapa lembaga donor dari Barat cenderung untuk bekerja sama dengan kelompok Islam yang mampu mempromosikan isu-isu “besar” seperti demokrasi dan pluralisme agama. Dalam konteks ini, masalah kesenjangan antara kelompok ‘liberal’ dan ‘anti-liberal’ di kalangan Muslim Indonesia semakin tajam dan acapkali dikaitkan dengan kehadiran donor asing. Dalam kaitan inilah sebenarnya kontestasi ideologis menjadi terlihat lebih jelas. Kelompok Muslim liberal acap dituduh menjadi agen Barat dan mengusung tema-tema serta agenda yang pro dengan peradaban Barat sekular. Pada saat yang sama, kelompok konservatif Muslim juga tidak lepas dari tuduhan telah menjadi corong ideologi Islam konservatif karena telah dibiayai oleh negara-negara penghasil minyak di Timur tengah.

Kendati studi tentang gerakan Islam transnasional Islam di Indonesia sudah banyak dilakukan, kehadiran lembaga-lembaga filantropi Islam internasional dan

²²Phillip J. Eldridge, *Non-Governmental Organizations and Democratic Participation in Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 173-8.

²³ Martin van Bruinessen, “Post-Soeharto Muslim Engagement with Civil Society and Democratization,” in Hanneman Samuel & Henk Schulte Nordholt (ed.) *Rethinking ‘Civil Society’, ‘Region’, and ‘Crisis’*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 37-66; Martin van Bruinessen and Farid Wajidi, “*Syuhun ijtima’iyah* and the *kiai rakyat*: Traditionalist Islam, civil society and social Concern,” in Henk Schulte Nordholt (ed.), *Indonesian Transitions*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 205-248.

konsekuensi sosial, keagamaan dan politik yang dihasilkannya di Indonesia belum mendapat perhatian yang memadai. Studi-studi yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti tentang gerakan Islam transnasional, tidak secara spesifik mengungkap secara mendalam trend baru diantara gerakan Islam tersebut dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Sebut saja studi tentang Islam Salafi, sebuah gerakan transnasional Islam asal Saudi dan memiliki akar yang kuat dengan jaran Muhammad bin Abdul Wahab yang mempromosikan puritanisme Islam, telah banyak diungkap aspek tipikal ajarannya, model pendidikannya, dan proses radikalisasinya.²⁴

Begitu pula dengan pengaruh gerakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Syiah dan Ahmadiyah telah banyak dikupas dari pelbagai sisi, terutama sisi ideologi politik dan keagamaannya, interaksinya dengan masyarakat, dan sebagainya. Meski organisasi atau gerakan Islam transnasional tersebut di atas kehadirannya terasa begitu kuat di ruang publik, upaya para peneliti untuk menilik praktik-prantik filantropi Islam dan aktivisme sosial dari gerakan transnasional masih sangat kurang.

Studi ini hadir dalam mengisi kekosongan studi tentang gerakan Islam transnasional di Indonesia dengan secara spesifik mengkaji lembaga filantropi Islam transnasional. Dalam tulisan ini, penulis hendak mengajukan tesis bahwa: pertama, kehadiran lembaga filantropi Islam transnasional di Indonesia telah menjadi alternatif bagi organisasi-organisasi Islam lokal untuk dapat mengakses dana-dana bantuan internasional yang selama ini tidak bisa mereka dapatkan dari lembaga-lembaga bantuan (donor) dari negara-negara Barat; kedua, kehadiran lembaga filantropi Islam transnasional di Indonesia juga memberikan konsekuensi kuat dalam pertarungan ideologis di kalangan Muslim Indonesia dalam menentukan identitas keislamannya; ketiga, interaksi antara gerakan filantropi Islam transnasional dan organisasi sosial-keagamaan lokal di Indonesia telah membentuk pola baru aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) Islam di Indonesia.

²⁴Untuk lebih jauh tentang gerakan Salafi di Indonesia lihat: Noorhaidi Hasan. "The Salafi Madrasas of Indonesia," in Farish A. Noor, Yoginder Sikand, & Martin van Bruinessen (eds.), *Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkage* (Amsterdam: ISIM & Amsterdam University Press, 2008), 247-274; Din Wahid, "Challenging Religious Authority: the Emergence of Salafi Ustadh in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 6, No. 2 (2012), 245-264.; Amanda Kovacs, "Saudi Arabia Exporting Salafi Education and Radicalizing Indonesia's Muslim," *GIGA Focus*, No. 7 (2014), 1-8.

Perkembangan Lembaga Filantropi di Dunia Islam

Penting untuk dipertegas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan organisasi filantropi Islam transnasional dan aspek apa yang membedakannya dengan gerakan Islam transnasional lainnya. Organisasi atau gerakan filantropi Islam transnasional dalam tulisan ini mencakup organisasi-organisasi Islam internasional yang memiliki peran khusus dalam aktivitas filantropi dan kemanusiaan seperti melakukan kegiatan penanggulangan korban bencana alam, bantuan untuk mengatasi kemiskinan dan krisis makanan, dan menyelenggarakan kegiatan sosial lainnya. Dengan pengertian seperti digambarkan di atas, tulisan ini hanya membatasi pembahasan pada organisasi-organisasi yang memang sejak awal didirikannya diarahkan sebagai organisasi filantropi, tidak semata-mata organisasi politik Islam atau gerakan dakwah semata-mata. Kendati demikian, dalam pembahasan ini bisa jadi terdapat persinggungan yang kuat antara organisasi filantropi Islam dengan kegiatan pendidikan, dakwah dan juga politik.

Pada mulanya, organisasi filantropi Islam internasional didirikan oleh komunitas Muslim lokal di daerah tertentu dan berasal dari negara tertentu. Sumber pendanaan yang diperoleh utamanya berasal dari komunitas Muslim yang menyalurkan dana zakat dan sedekah kepada organisasi-organisasi tersebut. Seiring dengan menguatnya pengaruh globalisasi, beberapa organisasi filantropi lokal itu bertransformasi menjadi lembaga internasional dengan cara memperluas cakupan kerja mereka, dan sumber pendanaan pun tidak terbatas pada komunitas lokal, melainkan dari komunitas Muslim lain yang berada di negara atau bahkan benua yang berbeda. Dukungan yang kuat dalam bentuk sumbangan dana kepada lembaga-lembaga telah meniscayakan terjadinya proses internasionalisasi atau globalisasi. Artinya, beberapa lembaga filantropi Islam internasional telah memiliki kapasitas untuk beroperasi di luar tempat asalnya. Mereka mengirimkan bala bantuan kepada korban bencana di negara-negara lain.

Dunia Islam (*the Muslim World*) atau bisa disebut juga negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim menyaksikan pertumbuhan lembaga-lembaga filantropi yang cukup pesat, setidaknya dilihat dari aktivitas misi kemanusiaan yang

dilakukan di lokasi-lokasi konflik atau bencana alam di pelbagai belahan dunia. Hal itu terjadi setidaknya beriringan dengan pelbagai konflik yang terjadi di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Palestina, Bosnia, dan beberapa negara di Afrika, seperti Chad, Sudan, Ehtopia, dan lain-lain. Kehadiran lembaga filantropi Islam internasional untuk membantu korban bencana merupakan wujud dari rasa solidaritas, utamanya solidaritas keagamaan. Di dalam Islam, terdapat satu ajaran yang menegaskan posisi Muslim terhadap Muslim lainnya, yang diibaratkan sebagai satu jasad tubuh yang utuh. Bila satu anggota tubuh sakit atau disakiti, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakannya.

Negara-negara Islam memang memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda antara satu sama lain. Selain beberapa negara yang dikategorikan negara miskin (*poor countries*) yang masih diwarnai dengan bencana kelaparan, sebagian lainnya masih dalam kategori (*under-developed countries*). Meski demikian, beberapa negara Muslim merupakan negara kaya dengan penghasil minyak yang tinggi, atau disebut dengan negara-negara penghasil minyak. Ditemukannya minyak memiliki dampak perkembangan ekonomi yang signifikan bagi beberapa negara Muslim. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, negara-negara Muslim berkembang menjadi menyumbang besar minyak dunia, sehingga tidak heran, tingkat ekonomi neraga tersebut terus meningkat, dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Hal ini bisa kita saksikan dari beberapa negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, negara seperti Iran, Irak dan Libya juga termasuk negara-negara penghasil minyak yang besar.

Alhasil, dengan ditemukannya minyak di negara-negara Muslim, kesejahteraan masyarakat Muslim meningkat, dan hal ini pula menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga filantropi Islam di negara-negara Muslim. Saudi, misalnya, sejak ditemukannya minyak, telah lama menjadi negara yang aktif memberikan bantuan kepada negara-negara Muslim di Asia maupun Afrika, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan Saudi menjadi negara yang berpengaruh di negara-negara Arab, khususnya wilayah teluk, dan juga di kalangan anggota OIC (*Organizations of Islamic Conference*). Oleh karena itulah, IIRO (*International Islamic Relief Organizations*) yang bermarkas di Saudi telah menjadi salah satu lembaga filantropi

dan kemanusiaan Islam pioneer asal teluk dalam kegiatan sosial, dakwah dan kemanusiaan di dunia internasional.

Selain Saudi dan beberapa negara di wilayah teluk, kita juga melihat perkembangan serupa di negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Turki, Pakistan, Malaysia dan juga Indonesia. Diantara empat negara tersebut, Turki menjadi salah satu negara yang paling aktif di dunia internasional. Turki adalah negara yang berbatasan dengan Dunia Timur dan Dunia Barat sekaligus. Sebagai negara yang mewarisi semangat Kekhalifahan Utsmani, lembaga-lembaga Islam di Turki memiliki peran yang cukup luas dalam misi kemanusiaan. Salah satu organisasi filantropi Islam internasional di Turki adalah IHH (*İnsani Yardım Vakfı*) atau *İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı*, yang berarti Lembaga untuk Hak Asasi Manusia, Kebebasan dan Bantuan Bencana (*The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief*). Lembaga ini didirikan di Istanbul pada tahun 1992, dan aktif memberikan bantuan kemanusiaan di beberapa negara, di Asia, Amerika Selatan, Afrika, dan juga di Palestina. Turki sendiri setelah kejatuhan Kekhalifahan Utsmani berubah menjadi negara yang menganut ideologi sekuler. Kemal Attaturk berperan besar dalam mengenalkan dan membawa Turki yang mayoritas Muslim untuk menganut sekularisme, yaitu pemisahan yang jelas dan tegas antara urusan-urusan negara dan agama.

Indonesia sendiri memiliki daya tarik tersendiri bagi organisasi Islam transnasional yang memiliki pelbagai latar belakang orientasi keagamaan dan ideologi politik. Status Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan secara ekonomi masih dianggap sebagai negara yang berkembang di Asia Tenggara, Indonesia telah menjadi destinasi pelbagai organisasi atau lembaga bantuan internasional, baik dari Barat maupun dari Timur.²⁵ Mungkin tidak banyak orang menyadari bahwa pada awal abad ke duapuluh hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah sudah terjalin, meski kemunculannya di ruang publik secara luas semakin terasa dalam dua dasawarsa terakhir, terutama setelah bencana Tsunami menghantam Aceh, sebuah provinsi yang dijuluki “Serambi Mekah”, dan mengakibatkan puluhan ribu nyawa hilang. Lembaga-lembaga kemanusiaan dari pelbagai penjuru dunia mengantarkan bantuannya untuk masyarakat Aceh yang tertimpa musibah bencana alam ini, tak

²⁵ Lihat Hilman Latief, “Gulf Charitable Organizations in Southeast Asia,”

terkecuali lembaga-lembaga dari Timur Tengah. Kehadiran lembaga-lembaga filantropi Islam asal Timur Tengah dan juga beberapa diantaranya dari negara Barat seperti Inggris dan Amerika, telah menjadi pemain-pemain baru yang ikut mendinamiskan wacana dan praktik filantropi Islam di Indonesia.

Tentu saja masyarakat sipil Islam di Indonesia tidak hanya diwakili oleh lembaga-lembaga dengan orientasi keislaman yang progresif yang mampu mengusung tema-tema canggih dalam diskursusnya, melainkan juga organisasi-organisasi sosial keagamaan dalam bentuk yayasan-yayasan Islam yang karakternya lebih puritan. Di Indonesia, Muslim puritan atau modernis memang memiliki banyak varian-nya. Sebagian dari mereka adalah organisasi-organisasi masyarakat sipil Islam yang sudah mapan seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam, yang setidaknya telah berdiri di awal abad ke dua puluh. Muhammadiyah didirikan oleh KH Dahlan pada tahun 1912, sementara Persis oleh Kyai Zamzam pada tahun 1923. Di luar keduanya, yayasan-yayasan Islam yang relatif baru juga telah bermunculan dengan pelbagai aktivitasnya di bidang sosial dan pendidikan. Dan tidak sedikit dari yayasan-yayasan tersebut yang memiliki akses dengan yayasan yang memiliki orientasi serupa di Timur Tengah.

Saat melakukan penelitian lapangan di Banda Aceh di masa proses rekonstruksi pasca bencana Tsunami pada tahun 2008 dan 2009, penulis masih berkesempatan menyaksikan hadirnya lembaga-lembaga filantropi Islam transnasional. Salah satunya adalah IIRO (*International Islamic relief Organization*), sebuah organisasi kemanusiaan yang disponsori oleh Saudi dan juga menjadi bagian dari Rabithah Alam Islami. Selain itu, salah satu donor untuk merenovasi Masjid Baiturrahman adalah the Saudi Charity Campaign (TSCC). Seperti halnya lembaga dari Timur Tengah lainnya, TSCC berfokus pada revitalisasi tempat-tempat ibadah di Aceh, termasuk merenovasi bangunan Masjid Baiturrahman. Lembaga seperti IIRO dan TSCC, bersama lembaga-lembaga serupa lainnya, baik yang berasal dari Timur Tengah maupun dari negara Barat, melakukan aktivitas kemanusiaan dan menjalankan program rekonstruksi di beberapa wilayah yang terkena dampak Tsunami. Tidak hanya itu, di seputar Banda Aceh, organisasi-organisasi sejenis juga membukan cabangnya. Sebut saja Muslim Aiddan Islamic Relief, dua organisasi kemanusiaan Islam yang berbasis di Inggris.

Dalam menjalankan misi kemanusiaan di Aceh, lembaga-lembaga filantropi Islam internasional tersebut membangun markas di Banda Aceh dan sekitarnya dengan menyewa rumah-rumah besar yang mampu menampung logistik dalam kapasitas cukup besar untuk kegiatan kemanusiaan. Posisi-posisi strategis dalam organisasi tersebut selama masa pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana diisi oleh para professional, dan tidak sedikit dari kaum professional itu awalnya bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan dan Makasar dan lain lain, baik dalam perusahaan maupun lembaga swadaya masyarakat. Mereka kemudian bergabung dengan lembaga kemanusiaan Islam internasional di Aceh selama beberapa tahun. Beberapa staff Islamic Relief di Aceh awalnya bekerja pada perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi sosial di Jakarta dan kemudian bekerja dikontrak sebagai professional oleh lembaga kemanusiaan asal Birmingham itu untuk menjalankan program kemanusiaan.

Islamic relief memang merupakan salah satu lembaga kemanusiaan Islam terbesar di dunia yang dikelola dengan professional. Dalam sebuah kesempatan berkunjung ke markas Islamic Relief di Birmingham, Inggris, pada tahun 2010, atau setahun setelah mengunjungi cabangnya di Aceh, penulis menyadari bahwa dalam beberapa hal, Islamic Relief Worldwide (IRW) dapat diperbandingkan dengan lembaga kemanusiaan Kristen terbesar di dunia seperti World Vision. Di Birmingham, kantor IRW menempati areal yang luas, yang diperuntukkan bagi kantor dan juga menampung sebagian logistik. Ratusan pekerja di pelbagai bidang, baik komunikasi, teknologi informasi, manajer keuangan, manajer program, dan sebagainya bekerja di kantor pusatnya di Birmingham dan mengontrol program mereka di pelbagai belahan dunia, mulai dari Afrika hingga Indonesia.

Hal yang sama juga menjadi bagian dari kerja-kerja Muslim Aid. Berbasis di London-Inggris, lembaga ini menjalankan misi kemanusiaan di banyak negara dan mampu memobilisasi penggalangan dana melalui zakat dan sedekah dari kalangan Muslim serta kontribusi dari perusahaan-perusahaan. Sebagai organisasi kemanusiaan yang spesialis di lokasi bencana atau konflik, Muslim Aid juga memiliki banyak kantor cabang di negara-negara lain yang menjadi tempat bagi mereka menyalurkan dananya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Muslim aid membukakan perwakilannya di beberapa tempat, selain Aceh, yaitu Jakarta dan Yogyakarta. Setelah gempa berskala 6.9 SR

mengguncang sebagian wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, Muslim Aid menjadi salah satu lembaga kemanusiaan Islam yang aktif menjalankan misinya.

Sebagaimana dialami oleh lembaga lainnya, selepas proses tanggap darurat bencana berhenti, lembaga filantropi internasional di atas juga membuka cabang baru, utamanya di lokasi tempat terjadinya bencana. Selain di Aceh, Muslim Aid misalnya telah memiliki kantor cabang operasionalnya (*field office*) di Yogyakarta dan bekerjasama dengan Panti Asuhan Muhammadiyah Lowanu-Yogyakarta. Panti asuhan ini adalah salah satu panti asuhan tertua di Indonesia dan didirikan oleh Ahmad Dahlan pada awal tahun 1920an. Pada masa rekonstruksi gempa Yogyakarta, Muslim Aid menempati salah satu bangunan di kompleks Panti Asuhan Muhammadiyah Lowanu hasil rekonstruksi. Pada masa itu, khususnya saat penulis berkunjung kali pertama di kantor Muslim Aid Yogyakarta tahun 2008, kantor ini dipimpin oleh aktivis sosial dari Indonesia dan staff yang bekerja di tempat tersebut adalah anak-anak muda yang memiliki berbagai latar pendidikan. Pada tahun 2009, Muslim Aid Yogyakarta dipimpin oleh seorang aktivis sosial non-Muslim asal Australia yang memiliki pengalaman bekerja pada lembaga-lembaga kemanusiaan yang beroperasi di Timur Tengah.

Di luar aktivitas utamanya adalah di bidang kemanusiaan, seperti tanggap darurat bencana, kegiatan sosial lainnya mencakup kegiatan karitatif seperti kegiatan dengan panti-panti asuhan, pengembangan masyarakat, pendampingan ekonomi mikro dan sebagainya. Sebagai sebuah lembaga filantropi, Muslim Aid, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, aktif dalam kegiatan-kegiatan penyaluran dana zakat infak dan sedekah dan karena itulah warna kegiatan karitatif masih menyertai kegiatan lembaga ini. Salah satu alasan mengapa kegiatan karitatif, seperti penyantunan anak yatim, masih menjadi bagian utama dari kegiatan lembaga ini karena organisasi ini memiliki tugas menyalurkan dana yang diperoleh sesuai dengan amanah yang diterimanya. Konsep ‘amanah’ sangat penting bagi organisasi-organisasi filantropi Islam. Banyak kalangan Muslim yang menyalurkan dananya kepada lembaga filantropi Islam seperti Muslim Aid dengan tujuan khusus, yaitu menyantuni anak-anak yatim dan keluarga miskin. Karena itu, ketika organisasi ini mendapatkan anggaran dana dari Kantor Pusat mereka untuk kegiatan karitatif, sesuai dengan permohonan donator, maka penggunaan dananya harus sesuai dengan amanah yang diterima.

Antara Kegiatan Kemanusiaan dan Keagamaan

Meski merupakan organisasi keagamaan, Muslim Aid dan Islamic Relief tidak terlalu banyak terlibat dalam membantu kegiatan keagamaan di Indonesia. Pasalnya, Muslim Aid maupun Islamic Relief lebih menempatkan diri sebagai organisasi kemanusiaan, bukan organisasi keagamaan. Artinya prinsip netralitas dibangun agar kegiatan kemanusiaan dari organisasi ini tidak kental dengan masalah sektarianisme. Dalam konteks tertentu, pembangunan tempat ibadah mungkin dilakukan dalam konteks membantu memberikan fasilitas umum. Hal seperti itu pula yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan berbasis agama yang lain, khususnya yang berasal negara-negara Barat. Salah seorang staff Islamic Relief di Aceh, menjelaskan bahwa identitas “Islam” dalam Islamic Relief memang telah memberikan keuntungan tersendiri, terutama ketika beroperasi di wilayah rawan.²⁶ Dukungan masyarakat juga kuat dan karena identitas Islamnya pula organisasi filantropi internasional ini sepertinya mendapatkan semacam keistimewaan dan tidak mendapatkan banyak kecurigaan dari masyarakat. Terkait dengan pembangunan tempat ibadah, Islamic Relief mencoba menghindarinya. Hal itu dilakukan agar program-program kemanusiaan mereka tidak bias karena bantuan kemanusiaan tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan klasifikasi agama dan ras. Staff Islamic Relief itu menjelaskan, “bila kita membangun masjid, maka kosekuensinya kita pun harus membangun tempat-tempat ibadah yang lain.”²⁷

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa organisasi filantropi Islam menghindari sepenuhnya dalam memberikan dukungan kepada kegiatan sosial-keagamaan yang dilakukan organisasi maupun komunitas Muslim. Program-program yang dimiliki oleh lembaga seperti Muslim Aid dan Islamic Relief masih memiliki komitmen untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang menjadi targetnya, terutama di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagai organisasi filantropi Islam, Islamic Relief dan Muslim Aid mengandalkan sumber pendanaannya dari

²⁶ Saat sebelum bencana Tsunami terjadi di Aceh, provinsi ini masih kental diwarnai oleh konflik antara TNI4 dan Gerakan Aceh Merdeka. Karena itu, tidak banyak lembaga atau organisasi yang masuk ke wilayah-wilayah tertentu yang dianggap rawan atau tidak aman karena berada dalam kontrol GAM.

²⁷ Wawancara dengan staff Islamic Relief, Senin 24 November 2008 di Banda Aceh.

donatur yang juga mayoritas Muslim, termasuk melalui pengumpulan zakat dan infak yang dilakukan secara reguler.

Pertanyaan apakah kegiatan sosial itu merupakan kegiatan terpisah dari kegiatan dakwah adalah aspek yang penting untuk dicari jawabnya, dan elaborasi berdasarkan pengalaman lembaga-lembaga yang ada. Secara konseptual, Islam tidak banyak memisahkan antara dakwah dan sosial, meskipun tidak selalu berarti bahwa kegiatan sosial harus merupakan bagian dari dakwah dalam pengertian yang misionaristik. Tetapi kegiatan dakwah sendiri memang sangat beragam, tergantung kebutuhan masyarakat. Untuk masyarakat yang dianggap memiliki keterbatasan secara ekonomi, maka kegiatan dakwah Islam didorong untuk mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi, dan bagi kalangan keluarga miskin, dakwah Islam diproyeksikan untuk membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi keluarga miskin. Oleh karena itulah, di kalangan Muslim Indonesia berkembang istilah “kesalihan sosial”, yaitu bentuk ekspresi spiritualitas di bidang sosial atau melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.

BAB 3

LEMBAGA FILANTROPI ISLAM INTERNASIONAL PASCA BENCANA DI INDONESIA

Eksistensi lembaga filantropi Islam nasional di Aceh ditentukan tidak hanya oleh perolehan dana filantropi dari masyarakat, tetapi juga karena kerjasama pelaksanaan program-program dengan lembaga-pembaga filantropi Islam internasional yang hingga kini masih beroperasi di Aceh. Sejak tahun 2005, Aceh menjadi perlabuhan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional dari hampir seluruh Negara besar di dunia. Lembaga filantropi Islam internasional, secara khusus, juga telah menjalankan program-program tanggap darurat bencana, rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh selama bertahun-tahun di bawah kordinasi BRR.

Pada tahun 2010, kantor BRR resmi di tutup, meskipun program rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan. Beberapa LSM asing mulai mengurangi programnya dan sebagian bahkan berhenti beroperasi karena menganggap proses rekonstruksi dan rehabilitasi telah selesai. Tidak semua lembaga kemanusiaan internasional meninggalkan lokasi bencana seperti Aceh ketika kantor BRR ditutup. Sebagian organisasi kemanusiaan internasional, termasuk yang disebut dengan lembaga filantropi Islam internasional, masih beroperasi di Aceh dan pola kordinasi yang langsung dengan kementerian luar negeri maupun kementerian sosial.

Beberapa lembaga filantropi Islam internasional yang masih beroperasi setelah sepuluh tahun peristiwa bencana Tsunami antara lain Muslim Aid dan Islamic Relief keduanya dari Inggris, Aliansi OKI (OIC Allaince), Qatar Charity dan juga International Islamic Relief Organisation. Program-program kemanusiaan lembaga-lembaga tersebut terus berkurang seiring dengan selesainya program rekonstruksi dan rehabilitasi. Namun, mereka tetap menjalankan program-program yang masih dibutuhkan hingga saat ini oleh masyarakat Aceh yang terkena dampak Tsunami, antara lain kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penyantunan yatim piatu.

Dinamika Praktik Filantropi Islam di Aceh

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki keistimewaan, Nanggro Aceh Darussalam (NAD) menerapkan pelbagai kebijakan politik yang dalam beberap ahal berbeda dengan provisini atau kabupaten lain di Indonesia. Penggunaan numenkatur produk hukum, penamaan lembaga, serta penerapan hukum di Aceh memiliki kekhasan dan menjadi bagian dari kekhususan provinsi ini. Aceh menerapkan “hukum Islam” dalam bentuknya yang khas baik di bidang hukum pidana maupun perdata. Salah satu produk hukum di Aceh yang berbeda dari wilayah lain adalah dengan pembentukan Baitulmal, yaitu sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan mengelola dana zakat yang diperoleh dari masyarakat.

Peran Baitulmal di NAD semakin kuat dari waktu kewaktu, khususnya pasca Tsunami. Berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Qanun yang ada di NAD, Baitulmal memiliki otoritas untuk mengelola keseluruhan praktik zakat di NAD yang diambil dari masyarakat, terutama dari para pegawai pemerintahan dan perusahaan-perusahaan swasta. Struktur Baitulmal tidak hanya pada tingkat provinsi, tetapi juga pada tingkat Kabupaten. Baitulmal yang berada pada tingkat kabupaten bersifat otonom dan berhak menghimpun dana zakat di daerah tingkat kabupaten dan menjadikan dana zakat itu sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Sementara Baitulmal di tingkat provinsi diberikan wewenang untuk menarik dana-dana zakat dari pemerintahan tingkat provinsi. Di dalam pelaksanaannya, tugas dan wewenang antara Baitulmal di tingkat provinsi dan kabupaten tidak selalu dapat dijalankan dengan mulus. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek yang bersifat konseptual dan aspek yang bersifat manajerial.

Aspek konseptual yang dimaksud adalah terkait dengan doktrin-doktrin Islam tentang konsep zakat. Berdirinya Baitulmal di NAD memiliki konsekuensi pada model pembacaan dan pemaknaan terhadap konsep zakat, khususnya tentang zakat profesi. Sejak digulirkan pada akhir tahun 1980an, konsep zakat profesi memang telah menjadi salah topik perdebatan yang cukup panjang. Para ulama dan ormas di Indonesia tidak memiliki pandangan yang sama terhadap zakat profesi, ada yang menolaknya maupun yang menerimanya. Hal ini disebabkan oleh adanya dua model pandangan yang berbeda. Kelompok yang menerima dan melaksanakan zakat profesi umumnya berpandangan bahwa zakat dalam Islam adalah masalah ibadah yang lebih kuat dimensi muamalahnya sehingga sangat mungkin praktik zakat untuk diperbaharui dan

dimodifikasi serta dikembangkan. Konsep Zakat profesi adalah pengembangan praktis dari zakat mal untuk masyarakat modern yang secara ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertanian, melainkan perdagangan dan jasa. Sementara itu, kelompok yang menolak pada umumnya berpandangan bahwa zakat adalah sebuah bentuk praktik ibadah yang harus mendapatkan legitimasi otentik dari sumber otoritatif Islam dan tidak dapat diubah-ubah.

Di Aceh sendiri, tidak semua ulama, khususnya yang merepresentasikan ulama dayah, yang berpandangan lebih tradisional, dapat menerima konsep zakat profesi. Bahkan bisa dikatakan mayoritas ulama dayah menolak pelaksanaan zakat profesi. Tentunya, penolakan tersebut memiliki konsekuensi yang signifikan bagi perolehan zakat di berbagai daerah dimana para ulama dayah memiliki peran penting menentukan pembentukan opini dan pandangan masyarakat luas terhadap pelaksanaan zakat. Argumen yang dikemukakan para ulama dayah bermacam-macam. Diantaranya mereka berpendapat bahwa zakat profesi “tidak tertulis di dalam kitab-kitab klasik” dan “tidak pernah diajarkan oleh para guru atau ulama” sebelum mereka. Artinya, argumentasi tekstual menjadi landasan utama para ulama dayah dalam menolak praktik zakat profesi dan dengan demikian menolak pelaksanaan pemotongan penghasilan pegawai oleh Baitulmal.

Problem konseptual di atas tentu saja memiliki dampak pada kesuksesan Baitulmal dalam menggalang dana zakat. Untuk itu, pemerintah Aceh melalui Baitulmal mencoba melakukan berbagai upaya untuk “menegosiasikan” gagasan dengan ulama dayah yang pandangan-pandangannya lebih konservatif. Apalagi zakat dari masyarakat juga menjadi salah satu sumber pendapatan dayah karena banyak anggota masyarakat di pedesaan yang memberikan zakatnya kepada para ulama dayah.

Salah satunya adalah dengan meningkatkan intensitas dialog dengan para ulama Dayah. Baitulmal pernah mengumpulkan sekitar 40 ulama dayah Aceh dan mendiskusikan panjang lebar perihal pelaksanaan dan tata kelola zakat. Dalam proses “negosiasi” tersebut Baitulmal mencoba menghindari perdebatan fikih yang terlalu dalam karena dikhawatirkan hal tersebut menjadikan ulama dayah lebih sensitif dalam menanggapi pandangan Baitulmal. Baitulmal lebih fokus pada peran pemerintah sebagai “Ulil Amri” (pemimpin politik atau pemerintahan) dan kewajiban masyarakat untuk mematuhi pemimpin politik mereka. Kekuatan pendapat para ulama dayah

tidaklah sekuat Qanun. Artinya bila para ulama tidak sepakat dengan aspek fikih dari pelaksanaan zakat mereka harus tetap mematuhi dan melaksanakan pada yang sudah dirumuskan di dalam Qanun atau undang-undang yang berlaku di NAD.

Baitulmal juga tidak bersikap konfrontatif terhadap para ulama dayah. Cara yang dilakukan adalah melakukan lobi-lobi, pendekatan-pendekatan pribadi, maupun dengan menjelaskan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat bila zakat di kelola oleh ulil amri melalui Baitulmal. Hal ini nampaknya cukup berhasil, dan sebagian ulama dayah banyak yang melunak, apalagi banyak diantara mereka juga difasilitasi menjadi bagian dari Majelis Persatuan Ulama (MPU) Aceh.

Konsekuensi lain dari lahirnya Baitulmal di Aceh yang telah ditetapkan oleh Qanun adalah semakin sempitnya ruang gerak dari lembaga-lembaga amil zakat nasional non-pemerintah atau masyarakat sipil. Di dalam Qanun Aceh, keberadaan amil zakat masyarakat sipil tidaklah diakui dan karena itu keberadaan mereka masuk dalam kategori tidak sah memungut zakat. Sebab zakat hanya boleh diterima oleh lembaga resmi pemerintah. Ketika Qanun itu diberlakukan, beberapa lembaga amil zakat nasional yang beroperasi di Aceh, termasuk Dompe Dhuafa, PKPU, dan Rumah Zakat kerap menegosiasikan kepentingan mereka dengan Baitulmal agar kebijakan penghapusan peran lembaga amil zakat swasta tersebut tidak dijalankan. Dalam proses negosiasi antara Baitulmal dan lembaga amil zakat diambil langkah kompromistis yaitu bahwa lembaga amil zakat nasional tidak terlalu menonjolkan diri pemungutan zakatnya melainkan lebih fokus pada sedekah dan infak. Baitulmal berargumen bahwa hal tersebut dilakukan agar kesadaran masyarakat bahwa zakat adalah sumber PAD dapat terus tumbuh dan tidak terbingungkan oleh adanya lembaga-lembaga amil zakat swasta. Meskipun demikian, di dalam praktiknya lembaga amil zakat tetapi menerima dan mengelola dana-dana zakat dari masyarakat.

Faktor lain yang juga “melunakan” sikap Baitulmal adalah bahwa masalah sosial dan kemiskinan dalam masyarakat sangat kompleks, dan hal itu tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dengan kata lain, Baitulmal menyadari bahwa tidak semua urusan mereka dapat ditangani oleh Baitulmal, karena banyaknya keterbatasan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Baitulmal juga menyadari bahwa bahwa lembaga-lembaga filantropi Islam swasta memiliki peran

yang tidak kalah penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses negosiasi praktik filantropi Islam di Aceh terus berlangsung, antara antara Baitulmal dengan para ulama dayah, yaitu dalam meyakinkan penarikan zakat dari para pegawai atau dalam hal pelaksanaan zakat profesi. Serta negosiasi Baitulmal dengan lembaga-lembaga filantropi Islam swasta yang menjalankan programnya di Aceh. Dalam konteks ini, peraturan-peraturan yang terdapat dalam Qanun tidak dilaksanakan secara kaku oleh pemerintah di NAD selaras dengan adanya pandangan-pandangan dan lembaga-lembaga alternatif dalam merumuskan dan melakukan praktik filantropi Islam.

Lembaga Filantropi Islam Nasional di Aceh

Sebelum terjadinya bencana Tsunami di tahun 2004, Aceh telah menjadi satu target lokasi bagi lembaga-lembaga filantropi Islam nasional. Terbukti bahwa beberapa lembaga filantropi Islam nasional telah beroperasi di Aceh sebelum terjadinya bencana. Di NAD, beberapa lembaga filantropi Islam nasional seperti PKPU, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan BSMI telah beroperasi cukup lama dan bahkan hadir sebelum Qanun di NAD disahkan. Artinya, lembaga-lembaga filantropi Islam tersebut cukup “mengakar” dan mendapatkan dukungan dari kaum Muslim di NAD, baik di Banda Aceh, maupun di beberapa daerah lainnya. Ditetapkannya Qanun yang menunjukkan Baitulmal sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memungut zakat ternyata tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk menyalurkan dana zakat mereka kepada lembaga filantropi yang disebut diatas. Terbukti, hingga tahun 2015, atau hampir satu dasawarsa setelah keluarnya Qanun dan beroperasinya Baitulmal, ternyata lembaga-lembaga di atas masih berdiri dan beroperasi di Aceh.

Aceh sendiri memiliki peraturan yang khas yang berbeda dari provinsi lain, khususnya dalam menerapkan syariat Islam. Dalam kaitannya dengan dengan kegiatan filantropi, menurut Qanun Zakat di Aceh, Baitulmal menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menggalang dana zakat karena zakat dianggap sebagai bagian dari pendapatan fiskal provinsi atau kabupaten. Dalam konteks ini, Qanun tersebut dianggap akan membatasi peran-peran organisasi masyarakat sipil atau lembaga amil zakat yang berbasis masyarakat, termasuk lembaga amil zakat nasional. Karena praktik berderma

dan membayar zakat merupakan bagian dari tradisi atau kultur masyarakat, maka Qanun tidak serta merta dapat diterapkan secara efektif. Lembaga Amil zakat nasional masih beroperasi di Aceh. Oleh karena itu, upaya dialog dan negosiasi antara lembaga amil zakat nasional yang beroperasi di Aceh dan Baitil Mal terjadi.

Menurut salah seorang ketua Baitulmal Aceh di Nanggro Aceh Darussalam, Baitulmal sendiri sudah berkomunikasi dengan lembaga amil zakat nasional. Pihak Baitulmal telah mengundang lembaga amil zakat nasional yang ada di Aceh untuk berdialog dan mengkompromikan beberapa hal, salah satunya tentang penerapakan Qanun terkait dengan Zakat.²⁸ Di satu sisi pihak Baitu Mal menyadari bahwa tidak semua warga di Aceh akan menyalurkan zakatnya melalui Baitulmal. Tidak pula Baitulmal memiliki strategi yang efektif dan secara holistik dapat menggalang dana zakat dari seluruh lapisan masyarakat. Sementara di sisi lain, mereka berkewajiban mensosialisasikan dan menerapkan Qanun. Pihak Baitulmal menyadari bahwa lembaga masyarakat sipil masih memiliki peran penting dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam dialog yang dibangun antara Baitulmal dan lembaga amil zakat nasional lainnya yang ada di Aceh, disepakati bahwa adanya toleransi untuk bagi lembaga amil zakat nasional untuk melakukan kegiatan filantropi di Aceh, termasuk menggalang dana masyarakat, namun mereka membatasi penggunaan istilah zakat dalam kampanye di ruang publik. Meskipun dalam praktiknya, lembaga amil zakat nasional masih bisa menerima pembayaran zakat dari masyarakat. Lembaga amil diminta untuk menggunakan kata sedekah atau infak daripada zakat dalam promosi di ruang publik.

Lembaga Filantropi Islam Internasional dalam Kegiatan Sosial, Dakwah dan Kemanusiaan

AMCF (Asia Muslim Charity Foundation/ Yayasan Muslim Asia)

Pada 11 Januari 1992, di Jakarta didirikan Sekretariat Kerjasama PP Muhammadiyah dan Dar Al Bir Society yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan dan keagamaan di Indonesia. Kerjasama ini berkembang dengan baik dan pada 28 Juni 2002 dikukuhkan secara institusional di Jakarta menjadi Yayasan Muslim

²⁸ Wawancara dengan staff Baitulmal Mei 2015 di Baitul Mal Nanggro Aceh Darussalam.

Asia atau disebut juga Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) atau *Muassasah Muslimy Asia Al-Khairiyyah* dalam bahasa Arab. Yayasan Muslim Asia tetap bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan dan keagamaan, serta diabdikan untuk masyarakat umum. Yayasan ini telah terdaftar di Dinas Sosial Provinsi DKI dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Yayasan Muslim Asia juga telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, Departemen Sosial RI dan Departemen Agama RI. Dengan adanya rekomendasi tersebut, Yayasan Muslim Asia semakin diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu yayasan yang berperan aktif dalam pemberdayaan bagi masyarakat luas secara berkelanjutan.

Visi dan Misi AMCF

Maksud (Visi)	Menjadi membuka saluran amal dan menyediakan kesempatan bagi mereka yang ingin memenuhi tujuan dan kewajiban sosial/moral melalui organisasi ini. Saluran amal dapat dilakukan dengan menjadi sukarelawan melalui karya, ilmu, sumbangan dana, dan atau usaha atau dengan menerima amal, kontribusi atau mensponsori proyek dan program Yayasan
Tujuan (Misi)	Memberikan kontribusi bagi pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat secara efektif sebanyak mungkin. Hal ini dilakukan dengan cara yang paling efisien, terencana dan profesional.

Di tahun 2002, AMCF mendirikan kantor sendiri di Jalan Matraman, Jakarta. Alasan pendirian kantor ini karena tuntutan dari pemerintah pada waktu itu di mana setiap organisasi sosial harus mandiri. Jadi sejak berganti nama dan struktur kelembagaan menjadi AMCF, sejak itu pula lembaga ini mendirikan kantor sendiri. Selain alasan tersebut, AMCF juga merasa sulit jika terus bergabung dengan Muhammadiyah yang merupakan organisasi massa, karena bagi AMCF, posisi mereka sebagai organisasi sosial layaknya perusahaan yang secara kerja organisatoris hanya menyalurkan dana dari donatur. Sehingga alasan pendirian kantor sendiri cenderung ke alasan teknis, yaitu untuk meningkatkan efektifitas kerja lembaga. Sebagai organisasi filantropi Islam internasional telah mendapatkan pengakuan secara legal formal di tingkat lokal, Indonesia, aktivitas AMCF semakin luas. Lembaga ini memiliki cakupan kerja di beberapa bidang kegiatan, yaitu: 1) Pembangunan dan Perwakafan; 2)

Pengelola Panti Asuhan dan Kesehatan; 3) Pendidikan dan Pengajaran; 4) Pengembangan Dakwah dan Tahfiz Al-Qur'an; dan 5) Kegiatan Amal Kemanusiaan (Penanggulangan Korban Bencana Alam).

Dari ruang lingkup kerja di atas nampak bahwa AMCF yang core gerakannya pada bidang dakwah dan pendidikan juga memasukan aspek “amal kemanusiaan” atau “penanggulangan bencana” sebagai salah satu programnya. Hal itu tidak terlepas dari situasi Indonesia yang memang rawan bencana alam, dan adanya bidang kemanusiaan ini memperluas wilayah garapan AMCF dalam menjalankan misi sosial dan dakwahnya.

Program Wakaf dan Proyek Pembangunan Warga Muslim

Program pewakafan AMCF berjalan baik dan mendapat dukungan positif dari masyarakat, terbukti dari banyaknya proposal yang masuk dan banyaknya pihak yang ingin mewakafkan tanahnya kepada AMCF. Dalam hal ini, AMCF selalu bersikap hati-hati dalam menerima tanah wakaf. Hal ini dilakukan agar tanah wakaf tersebut tepat guna, tepat sasaran, dan tepat prosesnya. Peraturan dan undang-undang Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan bahwa AMCF adalah salah satu yayasan yang bisa memperoleh sertifikat tanah atas tanah-tanah yang diwakafkan kepada yayasan, dan sampai tahun 2012 AMCF telah diamanatkan untuk mengelola 26 tanah wakaf seluas 23.596 m².

Sebagian besar dari tanah wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas ibadah, diantaranya pembangunan Masjid dan Musholla, sebagian lagi untuk membangun fasilitas sosial seperti panti asuhan, fasilitas kesehatan (klinik), serta pembangunan lembaga pendidikan dan pengajaran yang bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Dalam program pewakafan, AMCF tidak meninggalkan setiap proyek-proyek yang berlokasi di tanah wakaf begitu saja, setiap pembangunan proyek yang selesai selalu dipantau dan dievaluasi apakah hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat umum. Diantara contoh yang telah dibangun ialah Masjid Ar-Rahman Fak-fak, Papua Barat; Panti Asuhan Al Kazem, Lagang, Naggroe Aceh Darussalam; Klinik Bersalin Cisanca, Garut, Jawa Barat; Tahfizh Al Qur'an Ar-Rahman, Kalimantan Tengah; Sekolah MTs Terpadu

Muhammadiyah, Pulau Arar Sorong, Papua Barat; Asrama Ma'had Utsman bin Affan, Jakarta dan banyak lainnya.

AMCF telah membangun banyak proyek sosial yang tersebar di seluruh Indonesia didasarkan pada kebutuhan setiap daerah atas luas, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan sebagainya. Dari tahun 1992, telah banyak kontrak proyek yang dilakukan AMCF dan sampai Februari 2012, telah ada 1348 proyek yang diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

Pembangunan proyek besar AMCF

No	Keterangan	Jumlah Proyek
1	Konstruksi Masjid	991
2	Konstruksi Panti Asuhan	91
3	Konstruksi Ma'had	14
4	Manajemen Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam	17
5	Asrama Tahfizh Al Qur'an	12
6	Manajemen Tahfiz Al Qur'an	23
7	Asrama Ma'had	8
8	Rumah untuk Dai/Dosen	12
9	Konstruksi Rumah Bersalin	4
10	Konstruksi Klinik dan Ambulan	23
11	Konstruksi Sekolah	16
12	Konstruksi lainnya	5
	Jumlah Proyek	1.216

Pembangunan proyek kecil AMCF

No	Keterangan	Jumlah Proyek
1	Instalasi Air	83
2	Penampungan Air Hujan	8
3	Renovasi Masjid	16
4	Pembangunan Masjid Kecil (4x4)	22
5	Perahu untuk Dakwah	3

Program Bahasa Arab dan Studi Islam

Program ini adalah salah satu yang mendapat porsi besar dalam kerjsamanya dengan Muhammadiyah melalui Perguruan Tinggi Muhammadiyah disamping juga dengan PERSIS dan beberapa Ormas Islam lainnya di Indonesia. Program ini punya tujuan menghasilkan akademisi dan praktisi dakwah yang memiliki kapasitas keilmuan dan keislaman, ahli dalam menggali serta mengembangkan nilai-nilai khasanah keislaman, terampil menerjemahkan dan berkomunikasi dalam bahasa Arab. Di

samping itu, program ini juga bertujuan untuk mencetak da'i/muballigh yang kompeten menyebarkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman serta mampu menjawab masalah-masalah keagamaan di tengah-tengah masyarakat yang makin luas dan kompleks. Lembaga pendidikan bahasa Arab dan Studi Islam ini dikenal dengan nama Ma'had. Diantara ma'had yang telah dibangun bekerjasama dengan Muhammadiyah yakni di UMY, UMS, UMJ, dan lainnya. Terkait dengan bidang pendidikan ini, AMCF telah bekerjasama dengan Unmuh Sidoarjo dan Unmuh Makasar dalam membuka program studi Al Ahwal As Syakhsiyyah berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/1874/2011 tentang izin pembukaan program studi pada perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) tahun 2011.

Program studi ini bervisi menjadi program studi terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan di bidang hukum keperdataan Islam yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernaftaskan Islam serta menjadi kekuatan penggerak masyarakat. Tahun 2003 di Ma'had Utsman bin Affan Jakarta, beroperasi juga program Tahfizh Al-Qur'an atau Qur'an Memorization School (QMS) yang bertujuan mencetak kader-kader ulama yang hafizh Al-Qur'an di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2012, AMCF telah mengelola QMS sebanyak 34 pesantren dengan jumlah santri 778 dan alumni 280 orang. Program Tahfizh Qur'an ini sebagian besarnya bekerjasama dengan PP Muhammadiyah dan sebagiannya dengan Persatuan Islam (Persis) selain juga dengan organisasi lainnya yang mempunyai kesamaan visi dan misi.

Dalam bidang sosial, AMCF bekerjasama dengan Muhammadiyah juga telah mendirikan beberapa panti asuhan sejak tahun 1992. Sampai tahun 2012, AMCF telah membangun 91 panti asuhan di seluruh Indonesia yang kemudian, sebagian besarnya diserahkan kepada Muhammadiyah yakni sebanyak 78 panti. AMCF juga memiliki program anak asuh. Program ini diarahkan pada pembinaan dalam bentuk bantuan beragam fasilitas seperti santunan bulanan, pendidikan formal dan informal baik di sekolah maupun di panti asuhan. Sampai tahun 2012, telah terdapat 2305 anak asuh AMCF dari usia SD hingga SMA yang tinggal di panti asuhan. Dalam pengembangan panti asuhan ini, AMCF sangat memperhatikan fasilitas-fasilitas yang menunjang seperti

ruang belajar bersama, fasilitas olahraga, perpustakaan, musholla, dan tentunya terkait dengan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan secara berkala, sunatan masal, dan peningkatan gizi. Demikian juga halnya dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen panti, AMCF mengadakan pelatihan bagi pengasuh panti yang fokus pada psikologi anak, metode pengajaran Islam dan Al-Qur'an serta manajemen panti. Pelatihan ini pertama kali diadakan di Yogyakarta tahun 2008. Keseriusan AMCF terkait panti asuhan ini juga dapat dilihat dari perawatan panti, termasuk perbaikan/renovasi jika terdapat kerusakan.

Program Dakwah

Program ini sudah ada sejak AMCF berdiri dan sampai saat ini dengan mengirim da'i untuk berdakwah ke seluruh pelosok Indonesia. Sampai akhir Februari 2012, telah ditempatkan sebanyak 450 da'i ke beberapa daerah. Selain itu, program dakwah ini juga berjalan setiap tahunnya di bulan Ramadhan dalam bentuk safari Ramadhan ke desa-desa. Kegiatan safari Ramadhan ini bekerjasama dengan Muhammadiyah, Persis, MUI, Depag, Pemda dan bantuan donatur baik individu maupun organisasi.

Program dakwah ini sekaligus menjadi pengabdian masyarakat bagi AMCF dan telah membantu program Departemen Agama dalam membimbing masyarakat. AMCF berupaya meluruskan akidah masyarakat sesuai Al Qur'an dan Sunnah. Berikut ini daftar persebaran da'i AMCF di setiap kabupaten/kota di Indonesia sampai tahun 2012.

No	Pulau	Total Kabupaten/Kota yang ada	Persebaran da'i AMCF
1	Sumatera	151 Kab/kota	29 kab/kota
2	Jawa	118 Kab/kota	14 kab/kota
3	Bali & Nusa Tenggara	40 Kab/kota	32 kab/kota
4	Kalimantan	55 Kab/kota	21 kab/kota
5	Sulawesi	73 Kab/kota	38 kab/kota
6	Maluku dan Maluku Utara	20 Kab/kota	17 kab/kota
7	Papua	40 Kab/kota	25 kab/kota

Saat ini AMCF sedang melaksanakan sebuah program yang disebut dengan "Kapal Dakwah" yakni program promosi dakwah di pulau-pulau terluar dan di daerah-daerah pedalaman. Program ini menggunakan kapal dan berbentuk tim. Di dalam tim

sudah lengkap dengan dokter, juru dakwah, tukang-tukang untuk pendirian masjid dan lain-lain.

Seperti halnya lembag filantropi Islam yang lain, AMCF aktif melakukan kegiatan sosial melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti menyelenggarakan acara khiutanan masal, bakti sosial, mendirikan dan mengelola panti asuhan, membangun dan mengelola pusat-pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit, poliklinik dan rumah bersalin, serta publikasi. Selain itu, dalam bidang kemanusiaan, AMCF menjadi salah satu lembaga yang menyalurkan banyak sumbangan yang diperoleh dari donator mereka untuk korban bencana, anak-anak miskin, pengangguran, dan gelandangan. Bila dibandingkan dengan lembaga kemanusiaan lainnya, baik local maupun internasional, AMCF memiliki karakter yang berbeda. AMCF bukanlah organisasi kemanusiaan yang spesialis di bidang tanggap kebencanaan, melainkan lebih berperan sebagai organisasi dakwah Islam dan sosial.

Kerjasama dengan Kelompok Islam Modernis

Sejak 2002 hingga saat ini telah banyak bentuk kerjasama yang terjalin dengan Muhammadiyah. Sebagian besarnya dalam bidang dakwah keagamaan di mana dibangun fasilitas publik seperti masjid sebanyak 1200 masjid di seluruh Indonesia, begitu juga dengan panti asuhan, poliklinik, sekolah yang telah dibangun oleh AMCF namun digunakan oleh Muhammadiyah. Dampak kerjasama dengan PP Muhammadiyah ini dapat dilihat dari berbagai program AMCF yang telah dan sedang berjalan.

AMCF menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah, Persis dan organisasi lainnya. Namun porsi kerjasama paling banyak dengan Muhammadiyah, karena hampir 80 persen program terkait dengan Muhammadiyah dari Pimpinan Pusat hingga ke daerah-daerah yang tersebar di Indonesia. Kerjasama dengan Muhammadiyah dilakukan pertama kali di Bengkulu dalam bentuk pendirian panti asuhan Muhammadiyah yang kemudian berlanjut dengan proyek-proyek lain seperti pembangunan masjid, sekolah, poliklinik, lembaga pendidikan bahasa dan banyak lagi lainnya di hampir setiap provinsi di Indonesia. Di dalam perjalanannya, AMCF sempat menjajaki kerjasama dengan NU dan Al-Irsyad, namun NU dipandang masih bergantung pada otoritas seorang kiyai. Sedangkan Al Irsyad juga dipandang masih

bergantung pada individu. Dalam hal komunikasi dipandang kurang baik, dan kerap dilanda konflik internal sehingga tidak terjalin kerjasama dengan dua ormas Islam tersebut.

Ada beberapa alasan AMCF menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah. *Pertama*, Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi modern yang rapih dalam kerja organisatoris dan secara administratif bisa dipertanggungjawaban. Hal ini misalnya terbukti dengan adanya lembaga wakaf Muhammadiyah. *Kedua*, AMCF menilai kitta Muhammadiyah sejalan dengan visi-misi AMCF, seperti menjauhi Takhayul, Bid'ah dan Churafat (TBC). *Ketiga*, Muhammadiyah dalam pandangan AMCF dianggap sebagai organisasi masa yang humanis dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini tentu dapat dilihat dari besarnya aset Muhammadiyah di bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah dari tingkat SD hingga perguruan tinggi dan di bidang kesehatan dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit dan poliklinik Muhammadiyah di berbagai tempat. *Keempat*, donatur AMCF yang berlatarbelakang seorang pebisnis yang terbiasa rapi dalam administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan turut mempengaruhi 'selera' memilih mitra kerjasama.

Secara garis besar, kesamaan visi dan misi dari organisasi domestik untuk menjadi mitra kerja AMCF menjadi pertimbangan mutlak, namun otoritas untuk menentukan kepada siapa AMCF harus bermitra sepenuhnya ada di bawah kendali donatur dari Dubai, Uni Emirat Arab. Sementara itu, kesepakatan tertulis (MoU) antara AMCF dan Muhammadiyah adalah kerjasama dalam jangka panjang hingga 2025, khususnya pada program pendidikan bahasa Arab. Prinsip utama AMCF dalam bekerjasama dengan Muhammadiyah adalah mendukung Muhammadiyah, sehingga lembaga ini tidak berkeinginan mendirikan bendera baru.²⁹ Namun AMCF menggarisbawahi soal kelangsungan kerjasama yang sangat tergantung juga dari kemampuan donatur, yang punya peran utama. Karena secara kelembagaan, AMCF tidak memiliki divisi *fundraising* yang berbeda dengan organisasi Islam internasional lainnya. AMCF juga tidak pernah meminta donatur dari pemerintah atau dari selain donatur di Dubai, sehingga prinsip kemandirian menjadi pegangan lembaga ini. Kesepakatan lain dengan Muhammadiyah yakni AMCF akan memberikan semua

²⁹ Wawancara oleh tim penelitian dengan Agus Utomo (salah satu Pembina AMCF) 19 Maret 2015.

asetnya kepada Muhammadiyah jika seandainya lembaga ini sudah tidak mampu lagi beroperasi.

Muslim Aid Indonesia

Muslim Aid didirikan di Inggris pada tahun 1985 oleh tokoh masyarakat dari 17 organisasi Islam dalam menanggapi kekeringan di Afrika. Sebagai organisasi terkemuka dan cukup mapan dalam hal amal kemanusiaan yang berpusat di Inggris dan berbasis agama, Muslim Aid beroperasi atas dasar ajaran Islam, seperti kasih sayang, empati, kemurahan hati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Hal ini dilaksanakan melalui aksi tanggap darurat dan pengentasan kemiskinan dan karenanya mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk hidup lebih bermartabat.

Visi dan Misi Muslim AID

Visi	Pengentasan kemiskinan, pendidikan untuk semua, dan untuk penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat yang membutuhkan; dalam rangka menciptakan sebuah dunia di mana amal dan kasih sayang menghasilkan keadilan, kemandirian dan pembangunan manusia.
Misi	Mengatasi kemiskinan dan segala penyebabnya dengan mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan yang memungkinkan setiap individu dan masyarakat memperoleh hidup layak dengan inisiasi-inisiasi dukungan yang dapat meningkatkan perekonomian dan keadilan sosial

Nilai yang dipegang oleh Muslim Aid adalah kasih sayang dan kepekaan terhadap kebutuhan dan kondisi orang lain; pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan potensi mereka sendiri; keadilan bagi semua dengan mempertimbangkan hak-hak orang dan memperlakukan mereka dengan bermartabat dan rasa hormat tanpa memandang latar belakang etnis mereka; juga mengedepankan akuntabilitas, baik atas tindakan sendiri maupun dengan mitra kerja mereka. Muslim Aid telah bekerja di lebih dari 70 negara di Afrika, Asia dan Eropa, Muslim Aid berusaha untuk membantu orang miskin mengatasi penderitaan yang dialami akibat bencana alam dan kurangnya kebutuhan dasar hidup. Muslim Aid bekerja dengan semua yang membutuhkan,

terlepas dari faktor ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan atau pandangan politik. Di Indonesia, kantor lapangan Muslim Aid didirikan pada tahun 2005 dalam konteks tanggap darurat pasca gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 di Aceh melalui program bersama oleh Muslim Aid UK dan Muslim Aid Australia. Sejak saat itu, Muslim Aid Indonesia telah aktif dalam memperluas kegiatannya dan mencakup wilayah di daerah lain di Indonesia untuk tanggap darurat dan program pembangunan.

Muslim Aid memberi perhatian serius pada proyek-proyek pembangunan jangka panjang untuk membangun kapasitas masyarakat lokal dalam membantu diri mereka sendiri. Cara yang paling efektif untuk tujuan ini adalah melalui pembentukan kantor lapangan di daerah krisis yang memungkinkan Muslim Aid untuk melaksanakan proyek-proyek tanpa kendala waktu. Sampai tahun 2012, Muslim Aid telah memiliki 14 kantor lapangan di seluruh dunia, yang fokus pada program-program yang berkelanjutan dan menyediakan program bantuan serta pembangunan. Di Indonesia, Muslim Aid memiliki kantor di Aceh dan Jakarta serta dua kantor sub-bidang di Yogyakarta dan Sumatera Barat. Dengan dukungan dari sekitar 50 staf Muslim Aid Indonesia. Untuk kantor di Jogjakarta, Muslim Aid resmi berdiri tanggal 21 Juli 2006, dan berlokasi di kompleks Panti Asuhan Muhammadiyah, sebagai bentuk perhatian Muslim Aid Internasional terhadap bencana. Program awal Muslim Aid di Jogjakarta adalah membangun tempat penampungan sementara dan transisi untuk masyarakat yang rumahnya hancur oleh gempa 5,9 SR pada 27 Mei 2006.

Muslim Aid pertama kali datang ke Indonesia dengan langsung terjun ke Aceh, tepat pasca bencana tsunami 2004. Muslim Aid menyadari kebutuhan akan adanya kerjasama dengan lembaga di tingkat lokal untuk dapat menjalankan program-program tanggap bencana dan pasca bencana. Oleh karena itu, sama halnya dengan organisasi kemanusiaan internasional lainnya seperti Islamic Relief, Muslim Aid menjalin kerjasamanya dengan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Hal ini tidak lain dikarenakan program-program Muslim Aid membutuhkan *sharing cost* yang lebih menguntungkan terutama tenaga ahli dalam bidang kesehatan seperti dokter, tenaga medis dan obat-obatan. Kerjasama lainnya juga dijalin dengan Dinas Kesehatan di Aceh, selain dengan Dinas Sosial dan Bapedalda khusus untuk program Climate Change. Terkait kerjasama dengan pemerintah ini, Muslim Aid berada dalam posisi menyesuaikan dengan program-program pemerintah ketimbang mengajukan program

sendiri. Oleh karena itu, sedari awal, Muslim Aid memang berkomitmen pada pendekatan berbasis kemitraan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan. Dengan bekerja melalui mitra, Muslim Aid dapat memastikan bahwa donasi yang ada dapat menjangkau mereka yang membutuhkan, daripada dihabiskan untuk administrasi.

Dalam situasi tanggap darurat, sebagaimana pada letusan gunung Merapi di Jogjakarta, Muslim Aid secara intensif juga menjalin kerjasama dengan BSMI, terutama dalam hal sumber daya manusia yang dimiliki BSMI, sementara peran Muslim Aid lebih pada fungsi donatur. Namun di tahun 2012 Muslim Aid mulai mendirikan Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia. Yayasan ini diharapkan akan melanjutkan aktivitas kemanusiaan di Aceh, dikarenakan keberadaan Muslim Aid sendiri harus berpindah kantor di Jakarta. Akan tetapi, terhadap yayasan tersebut, Muslim Aid masih menjalankan fungsi sebagai donatur meskipun untuk waktu yang tidak menentu. Yayasan ini juga diharapkan ke depannya dapat mandiri dalam operasional program, dan untuk pendanaan dapat diupayakan melalui *fund rising* atau melalui koperasi. Di samping kepindahan kantor di Jakarta karena kewajiban atas Nota Kesepahaman awal dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Sosial. Muslim Aid juga telah melirik negara-negara lain yang lebih membutuhkan, walaupun untuk tujuan itu masih bertahap. Sehingga sampai saat ini kantor di Jogjakarta dan beberapa program di Nusa Tenggara Barat masih bisa untuk dijalankan. Muslim Aid Indonesia telah aktif dalam memperluas area kerjanya meliputi daerah-daerah lain di Indonesia untuk tanggap darurat dan program-program pembangunan. Proyek-proyek Muslim Aid ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memiliki akses ke kebutuhan dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan sehingga mereka tidak permanen tergantung pada lembaga-lembaga bantuan untuk makanan dan tempat tinggal.

Dampak kerjasama pasca bencana, Muslim Aid dengan lembaga lokal

Muslim Aid dan INGO lain menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan masa kerja INGO di Indonesia. Muslim Aid sendiri berkeinginan untuk bertahan dalam kegiatan sosial, sehingga untuk itu memerlukan kesepakatan bersama dengan Kementerian Sosial guna perpanjangan keberadaan Muslim Aid per 3 tahun sampai 2017. Secara historis, kedatangan Muslim

Aid, sebagaimana dijelaskan di atas, ialah inisiatif terhadap bencana gempa dan tsunami di Aceh. Namun setelah Muslim Aid mendirikan Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia di tahun 2012, maka keberadaan Muslim Aid sendiri terpusat di kantor Jakarta. Sementara izin untuk kegiatan operasional di Aceh hanya untuk Islamic Program seperti *Orphans* atau penyantunan Anak Yatim, serta yang berhubungan dengan sedekah, termasuk aktivitas ibadah Ramadhan hingga program Zakat Fitrah. Sedangkan semua program yang berkaitan dengan kesehatan harus di bawah kontrol yayasan. Khusus untuk program Anak Yatim ini, Muslim Aid juga menerapkannya di Yogyakarta, sehingga program yang dikenal dengan Rainbow Family ini berjalan di Aceh dan Yogyakarta. Namun, program ini sebenarnya datang dari kantor pusat Jakarta. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Kementerian Sosial bagi semua INGO untuk beroperasi di Aceh. Untuk Aceh sendiri, para staf mantan Muslim Aid sebagiannya bergabung di Yayasan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Beberapa hal yang telah dikerjakan oleh Yayasan diantaranya ialah training yang bekerjasama dengan pemerintah tentang air bersih dan penggunaan MCK. Kegiatan ini dikarenakan beberapa daerah belum punya sumur. Dari pengalaman ini, Yayasan bergerak secara mandiri karena Muslim Aid saat ini dalam kondisi finansial yang terbatas untuk operasional kegiatan yang berskala besar, sehingga hanya program berskala kecil yang dapat dijalankan, dan tentunya dengan tetap mencari mitra kerja.

Namun pendirian koperasi oleh Muslim Aid sejak tahun 2014 diharapkan dapat menjadi pusat sumberdaya perekonomian Yayasan. Koperasi ini sendiri mulanya berbentuk kelompok swadaya masyarakat, yang karena melihat kebutuhan masyarakat terhadap modal di pedesaan khususnya, maka kelompok ini berubah menjadi koperasi. Meskipun sudah ada koperasi lain dalam aktivitas simpan pinjam warga, namun Muslim Aid melihat tidak ada koperasi yang dalam format pemberdayaan masyarakat dengan misi kemanusiaan. Selain tentu memainkan peran dalam membangkitkan perekonomian di Aceh. Prinsip utama dari koperasi ini adalah simpan pinjam syariah, walaupun fatwa syariah terkait dengan ini belum sepenuhnya syariah, akan tetapi diharapkan masyarakat dapat merespon positif keberadaan koperasi ini karena profit share dipandang lebih besar secara syariah.

Berkembangnya koperasi ini juga diharapkan akan menjadi penopang yayasan, karena di saat yang bersamaan popularitas lembaga keuangan Islam yang berskala

mikro, baik berbentuk Baitulmal Watamwil (BMT) atau koperasi masih jauh jika dibandingkan dengan lembaga keuangan sejenis yang dikelola oleh umat Katolik seperti Credit Union, yang terbukti mampu menjangkau masyarakat pedalaman. Sehingga Muslim Aid mewarisi Yayasan dan koperasi syariah dengan harapan program-program kemanusiaan yang sejalan dengan visi-misi Muslim Aid masih dapat terus dijalankan, meski Muslim Aid sendiri harus berkantor di Jakarta. Diantara program-program kerja Muslim Aid yang sedang berjalan saat ini adalah: Pemberdayaan Ekonomi / Penghidupan; Pengurangan Risiko Bencana dan Tanggap Darurat; Rainbow Family dan Dukungan untuk Panti Asuhan; Program Musiman; Program WASH; dan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Proyek-proyek ini memastikan bahwa setiap individu dapat memiliki akses ke kebutuhan dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan sehingga mereka tidak lagi tergantung secara permanen pada lembaga bantuan untuk makanan dan tempat tinggal.

Proyek Sosial dan Pembangunan Paskabencana di Yogyakarta

Water and Sanitation Programme

Beberapa bulan setelah gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah, banyak kerusakan yang telah diperbaiki. Pemerintah Indonesia, didukung oleh organisasi non-pemerintah internasional dan lokal, adalah tangan-tangan yang bekerja untuk membangun kembali Yogyakarta dan Jawa Tengah. Program penampungan, rumah permanen, program makanan, tenda, dan kesehatan adalah di antara program-program yang telah dilakukan. Oleh karena itu, ada satu masalah yang belum disadari oleh banyak orang, yakni sistem sanitasi rumah warga. Penduduk setempat tidak memiliki sistem sanitasi yang layak sebelum bencana; tergolong tidak sehat dan tidak ramah lingkungan. Setelah gempa, banyak bantuan datang hanya dalam bentuk perumahan dan permukiman, tanpa sistem sanitasi yang tepat untuk mendukung lingkungan yang sehat. Muslim Aid menyadari situasi ini dan meyakini bahwa sistem sanitasi yang baik merupakan elemen mendasar bagi lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, setahun peringatan gempa Yogyakarta di Dusun Karanggayam (lokasi konstruksi), Muslim Aid meluncurkan Proyek Sanitasi Air dan memanfaatkan Bio-fill, teknologi yang telah berhasil diterapkan oleh Muslim Aid untuk proyek-proyek perumahan di Nanggroe Aceh Darussalam. Peringatan ini dihadiri

oleh rekan NGO lainnya seperti dari Global Medic Kanada, World Relief, IOM, Dave Hodgkin, termasuk juga warga setempat dan relawan Muslim Aid.

Microfinance Programme

Sesuai dengan visi-misi Muslim Aid, untuk memberikan solusi berkelanjutan untuk mengatasi akar kemiskinan, Muslim Aid Indonesia melaksanakan program Keuangan Mikro. Program ini berlangsung selama dua tahun, dari 2008-2009, dengan pemberian pinjaman bebas bunga. Namun, program keuangan mikro Muslim Aid lebih dari akses ke uang dan bagaimana distribusinya, yakni bagaimana uang tersebut digunakan, diinvestasikan, dan bagaimana memberikan penerimanya visi dan peluang-peluang baru. Bersamaan dengan meningkatnya pendapatan mereka, mereka juga menerima informasi dan pelatihan tentang bagaimana mengelola uang mereka. Program Bantuan Keuangan Mikro Islam mencakup 392 keluarga yang menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Sebuah kesempatan yang disediakan bagi mereka oleh Muslim Aid untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga mereka akan menjadi mandiri.

Mobile Community Assistance Programme

Bantuan Mobile Komunitas adalah program holistik yang melibatkan intervensi di sejumlah sektor, termasuk rekonstruksi permanen, air dan sanitasi, pengurangan risiko bencana, dan mata pencaharian. Program ini disebut Bantuan Mobile Komunitas karena bergerak dari satu daerah ke daerah lain dan dilaksanakan melalui kerjasama antara IOM dan Muslim Aid. Sebuah pendekatan *bottom up* diterapkan di mana IOM dan Muslim Aid langsung mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merancang bentuk intervensi yang tepat untuk membantu mereka. Dalam kerjasamanya dengan IOM, Muslim Aid menyediakan pelatih yang berpengalaman dan ahli untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat di Yogyakarta dan Jawa Tengah tentang Gempa Desain Resistance, Manajemen Bencana, dan kesehatan (terutama pada fasilitas sanitasi air dan bangunan). Program ini juga mencakup intervensi terkait mata pencaharian melalui pelatihan skill. Sebagian besar dialokasikan untuk pelatihan konstruksi yang aman dan pelatihan manajemen bencana. Kerjasama IOM-Muslim Aid mengelola sebuah program bernama TAP (Training dan prouction Fasilitas) untuk

mengatasi masalah ini. Tujuan dari TAP adalah untuk memberikan pelatihan dan fasilitas pendidikan bagi peserta. Pelatihan ini dibagi menjadi dua bagian yakni Konstruksi Aman dan Pengurangan Risiko Bencana. Kegiatan pelatihan meliputi peserta dari masyarakat dimana IOM membangun rumah percontohan. Partisipan perempuan khususnya sangat disambut.

Rainbow Family Programme

Visi Muslim Aid untuk program Dukungan Anak adalah untuk mengembangkan/mendukung anak (miskin/yatim piatu) yang tidak memiliki kesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang alami dari unit keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam tumbuh kembang fisik, emosional & psikologis anak. Keluarga dipandang mampu menyediakan lingkungan yang aman, dan sehat untuk pertumbuhan anak. Anak-anak dipandang tidak hanya harus tercukupi makanannya, namun juga penampilan yang rapi, artinya dapat berpakaian dengan benar terutama untuk cuaca tertentu, selain tentunya tempat tinggal. Hal lain yang jauh lebih penting untuk diberikan kepada anak ialah terkait dengan pendidikan secara umum, pendidikan keagamaan, serta bimbingan rohani. Pikiran anak harus di bawah bimbingan tentang pengetahuan dan kebijaksanaan yang tepat. Pakaian, makanan, perumahan, sekolah, merupakan indikasi perawatan yang tepat bagi anak. Pendidikan dan bimbingan yang tepat jauh lebih penting untuk anak daripada makanan dan penampilan. Sejalan dengan visi, Muslim Aid melaksanakan program Rainbow Family yang memberikan manfaat kepada 35 anak yatim dan anak-anak miskin, menyediakan makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan biaya terkait lainnya. Program ini akan memberikan anak-anak miskin di seluruh Yogyakarta kesempatan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Yang pertama dan terpenting dari hak-hak ini adalah hak untuk tumbuh, dibawah pengasuh dan pendidikan yang benar. Untuk Yogyakarta, lokasi awal dari program ini di wilayah Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dengan jumlah keseluruhan anak, yakni 35 anak.

Housing Programme

Sektor perumahan adalah salah satu yang paling serius terkena dampak gempa 27 Mei 2006. Setidaknya 306.000 rumah hancur (wilayah Bantul dan Klaten) serta banyak

orang kehilangan tempat tinggal, serta banyak yang menderita trauma psikologis.

Tujuan dari program ini adalah untuk membangun rumah layak huni, aman, tahan lama dan tahan gempa, serta melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat. Prioritas utama adalah daerah yang para korbannya mendapat dukungan minimal, juga kepada keluarga termiskin di antara yang miskin, janda miskin yang mengasuh anak-anak, dan kepala rumah tangga tunggal. Tahun 2007, Muslim Aid membangun 20 rumah permanen di Bantul, Provinsi Yogyakarta untuk mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh program rekonstruksi pemerintah. Di tahun ini juga Muslim Aid membangun kembali Panti Asuhan Muhammadiyah, yang menampung lebih dari 100 anak yatim. Panti asuhan ini adalah yang tertua di Indonesia yang hancur saat gempa 27 Mei.

Shelter Programme

Gempa bumi pada 27 Mei 2006 telah mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kerusakan utama adalah di sektor perumahan. Sekitar 300.000 rumah hancur dan rusak berat. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Intensitas curah hujan yang tinggi setelah gempa memburuk kondisi pengungsi yang tinggal di tenda-tenda di atas reruntuhan rumah mereka. Muslim Aid dengan cepat merespon kebutuhan masyarakat yang terkena dampak di perumahan melalui pembangunan tempat penampungan sementara. Sebanyak 1.348 T-shelter yang dibangun selama fase darurat di bawah pendanaan dari Muslim Aid UK, Oxfam GB, IOM, dan UNDP. T-Shelter (tempat penampungan) ini tersebar di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Terbuat dari bambu dan GRC, Muslim Aid T-shelter memprioritaskan kualitas, desain lokal, dan kenyamanan penghuni. Waktu pengerjaan mulai Juni 2006 hingga Februari 2007.

Restoration of Traditional Chips Industry

Sebelum gempa 27 Mei 2006, Segoroyoso ialah desa di Yogyakarta yang terkenal sebagai pusat industri potongan kulit tradisional. Sebagian besar penduduk desa Segoroyoso bermata pencaharian pada industri ini. Terbuat dari kulit kerbau dan disebut "rambak" merupakan lauk favorit bagi sebagian besar orang Jawa. Gempa menyebabkan kerusakan besar untuk industri rumah tangga ini. Sebagian besar

bangunan tempat memasak hancur, alat-alat produksi hilang dan rusak. Hujan yang datang pasca gempa memperburuk situasi sehingga bahan baku menjadi kering tidak berguna. Total kerugian industri rambak di Desa Segoroyoso saat bencana itu hampir Rp 500.000.000. Muslim Aid, di bawah pendanaan dari United Nation Development Programme (UNDP), melakukan program mata pencaharian di desa Segoroyoso yang bertujuan untuk mengembalikan unit usaha home industri keripik tradisional. Program ini memberikan modal dan peralatan pendukung, disertai dengan pelatihan keterampilan manajemen, pelatihan keuangan, dan pelatihan masalah kebersihan. Saat ini, 23 unit usaha yang terkena dampak terburuk dari industri rambak telah berhasil pulih dan dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik dari kerupuk kulit.

Ramadan and Qurbani Programme

Melalui Ramadhan dan program Zakat Fitrah, Muslim Aid Yogyakarta memberi makanan kepada puluhan ribu orang di sekitar Jawa dan Indonesia Timur selama bulan Ramadhan 1427 H ke 1428 H. Bencana yang melanda Indonesia baru-baru ini membawa jutaan orang menjadi sangat membutuhkan beberapa bantuan. Bulan Ramadhan merupakan kesempatan bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang menderita dan kelaparan. Program ini dimaksudkan untuk membuat orang-orang yang kurang beruntung bisa merasakan sukacita Ramadhan, karena Islam mengajarkan pengikutnya untuk selalu berbagi senyum dan kebahagiaan dengan orang lain, terutama untuk hak-hak mereka yang hilang. Distribusi daging segar untuk orang-orang yang paling membutuhkan dilakukan dalam program Qurban pada hari Idul Adha UI-1427 H dan 1428 H. Program ini menasar ke daerah termiskin dalam penyediaan stok pangan untuk masyarakat. Selama dua perayaan Idul Adha, Muslim Aid berhasil membantu 2.000 keluarga miskin yang tersebar di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Emergency Response to Disasters

Dalam lima tahun terakhir, bencana besar melanda Indonesia sering menyebabkan kerusakan besar pula pada aspek fisik dan non-fisik kehidupan orang. Muslim Aid cepat menanggapi situasi dengan mendistribusikan bantuan kepada para korban bencana dalam koordinasi dengan pihak lokal, pemerintah, dan LSM mitra. Muslim Aid selalu menggunakan relawan lokal untuk membantu pelaksanaan tindakan

darurat untuk daerah setempat. Bantuan kepada para korban didasarkan pada kajian terhadap kebutuhan. Muslim Aid menghindari bantuan tumpang tindih dengan pihak lain dan mendistribusikan hal yang tidak perlu. Muslim Aid juga mendorong masyarakat untuk saling membantu untuk memulihkan serta menggunakan sisas-sisa sumber daya yang tersedia untuk membangun kembali hidup mereka. Muslim Aid membantu korban melalui distribusi pangan, program perumahan, program pemulihan mata pencaharian, dan intervensi jangka panjang lainnya seperti keuangan mikro dan pengurangan risiko bencana. Muslim Aid juga mendistribusikan air bersih, oralit, selimut, makanan pokok, dan kebutuhan darurat lainnya dalam menanggapi banjir Jakarta tahun 2007, Gempa Sumatera Barat pada tahun 2007, badai Yogyakarta pada tahun 2007, dan banjir parah menggenangi Jawa Tengah dan Jawa Timur di awal tahun 2008.

Community Based Disaster Risk Reduction Programme

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang rentan terhadap bencana, banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit, kekeringan, letusan gunung berapi, dan terorisme. Setelah serangkaian bencana yang melanda Indonesia pada tahun-tahun terakhir, banyak pihak, baik dari pemerintah dan pihak swasta, menyadari bagaimana pentingnya pendidikan Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat Indonesia. Muslim Aid menaruh perhatian tinggi terhadap masalah ini. Di bawah pendanaan dari Muslim Aid Australia dan AusAID, Muslim Aid melakukan program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat di tiga desa dan 15 sekolah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Setelah di Bantul, Muslim Aid diminta untuk melaksanakan program yang sama di 10 desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Muslim Aid menjadi keynote speaker dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh jaringan LSM lokal di Provinsi Jawa Timur. Muslim Aid berhasil memberdayakan masyarakat dengan beberapa pelatihan tentang manajemen pengurangan risiko bencana (termasuk latihan evakuasi dan pertolongan pertama), dan memfasilitasi mereka untuk merancang model manajemen bencana sendiri. Pada akhirnya, masyarakat diharapkan untuk menjadi komunitas yang sadar-siap-terampil untuk mengatasi bencana apapun.

Cheap Bricks for Earthquake Victims

Gunungkelir merupakan wilayah yang tergolong parah pada gempa 2006. Rumah dan banyak nyawa menjadi korban. Dalam fase tanggap darurat, pemerintah dan NGO beserta masyarakat memulai tahap pemulihan dengan membangun rumah permanen bagi korban gempa. Upaya membangun perumahan di waktu yang bersamaan di banyak daerah mengakibatkan kenaikan harga bahan, seperti batu bata, semen, pasir, dan sebagainya. Untuk membantu masyarakat setempat dalam penyediaan batu bata dengan kualitas tinggi dengan harga rendah, Muslim Aid melakukan Program pabrik batu bata di daerah ini. Gunungkelir sendiri telah terkenal sebagai wilayah industri batu bata untuk beberapa dekade. Sebagian besar keluarga di sana bersandar mata pencaharian mereka pada industri ini. Pabrik akhirnya menghasilkan sekitar 270.000 buah batu bata yang dijual kepada penduduk lokal dan pembeli lain dari daerah luar. Sementara program ini awalnya dimaksudkan untuk membantu orang dalam membangun rumah mereka, sekarang memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi lokal.

Semi Permanent House for Disabled People

Gempa 2006 berdampak sebagian besar pada sektor perumahan. Bencana ini juga telah meningkatkan jumlah disabilitas di Bantul dan Klaten. Banyak orang normal lumpuh tertimpa reruntuhan rumah. Muslim Aid menolong 7 orang cacat yang tidak ter-cover oleh pemerintah melalui melakukan program rumah semi permanen ini.

Meskipun awalnya bertujuan untuk membangun rumah semi permanen, beberapa rumah bisa diperluas ke rumah permanen. Selanjutnya, Muslim Aid juga membagikan hibah modal bagi mereka untuk merangsang keluarga dalam memulai kegiatan mata pencaharian mereka. Proyek ini berada di bawah pendanaan dari Dana Quake, Organisasi Australia yang diselenggarakan oleh Dave Hodgkin. Hari ini, pembangunan rumah telah selesai. Melalui program ini, Muslim Aid mengaktifkan kaum disabilitas untuk memiliki rumah yang layak di mana mereka bisa menelepon ke rumah.

T-Shelter Quality and Impact Survey

Untuk mengevaluasi dampak dari pemberian bantuan hunian sementara di seluruh daerah yang terkena dampak gempa bumi DIY dan Jawa Tengah, CHF dan

Muslim Aid melakukan survey terhadap kualitas dan dampak dari T-shelter. Survei ini mengevaluasi dampak bantuan t-shelter kepada masyarakat dalam upaya mereka untuk pulih dari bencana, dan bagaimana penyediaan t-shelter kontributif terhadap proses ini. Selain juga merupakan media untuk mengukur kualitas T-shelter yang disumbangkan oleh LSM lokal dan Internasional yang bekerja saat tanggap darurat di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hasil survei yang menjadi dokumentasi praktis terbaik dan pelajaran bagi sektor tempat tinggal dan untuk Pemerintah Indonesia di tingkat Provinsi dan nasional guna merespon bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana masa depan. Tujuan program ini adalah untuk menentukan dampak keseluruhan dari bantuan t-shelter yang disediakan oleh badan-badan internasional dan lokal serta pemerintah, dalam hubungannya dengan kualitas T-Shelter.

Hasil survei menunjukkan bahwa T-shelter Muslim Aid adalah ranking tertinggi oleh penerima manfaat dari segi desain, kualitas, dan kinerja lembaga. Sementara itu, di tahun 2015 ini, Muslim Aid Indonesia bekerjasama dengan Muslim Aid Australia, mengadakan bantuan fasilitas air bersih berupa pembangunan sumur untuk ratusan warga di Bantul, Yogyakarta. Program ini bertujuan untuk membuka akses mudah terhadap air bersih sebagai pendukung kehidupan sehari-hari. Kondisi masyarakat yang miskin menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi pembangunan fasilitas air bersih. Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Faktor penentuan lokasi diantaranya adalah tingkat kemiskinan yang tidak memungkinkan masyarakat untuk membangun sumur secara swadaya. Sementara proses dimulai sejak bulan Februari hingga Maret 2015 dengan menggunakan tenaga tukang dan pekerja lokal.

OIC Alliance

Organisasi Kerjasama Islam atau OKI (*The Organisation of Islamic Cooperation/OIC*) adalah organisasi inter-governmental terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-bangsa (*The United Nations*), yang telah memiliki anggota sebanyak 57 negara di empat benua. Organisasi ini adalah suara kolektif dari dunia Muslim yang menjamin serta memastikan untuk terus menjaga dan melindungi

kepentingan dunia Islam dalam semangat mengkampanyekan perdamaian dan harmoni internasional di antara berbagai masyarakat dunia.

Organisasi ini didirikan dalam keputusan Konferensi Tingkat Tinggi bersejarah yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada tanggal 12 Rajab 1389 Hijriah (25 September 1969) sebagai dampak dari pembakaran secara kriminal terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Tahun 1970, pertemuan perdana berlangsung dalam *International Conference of Foreign Minister* (ICFM) di Jeddah dengan keputusan untuk mendirikan sekretariat tetap di Jeddah di bawah kepemimpinan seorang Sekretaris Jenderal. Mr. Iyad Ameen Madani adalah Sekretaris Jenderal yang ke 10 di Januari 2014.

Di Indonesia, OKI masuk ke Aceh sebagai respon atas bencana gempa dan tsunami tahun 2004. Dengan nama Aliansi OKI (OIC Alliance), lembaga ini melakukan observasi dan survey terhadap dampak bencana Tsunami. Hasilnya, lembaga ini melihat tak kurang dari 5000 Anak Yatim akibat bencana tsunami tersebut. Saat itu, Direktur Eksekutif Aliansi OKI untuk Anak Korban Tsunami di Banda Aceh, Mustafa Sabri Yavuz mengatakan bahwa mereka akan mengatur program-program sosial di tiap akhir pekan untuk Anak Yatim. Aliansi OKI mempunyai tujuan untuk memelihara kurang lebih 25.000 Anak Yatim. Yavuz sendiri mengatakan "pada saat jumlahnya 5.000, Aliansi OKI mengalokasikan 24 dollar ke rekening tiap anak setiap minggu untuk kebutuhan bulanan mereka. OKI menggunakan sisa uangnya untuk kesehatan, pendidikan dan masalah sosial lainnya".

Keberadaan Kantor OIC Alliance di Banda Aceh

Izin operasional dari pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri untuk pendirian kantor OIC Alliance di Aceh diperoleh pada tahun 2006. Karena Indonesia menjadi salah satu negara anggota OKI, maka dalam pendirian kantor, OIC Alliance bekerjasama dengan pemerintah diwakili oleh Kementerian Luar Negeri tepatnya Direktorat Multilateral dan Organisasi Internasional Negara Berkembang. Tahapannya adalah, Kementerian Luar Negeri menunjuk pemerintah Aceh sebagai mitra. Dilanjutkan dengan instruksi Pemerintah Aceh kepada Dinas Sosial dalam pelaksana teknis, sehingga OIC Alliance berkoordinasi dengan Dinas Sosial khususnya Biro Keistimewaan dan kesejahteraan. Gambaran ini sekaligus menunjukkan hubungan formal antara OIC Alliance dengan pemerintah Indonesia.

Fungsi kantor OIC Alliance di Aceh saat pasca tsunami atau saat program baru berjalan, hanya sebagai pelaksana proyek sekaligus memonitoring jalannya program. Namun saat ini, kantor berfungsi sebagai supervisi, monitoring dan evaluasi ketiga lembaga mitra OIC Alliance yakni PKPU, Rumah Zakat dan BMM dalam menjalankan proyek. Jadi, ketiga lembaga mitra lokal inilah yang mengambil peran pelaksana lapangan yang dulunya dipegang langsung oleh OIC Alliance. Sehingga dengan berubah fungsi, namanya pun ikut berubah menjadi Alliance Program Supervisory Office.

Namun OIC Alliance di kantor pusat telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri tentang kesinambungan kantor di Aceh. Nota Kesepahaman ini diperbarui setiap dua tahun yang didahului dengan visitasi tim dari Kementerian Sosial, Sekretariat negara, Kementerian Luar Negeri, dan Pemerintah Aceh guna mengevaluasi keberadaan OIC Alliance. Terkait dengan ini, pemerintah pusat memang telah menghimbau kepada setiap LSM Internasional untuk hanya memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Sehingga, berbagai cara dilakukan oleh LSM internasional ini agar tetap dapat beroperasi di Aceh, seperti yang dilakukan Muslim Aid dengan mendirikan Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia dan atau Qatar 'Ain yang menjelma menjadi Yayasan Asyilah adalah contoh NGO internasional yang menjadi Yayasan lokal. Namun OIC Alliance sampai saat ini tidak memiliki rencana untuk mendirikan yayasan lokal sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa LSM tersebut.

Melihat dari proses berdirinya kantor dan proses evaluasi keberadaan kantor yang dilakukan per 2 tahun sekali itu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan koordinatif antara OIC Alliance dengan pemerintah Indonesia. Artinya, OIC Alliance sebagai NGO internasional menyadari peran dan fungsinya sebagai gerakan masyarakat sipil yang turut serta membantu kerja pemerintah terutama dalam menyantuni Anak Yatim. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, OIC Alliance kerap melaporkan segala bentuk program yang telah dijalankan dalam bentuk *Annual Report* kepada pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah atau Gubernur, Dinas Sosial, dan Bappeda. Hubungan koordinatif ini di sisi lain juga berwujud apresiasi diantara keduanya seperti ketika OIC Alliance mempunyai kegiatan tertentu akan mengundang pemerintah, begitupun sebaliknya.

Children Victim of Tsunami, Orphans dan Partnership

Keberadaan Aliansi OKI di Aceh tidak lain adalah bagian dari visi kemanusiaan OKI sendiri sehingga untuk bencana Aceh 2004, Aliansi OKI memulainya dengan deklarasi “Children Victim of Tsunami” oleh OKI di Yaman. Sehingga fokus utama OIC Alliance di Aceh adalah pada anak-anak korban Tsunami. Program kemanusiaan ini dapat dikatakan sebagai program awal OKI masuk ke Indonesia tepatnya di Aceh, dan sekaligus dijadikan sebagai *pilot project* OKI di dunia Islam. Karena itu, dalam waktu dekat akan ada program yang sama di negara-negara Muslim lain seperti di Suriah, Iraq dan sebagainya. Proses ini mulanya diinisiasi Sekjend OKI setelah kunjungan ke Aceh pasca tsunami dan bertemu dengan presiden SBY saat itu, untuk menyampaikan niat membantu anak-anak pasca bencana tsunami. Hal ini dikarenakan bantuan-bantuan lain begitu banyak masuk ke Aceh dan telah memenuhi berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur yang rusak, sanitasi dan lain-lain. Sehingga bantuan untuk anak-anak dilihat OKI belum disentuh oleh banyak NGO asing maupun lokal di Aceh. Seketika itu disepakati program Children Victim of Tsunami OIC Alliance. Pihak OIC kembali ke Saudi Arabia untuk bertemu dengan Raja Abdullah yang bersedia mendukung secara penuh sebagai donatur. Raja Abdullah sendiri adalah donatur terbesar OIC Alliance sejak 2006 dan diproyeksikan sampai 2021 dengan jaminan tersedianya dana selama durasi tahun-tahun tersebut. Inisiasi program ini secara legal formal diwujudkan di Yaman tahun 2006, pada KTT OKI.

Terkait dengan penamaan Aliansi OKI, tidak lain karena adanya kerjasama antara OIC dan IDB sebagai pelaksana, sehingga dana-dana yang ada masuk melalui IDB untuk kemudian disalurkan ke OKI. Untuk penyaluran dana sendiri melibatkan tiga lembaga nasional yakni PKPU, Rumah Zakat dan BMM (Baitulmal Muamalat, anak perusahaan Bank Muamalat). Sedangkan fungsi kantor OIC Alliance di Aceh di saat pasca bencana adalah sebagai pelaksana proyek sekaligus menjalankan fungsi monitoring terhadap jalannya program. Namun saat ini, kantor berfungsi sebagai supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap ketiga lembaga mitra dalam menjalankan proyek. Jadi, pasca tsunami, OIC Alliance bertindak langsung sebagai pelaksana, akan tetapi saat ini, ketiga lembaga mitra lokal tersebut yang mengambil peran pelaksana

lapangan. Sehingga dengan berubah fungsi, namanya pun ikut berubah menjadi Alliance Program Supervisory Office.

Setelah program Yatim Tsunami diluncurkan, dalam pelaksanaannya justru yatim karena konflik melebihi jumlah yatim karena tsunami. Karena itu, berdasarkan permintaan dari pemerintah Aceh untuk menangani semua Anak Yatim maka OIC Alliance tidak lagi hanya menangani Anak Yatim tsunami melainkan ketiga kategori yatim tersebut yakni yatim tsunami, yatim konflik dan yatim normal. Dapat dikatakan momentum kerja OIC Alliance adalah peristiwa tsunami dengan mengambil fokus pada Anak Yatim. Berkaitan dengan data statistik jumlah Anak Yatim, OIC Alliance merujuk pada data yang diterbitkan oleh pemerintah Aceh pada periode Gubernur Mustofa Abu Bakar, ditopang dengan registrasi lapangan oleh tim OIC Alliance guna memverifikasi data pemerintah tersebut. Setelah melalui tahap tersebut, implementasi program dijalankan di awal tahun 2007, meskipun embrio kegiatan ini telah dimulai sejak 2006. Sampai saat ini, Aliansi OKI telah membantu kurang lebih 13.000-14.000 anak yatim. Sedangkan yang masih aktif dalam program bantuan Anak Yatim ini sejumlah 5300 anak. Bantuan diantaranya berbentuk beasiswa.

Program Anak Yatim ini pada prinsipnya dirancang secara teliti berdasarkan kombinasi dari pengalaman besar program penyantunan yatim di Eropa dan Dunia Arab. Dunia Barat dikenal memiliki pengalaman membantu anak yatim dengan asisten mereka (orangtua asuh). Dari hasil kajian terhadap pengalaman Eropa/Barat dan Dunia Arab ini, lahirlah model proyek dalam membantu anak-anak yatim yang masih tinggal sama orangtua atau keluarganya. Jadi, OIC Alliance bukan bermaksud memisahkan Anak Yatim dengan keluarganya, karena meyakini bahwa akan berbeda antara anak yang tumbuh dan kembang di panti dengan yang tumbuh bersama keluarganya.

Dari 5300 anak yatim yang masih aktif di bantu sampai sat ini, sebagian besar masih dibawah asuhan keluarga dan sebagian lainnya di pesantren karena dimasukkan oleh pihak keluarganya, dengan catatan masih tetap dalam asuhan keluarga. Prinsip pola asuh ini menjadikan program penyantunan Anak Yatim OKI berbeda dengan program yang sama yang dijalankan oleh lembaga lainnya, termasuk NGO asing seperti Muslim Aid dan Qatar Charity. Hal lain yang membedakan dengan program yang sama di lembaga lain adalah, adanya program pembinaan, selain bantuan bulanan secara langsung ke rekening mereka. Pembinaan dan bimbingan terhadap Anak Yatim ini

dilakukan oleh tutor (pembimbing/pembina), dengan rincian setiap tutor membina dan membimbing sekitar 150 anak. Syarat utama menjadi tutor dalam program Anak Yatim OKI ini adalah telah mengikuti pelatihan, pembinaan, latar belakang pendidikan yang mumpuni serta memiliki jiwa kepedulian sosial yang tinggi. Prasyarat ini tidak lain agar tujuan dari program ini dapat tercapai.

Secara personal, tutor-tutor ini sebagian besarnya direkrut dari lembaga mitra lokal seperti BMM, PKPU dan Rumah Zakat. Ketiga lembaga ini juga dikenal telah memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam aktivitas kemanusiaan, meskipun masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Bentuk bimbingan terhadap Anak Yatim sendiri secara langsung dilakukan tutor dengan mengunjungi sekolah maupun rumah, membantu anak dalam aktivitas sosial, mengarahkan anak ke rumah sakit jika sedang sakit, termasuk memotivasi dalam berprestasi. Proyek ini kemudian dikenal dengan nama Project Implementation Alliance (PIA) di mana OIC Alliance meminta ketiga lembaga tersebut sebagai pelaksana. Aliansi OKI, oleh karenanya tidak berpretensi mendirikan panti asuhan.

Perbedaan metode penyantunan Anak Yatim dari OKI misalnya juga dapat dilihat dari lembaga lain yang membina Anak Yatim khusus bagi yang tinggal di pesantren sehingga dana disalurkan ke pesantren. Dengan metode ini, pembinaan terhadap anak diserahkan ke pesantren. Metode lainnya dengan menyerahkan bantuan melalui Dinas Sosial atau Pemerintah, tanpa pembinaan secara personal ke Anak Yatim. Artinya, kematangan konsep pembinaan dan upaya-upaya penyantunan Anak Yatim oleh tim ahli OKI membuat program Anak Yatim OKI berbeda dari segi karakteristik dan metode kerjanya.

Mekanisme penyaluran bantuan yakni kewajiban setiap anak untuk mempunyai rekening terlebih dahulu, sehingga dana ditransfer langsung, bukan diserahkan ke keluarga. Syarat pembuatan rekening sendiri harus ditandatangani oleh anak dan walinya. Sehingga dalam pengambilan dan penggunaan uang bisa tetap diawasi. Wali dan anak juga tidak dapat mengambil uang sendiri. Peraturan ini dalam perkembangannya tidak begitu ketat semenjak beralih ke penggunaan ATM. Manfaat dari mekanisme semacam ini sekaligus mengedukasi anak-anak untuk lebih terbiasa menggunakan fasilitas perbankan.

Program Anak Yatim OKI sejak awal terbagi menjadi 3 yakni pendidikan, kesehatan dan training dengan target Anak Yatim mampu hidup mandiri di kemudian hari. Oleh karenanya, secara usia, Anak Yatim dibina dan disantuni mulai dari kecil sampai berusia 18 tahun atau telah duduk di bangku kelas 3 SMA. Dan secara karakteristik program ini dapat dikatakan berbentuk beasiswa (*scholarship*) karena sifat bantuan yang diterima Anak Yatim kemudian dibagi-bagi dengan rincian misalnya, 24 dollar ditransfer ke rekening anak, 2 dollar untuk pembinaan, supervisi dan monitoring, 2 dollar untuk pendidikan mencakup seragam sekolah, tas, buku dan 1 dollar untuk kesehatan mencakup *medical check-up*, pengobatan, dan 1 dollar untuk profesional training. Sehingga totalnya 30 dollar per anak. Kemungkinan besarnya jumlah bantuan ini akan naik berdasarkan inflasi harga-harga di pasaran. Program ini dirancang agar terpenuhinya semua unsur dalam kehidupan Anak Yatim dengan tujuan akhir agar mereka dapat mandiri.

Donatur OIC Alliance terdiri dari berbagai pihak, mulai dari individu, lembaga, negara dan lain-lain yang dalam menjalin kerjasamanya langsung di bawah kendali OIC dengan menunjuk IDB sebagai pemegang dan pengelola uang. Sementara donatur dari dalam negeri dapat melalui kontrak kerjasama lebih dulu dengan OIC di kantor pusat Jakarta, karena di Aceh fungsi kantor hanya sebagai pelaksana (*field office*). Dalam pengalaman lapangan terkait donatur perorangan, ada yang bersedia menangani satu anak hingga berusia 15 tahun.

Sementara kendala dalam realisasi program Anak Yatim ini cenderung pada tumpang tindihnya (*overlapping*) bantuan dengan NGO lain. Karena hampir setiap NGO asing khususnya memiliki program Anak Yatim, sebut saja Qatar Charity, Muslim Aid, Islamic Relief, Rumah Yatim, PKPU, Rumah Zakat dan International Islamic Relief yang fokus ke Anak Yatim di pesantren dan Qatar Syech 'Ain yang sekarang menjadi Yayasan Asyilah juga bergerak di Anak Yatim. Untuk mengatasi masalah ini, OIC Alliance membentuk forum diskusi Anak Yatim.

Kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Lokal

Bila dicermati, pola yang dilakukan oleh OIC Alliance dalam menjalankan misi sosial dan kemanusiaannya adalah dengan menggandeng mitra lokal, yaitu lembaga-lembaga ilantropi atau kemanusiaan Islam yang cukup kuat dan dipandang cakap serta

dipercaya untuk menjalankan misi OIC Alliance. Sebagaimana digambarkan sebelumnya, OIC Alliance telah menggandeng mitra lembaga-lembaga seperti PKPU, BSMI, atau Rumah Zakat. Di Indonesia sendiri, lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga kemanusiaan yang cukup dikenal oleh public, setidaknya dalam 15 tahun terakhir.

Sebagai organisasi yang merupakan bentukan lembaga internasional yaitu OKI, OIC Alliance di Aceh melihat bahwa membangun kemitraan dengan pemerintah Indonesia atau di lokasi mereka beroperasi adalah sangat penting. IDB (Islamic Development Bank) sebagai salah satu induk atau mitra utama OIC, kerap aktif menyalurkan bantuan, dan bahkan melakukan monitoring terhadap keberadaan OIC Alliance. Bahkan Presiden IDB secara khusus sempat “turun gunung” untuk melihat peran OIC Alliance dalam program Kafalah Yatim di Banda Aceh pada tahun 2014. Selain itu, OIC Alliance bersama IDB, dengan akses yang dimilikinya memberangkatkan puluhan anak yatim untuk melaksanakan ibadah haji dan secara khusus diundang oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz.

Qatar Charity Indonesia

Qatar Charity (QC) adalah organisasi non pemerintah, didirikan pada tahun 1984 untuk pengembangan masyarakat Qatar dan kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu juga untuk melayani setiap orang tanpa memandang warna kulit, agama, ras maupun kebangsaannya. QC beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia dan kegiatannya meliputi beberapa negara Asia, Eropa dan Afrika. Di Indonesia, QC memulai partisipasinya selama proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca Tsunami pada tahun 2005. Dengan demikian, QC mendirikan kantor pertama di Indonesia yang ada di Aceh. Kantor pertama ini kemudian diakui sebagai QC Indonesia cabang Aceh. Tanggal 18 Mei 2006, penandatanganan MoU antara QC dan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Agama yang mengatakan bahwa pendirian kantor di Jakarta sebagai pusat kegiatan QC di Indonesia. Pada tanggal 6 Juli 2009, QC dan Departemen Agama Indonesia memperbaharui MoU selama 5 tahun ke depan. Setelah kerusakan besar akibat gempa di bagian barat Sumatera pada 30 September 2009, QC mendirikan kantor cabang Sumatera Barat di Padang Pariaman.

Visi dan Misi Qatar Charity

Visi	Menjadi model lembaga Islam perintis yang menggabungkan orisinalitas, kreativitas dan profesionalisme di bidang pembangunan dan bantuan kemanusiaan.
Misi	Bekerja sama dengan partner pengembangan, QC menyokong kemampuan kelompok miskin demi memenuhi martabat manusia dan keadilan sosial”.
Nilai Filosofis	Kemanusiaan, Anti-diskriminasi, Kenetralan, Independensi, profesionalisme, dan kerjasama.

QC telah berkomitmen untuk fokus pada urusan kemanusiaan, sehingga menganggap segala tantangan adalah stimulus untuk memperbaiki strategi dalam menerapkan program. QC menjalankan program dengan memadukan profesionalisme, keluwesan dan pendekatan partisipatif, dan terus mengembangkan kemampuan belajar di bidang apa pun yang dimasuki. Karenanya, dalam menjalankan segala proyek, QC selalu mencari partisipasi dan kerja sama dari masyarakat. Semua langkah yang diambil dalam melaksanakan sebuah proyek akan terus direncanakan dan dikonsolidasikan dengan pemerintah dan rekanan (mitra). Pendekatan serupa juga diterapkan dalam mengelola hubungan dengan para penerima manfaat. Kerja sama dan partisipasi dengan para aktivis kemanusiaan adalah cara QC dalam mensinergikan upaya dan memberi layanan terbaik bagi masyarakat. QC bekerja sama dengan NGO lain untuk menciptakan dunia yang lebih baik karena QC meyakini bahwa manusia harus “tolong-menolong dalam kebajikan”. Di Indonesia, QC merealisasikan program-programnya sejak tahun 2003 melalui kerjasama dan rekanan dengan organisasi lokal. Kantor pertamanya di Indonesia dibangun di Aceh menyusul bencana Tsunami pada 26 Desember 2004 yang menyebabkan kehancuran infrastruktur dan komunitas. Kantor pertama ini kemudian dinyatakan sebagai kantor QC cabang Aceh. Pada 18 Mei 2006, QC menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Kementerian Agama dan mendirikan kantornya di Jakarta. Kantor ini menjadi pusat semua kegiatan QC di Indonesia.

Dari catatan sejarah, QC memang mulanya ada di Aceh sebelum akhirnya pindah ke Jakarta sebagai kantor pusat. Bencana tsunami menjadi pintu masuk bagi QC tepatnya di bulan Mei 2005, menjalin kerjasama pertama kali dengan Komite Kemanusiaan Indonesia (KKI) atau dapat juga dikatakan KKI yang menggandeng QC

untuk datang ke Aceh. KKI sendiri dipimpin oleh seorang politisi senior dari PKS, yaitu Suropto. Sebagai politisi, Suropto sangat aktif dalam misi kemanusiaan, baik melalui bendera KKI maupun sebagai kordinator pengiriman bantuan ke Palestina melalui KNRP (Komite Nasional untuk Rakyat Palestina). Kerjasama dengan KKI sebelum peristiwa tsunami dan berdirinya telah berjalan dalam program Anak Yatim (*orphans*) yang diajukan langsung ke kantor pusat di Doha Qatar, dalam rangka mencari orangtua asuh. Program ini terus berjalan sampai pendirian kantor. Pendirian kantor QC ini telah dimulai sejak bulan Agustus 2005, namun di bulan November 2005 kantor beroperasi. Perlu dicatat bahwa sebetulnya QC sudah hadir di Indoensia sebelum terjadinya bencana Tunami Aceh. Di Jawa Barat, QC sudah menjalin kerjasama dengan lembaga Islam di Indonesia, yaitu di Jawa Barat, melalui yayasan As-Syifa al-Khairiyah yang berlokasi di Subang, Jawa Barat jauh sebelum adanya bencana Tusnami.

Terkait dengan persoalan pendirian kantor ini, QC pada prinsipnya memandang sumber daya manusia yang ada di Indonesia cukup mampu untuk menjalankan aktivitas lembaga seperti pendidikan, sehingga QC tidak harus terjun langsung mengelola lembaga atau yayasan lokal. Sehingga QC mempercayai Yayasan lokal untuk mengorganisir diri dan menjalankan aktivitas filantropinya seperti pendidikan, dan QC hanya mendukung dalam hal pendanaan misalnya ketika Yayasan memerlukan Islamic Centre, pesantren atau masjid. Prinsip QC ini berbeda ketika bergerak di negara lain seperti di negara-negara Afrika, di mana sumberdaya manusianya (*human resources*) dipandang kurang memadai sehingga harus terjun langsung mengelola dan menjalankan program seperti membuat lembaga pendidikan. Di Indonesia, QC hanya mendirikan kantor di Banda Aceh, meski di Padang Sumatera Barat juga sempat berdiri namun pasca gempa, kantor QC pun tutup. Sementara di daerah-daerah lain, QC sebagian besar hanya menjalankan proyek-proyek yang sebagian besar itu ada di pulau Jawa. Bantuan-bantuan dari QC itu sendiri cenderung menysar ke sekolah-sekolah dalam bentuk bangunan dan bukan dalam bentuk uang. Dalam proses pembangunan ruang-ruang publik ini, QC bergerak langsung ke kontraktor ketika ada proyek pembangunan gedung seperti sekolah, masjid atau pesantren.

Program Fisik dan Non Fisik QC

Dalam proses rekonstruksi di lokasi-lokasi bencana, termasuk Aceh, QC memiliki dua program yaitu fisik (berupa pembangunan fasilitas publik, bangunan sekolah) dan non-fisik (beasiswa untuk S1, S2, dan s3). Tercatat bahwa Sejak beroperasi di Indonesia pada tahun 2003 hingga akhir tahun 2008 QC telah membangun, 465 masjid, 1 klinik, 878 sumur, dan 5 sekolah, 41 kompleks serbaguna umumnya terdiri atas masjid, sekolah, ruang administrasi dan klinik). Sebuah kompleks pendidikan terpadu (terdiri atas sekolah, masjid, klinik, asrama, kantin, ruang serbaguna, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, taman bermain & tempat parkir). Rinciannya sebagai berikut: 176 rumah permanen tipe 40; 100 rumah permanen tipe 45; 14 rumah permanen tipe 50; 3 rumah permanen lainnya; dan 5 toko. Dalam hal ini, QC tidak memberikan bantuan berupa uang tunai, tetapi langsung membangun bangunan yang diperlukan. Dalam prosesnya, QC memberikan penawaran kepada beberapa kontraktor untuk menjalankan tugas pembangunan. Bila sudah disepakati, kemudian proses pembangunan dijalankan sesuai dengan standar QC, dan sementara QC sendiri bertugas langsung melakukan pengawasan. Proses pengawasan dilakukan langsung oleh QC dalam rangka menjaga akuntabilitas dan menjaga kualitas bangunan yang akan didirikan, serta pelaporannya bisa langsung dilakukan. Dengan kata lain, pemberian bantuan uang tunai memiliki banyak risiko dibanding langsung dalam bentuk bangunan.³⁰

Sementara itu untuk kegiatan non-fisik QC lebih fokus pada pengiatan sumber daya manusia melalui penyediaan beasiswa. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan, dan bentuk beasiswa bersifat parsial atau tidak penuh. Pada umumnya, beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berlokasi dimana Kantor QC berada. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif atau sudah terdaftar di sebuah perguruan tinggi. Lamanya beasiswa tergantung kepada kepada donaturnya, namun pada umumnya diberikan sampai selesai. Donatur QC bentuknya bermacam-macam, yaitu bisa individu, keluarga atau perusahaan. QC memberikan keterikatan erat dengan donaturnya yang berada di Timur Tengah. Pasalnya program yang dijalankan program QC cukup lama, dan donatur memberikan dananya baik perbulan maupun pertahun. Aspek yang menarik dari karakteristik donatur ini adalah bahwa mereka memiliki

³⁰ Wawancara dengan Muhammad Idharsyah, Aceh Office Coordinator, Indonesia Office, 22 Mei 2015 di Banda Aceh.

otoritas untuk melanjutkan atau menghentikan sumbangannya kepada program yang dijalankan oleh QC, meskipun donatur tidak berhubungan langsung dengan penerima bantuan, misalnya bantuan untuk sekolah anak yatim atau kuliah bagi mahasiswa. Salah program yang dijalankan oleh QC adalah “In-Need Smart Student Support”. Program ini bertujuan mendukung para siswa pintar yang kesulitan biaya. Aktivitas program ini berupa pemberian beasiswa dalam bentuk pembayaran uang kuliah/sekolah dan biaya operasional pendidikan lainnya. Program ini telah terselenggara atas kerja sama dengan beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Lebih dari 800 siswa telah mendapat manfaat program ini: Universitas Indonesia (Depok, Jawa Barat) sebanyak 200 siswa; Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) sebanyak 300 siswa; Universitas Syiah Kuala (Banda Aceh, NAD) sebanyak 26 siswa; IAIN Ar-Raniry (Banda Aceh, NAD) sebanyak 95 siswa; Universitas Islam Negeri Malang (Malang, Jawa Timur) sebanyak 13 siswa; dan Ratusan siswa dari lain-lain universitas di NAD dan Jawa.

Pasca 10 tahun tsunami Aceh, QC saat ini menaruh perhatian pada pemberdayaan ekonomi dan *capacity building* termasuk penyantunan anak yatim, khususnya terkait akses ke pendidikan. Untuk pemberdayaan ekonomi, wujudnya tidak lain semacam bantuan modal awal kepada Usaha Kecil, becak, dan usaha-usaha lainnya. Khusus untuk becak dan micro trading ini, QC sempat menjalin kerjasama dengan PKPU. Sementara calon penerima bantuan telah melalui proses seleksi terlebih dahulu agar tepat sasaran. Dalam waktu tiga tahun terakhir, ruang lingkup usaha yang dibantu kemudian hanya pada usaha mesin jahit untuk ibu-ibu janda, peternakan sapi dan becak barang serta diproyeksikan menyentuh bidang pertanian. QC memfokuskan wilayah kerjanya hanya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Terkait dengan jalannya program Muhammad Idharsyah, Aceh Office Coordinator, menjelaskan bahwa tidak semua program peningkatan ekonomi itu berjalan seperti yang diharapkan, hal itu disebabkan beberapa hal:

1. Sumberdaya manusia. QC yang berada di Aceh memiliki keterbatasan jumlah SDM yang dapat menangani secara langsung kegiatan pendampingan ekonomi.
2. Komitmen penerima manfaat yang lemah. Banyak penerima manfaat yang kurang serius dalam menjalankan programnya. Bantuan dalam bentuk becak

misalnya, malah dibawa keluar kota. Atau bila itu bersifat individu, penerima manfaat banyak yang lebih bersifat konsumtif.

Muhammad Idharsyah juga menegaskan bedanya antara NGO dari barat dengan NGO dari “Arab” seperti QC ini. Menurutnya, bekerja di NGO Arab tugas banyak dan sering rangkap-rangkap, dan karena itu program yang sifatnya jangka panjang atau melibatkan banyak orang, sering kurang mendapatkan pengawasan dan evaluasi yang memadai. Di Kantor QC sendiri terdapat 3 orang staff yang masing-masing memiliki tugas untuk menjalankan program.

Kafalah: Anak Yatim

QC memandang Anak Yatim sebagai fokus utama dari setiap agenda QC, yang telah dijalankan di Pakistan dan negara-negara konflik lainnya. Sedangkan di Aceh, QC memfokuskan program Anak Yatim pada korban tsunami, dengan sistem pengajuan Anak Yatim dan mencari orangtua asuh. Namun kategorisasi Anak Yatim sampai saat ini tidak lagi berdasarkan karena faktor bencana tsunami. Faktor apapun termasuk karena sakit, dan karena konflik telah menjadi bagian Anak Yatim secara keseluruhan. Kategori usia Anak Yatim yakni di bawah 14 tahun. Sedangkan mekanismenya adalah ketika telah disponsori oleh orangtua asuh, maka Anak Yatim dapat disekolahkan sampai berusia 18 tahun. Sifat bantuan adalah bulanan dan dibayar per triwulan. Santunan tambahan disesuaikan dengan kebutuhan Anak Yatim. Tiap tahunnya selalu ada laporan tahunan termasuk jika si Anak hendak mengirim surat ke donaturnya berkaitan dengan, misalnya kebutuhan pribadi si Anak. Peran lembaga ketika si Anak mengirim surat itu adalah mentranskrip surat anak yatim agar segala keinginan si Anak dapat dipenuhi. Di Aceh, fokus wilayah QC terhadap program Anak Yatim hanya di Banda Aceh dan Aceh Besar, meski sempat di Pidi dan Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Langsa. Namun tahun ini (2015) fokus di Aceh Besar. Sistem pengajuan Anak Yatim datang dari masyarakat setelah melalui survey oleh QC yang menyangkut tempat tinggal, kondisi keuangan, ibunya masih janda atau yatim piatu. Dalam praktik di lapangan, keluarga Anak-anak Yatim ada yang langsung mengajukan atau melalui perantara kepala desa, namun tidak jarang melalui ‘jemput bola’.

Program Anak Yatim ini memang menjadi bagian dari program di setiap NGO aing yang ada di Aceh, sehingga dalam pelaksanaannya sempat terjadi tumpang tindih

(*overlapping*) bantuan dengan NGO lain. Upaya untuk meminimalisir tumpang tindihnya bantuan baik dengan NGO lain maupun dengan pemerintah ialah dengan buku Bank Aceh, karena dari sistem rekening Bank ini, setiap anak akan dapat dikenali melalui buku Bank yang dimiliki. Seperti OKI dan Muslim Aid misalnya, menggunakan Bank Syariah Mandiri dan di dalam buku Bank ini selalu menyelipkan kode lembaga di ujung nama si Anak. Sementara tentang jumlah bantuan, rata-rata bantuan sosial QC untuk Anak Yatim sebesar 200 riyald per bulan atau setara kurang lebih 60 dollar. QC, karena itu termasuk yang tertinggi per bulan untuk besaran biaya santunan Anak Yatimnya. Karena itu, banyak terjadi kasus, anak-anak yang telah mendaftar ke program Anak Yatim OKI misalnya, pindah ke QC. Selama 10 tahun terakhir, Anak Yatim yang sedang ditangani oleh QC sebanyak 950-an Anak, sedangkan untuk yang telah selesai disantuni sebanyak kurang lebih 500 anak. QC sengaja memberi bantuan kepada Anak Yatim di luar panti asuhan, karena dianggap jarang mendapatkan bantuan ketimbang yang ada di panti, yang justru telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Pada saat awal peristiwa tsunami, QC sempat menangani Anak Yatim yang tinggal di panti atau pesantren sebanyak kurang lebih 200 orang.

Penyantunan Anak Yatim sendiri sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat hingga daerah. QC sebagai NGO terbukti telah membantu kerja pemerintah dalam menyantuni ribuan Anak Yatim di Aceh dan pemerintah cukup responsif dengan kerja NGO Asing seperti QC ini. Hal ini terbukti dengan adanya kerjasama QC dengan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri untuk keberadaan kantor di Aceh yang dapat diperpanjang per 3 tahun. Pemerintah dalam hal ini, kerap melakukan observasi lapangan diwakili Kementerian Agama untuk memantau lokasi bantuan serta bagaimana dampak bantuan itu. Hasil observasi lapangan oleh pemerintah ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperpanjang izin operasional QC di Aceh. Sampai saat ini, penilaian pemerintah terhadap QC terbukti sangat bagus karena misalnya, melihat bangunan fisik yang dikerjakan oleh QC lebih bagus dari pemerintah. Sehingga tidak ditemui banyak kendala dengan pemerintah karena apresiasi langsung dari pemerintah melihat kerja-kerja QC di Aceh. QC sendiri telah menunjuk Hidayat Nur Wahid menjadi duta QC di Indonesia. Hidayat Nur Wahid sendiri adalah mantan ketua Umum Partai Keadilan

Sejahtera. Meski demikian, hubungan dengan pemerintah menuntut QC untuk menjaganya termasuk dengan mengikuti larangan-larangan dari pemerintah seperti tidak terlibat di partai politik. Selain juga tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat memecah belah masyarakat seperti soal perbedaan mazhab Salafi. Hal ini tidak lain dari pengalaman di lapangan kerap menemukan beberapa NGO cenderung fokus pada mazhab-mazhab tertentu.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan kewajibannya terhadap Anak Yatim dengan menyantuni setiap anak per-tahunnya sebesar 1,8 juta rupiah. Komitmen pemerintah ini disalurkan dalam bentuk subsidi yang disalurkan melalui sekolah-sekolah. Namun dalam praktik di lapangan, pemerintah kerap menemui penyalahgunaan bantuan. Oleh karenanya, kerjasama pemerintah dan NGO dipandang akan membantu efisiensi bantuan tepat sasaran ke Anak Yatim. Sebagai catatan, secara keseluruhan jumlah Anak Yatim di Aceh mencapai puluhan ribu Anak. Sebagaimana target OKI yang ingin menyantuni sebanyak 25 ribu anak yatim. Program Anak Yatim ini diprediksi akan berdurasi jangka panjang baik dari pemerintah maupun NGO asing seperti QC, karena sampai saat ini tahun 2015, masih berlangsung proses pendaftaran baru untuk Anak Yatim. Namun sekali lagi, QC di Aceh sangat bergantung pada kebijakan dari kantor pusat.

Kerjasama dengan Lembaga Lokal Paska Bencana

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bencana menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin kuatnya partisipasi lembaga filantropi Islam menjalankan misi kemanusiaannya. Dalam kerja-kerja sosialnya, mereka kerap menggandeng mitra yang berasal dari lembaga Islam atau lembaga filantropi Islam yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Dalam konteks tertentu, mereka juga dapat bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan yang berbasis non-agama. Berikut ini adalah beberapa peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia dimana QC menggandeng mitra local.

- Gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter menghantam Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 May 2006 dan menewaskan ribuan orang serta membuat puluhan ribu lainnya terluka. Gempa tersebut juga menghancurkan ratusan ribu bangunan. Bekerja sama dengan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat), LIFE (Organisasi Muslim untuk Bantuan dan Pengembangan yang berbasis di Amerika), dan BSMI

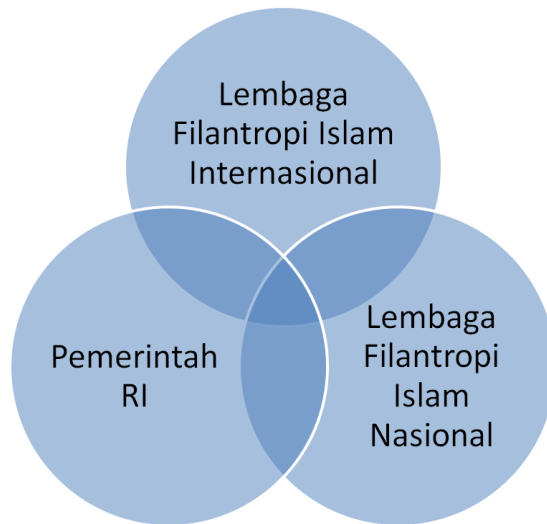
(Bulan Sabit Merah Indonesia), QC berupaya meringankan penderitaan puluhan ribu korban dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk tenda, kasur, makanan, obat-obatan, sarung, dan alat-alat kebersihan.

- Bencana yang menenggelamkan Jakarta pada Februari 2007 telah menyebabkan kehancuran infrastruktur, puluhan orang tewas, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. QC segera bertindak cepat dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan makanan dan bahan bukan makanan serta dukungan finansial. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, QC juga membagikan obat-obatan dan membuka layanan kesehatan bagi ribuan korban
- Pada Desember 2007, banjir melanda wilayah utara dan timur Nanggroe Aceh Darussalam. Bencana tersebut memaksa puluhan ribu orang mengungsi dan menyebabkan kerusakan infrastruktur. QC, dibantu Palang Merah Indonesia dan difasilitasi oleh PBB, mendistribusikan bahan makanan dan bahan bukan makanan ke wilayah tersebut bagi puluhan ribu korban.

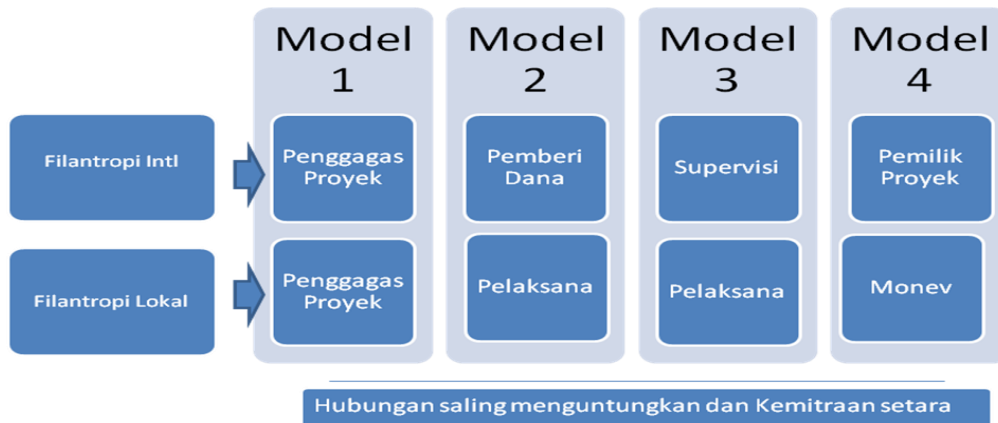
Dari mitra yang dipilihnya, nampak bahwa QC cenderung memilih lembaga-lembaga kemanusiaan atau filantropi Islam yang sudah cukup mapan di Indonesia, khususnya lembaga-lembaga yang memiliki akses dan jaringan politik yang kuat pada saat itu. Tidak jarang, kerjasama dilakukan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang memiliki kedekatan dengan partai politik atau bahkan menjalin kemitraan dengan lembaga yang dipimpin oleh seorang politisi, meskipun QC sendiri tidak memiliki afiliasi politik tertentu, khususnya di Indonesia maupun di negaranya. Sebagai contoh, QC digandeng oleh KKI (Komite Kemanusiaan Indonesia) yang dipimpin oleh Suroto, seorang politisi senior di PKS, menjadikan Hidayat nurwahid, (mantan) Ketua Umum PKS sebagai dutanya, dan juga menjadikan PKPU dan MSI sebagai mitranya. Pada saat yang sama, salah satu mitra dalam bentuk organisasi yang sering digandeng QC adalah PKPU dan BSMI, dua organisasi kemanusiaan (filantropi) Islam yang tidak memiliki hubungan langsung dengan PKS, namun secara genealogis mereka memiliki kedekatan dengan PKS.

BAB IV
MODEL DAN DAMPAK KERJASAMA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN
DOMESTIK

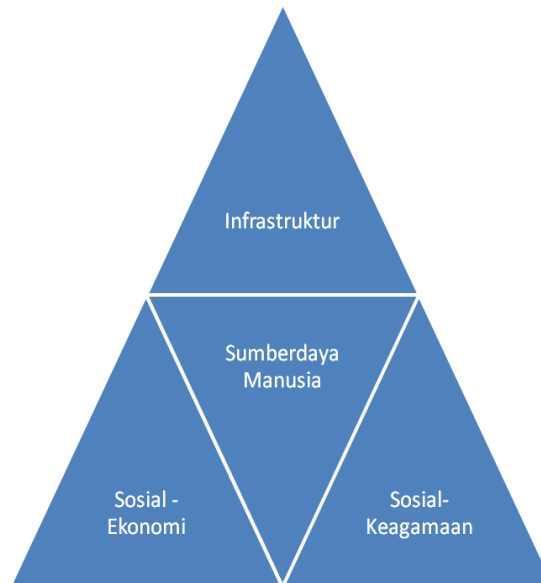
Hubungan Kemitraan



Model Kemitraan



Lingkup Program dalam Kemitraan



Model Kerjasama

Kerjasama Kelembagaan

Kerjasama untuk Pelaksanaan Program

Kerjasama untuk Pengawasan Program

Kerjasama untuk Evaluasi Program

Dampak Kerjasama Pasca Bencana

Dampak Sosial-Budaya

Dampak Sosial-Ekonomi

Dampak Sosial Keagamaan

Dampak Sosial-Politik

Dampak Sosial-Pendidikan

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat digambarkan bahwa kegiatan kemanusiaan telah menjadi isu global di kalangan masyarakat Muslim. negara-negara Timur Tengah penghasil minyak atau disebut dengan “*petrodollar countries*” yang memiliki modal finansial yang kuat saat ini menjadi aktor-aktor yang memainkan peran penting dalam kegiatan kemanusiaan pasca bencana. Semenjak tragedi bencana Tsunami Aceh dan bencana gempa bumi di Yogyakarta serta bencana longsor dan banjir beberapa wilayah lain, peran yang dimainkan oleh lembaga filantropi Islam internasional yang berasal dari Timur Tengah maupun dari negara Barat semakin luas. Terdapat beberapa aspek yang penting untuk digarisbawahi dari kehadiran lembaga filantropi Islam internasional dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat pasca bencana di Indonesia.

Globalisasi dan Lembaga Filantropi Islam Internasional

Semakin menguatnya peran lembaga-lembaga filantropi Islam internasional di Indonesia mengindikasikan bahwa wacana dan praktik filantropi Islam tidak bisa dilepaskan dari globalisasi. Era globalisasi sendiri ditandai oleh semakin tipisnya sekat-sekat geografis dan semakin eratnya relasi yang dibangun antara kelompok masyarakat di sebuah wilayah dengan wilayah lain. Di kalangan Muslim sendiri, diskursus tentang globalisasi dan kaitannya dengan gerakan filantropi dapat dilihat pada dua ranah, yaitu ranah wacana dan ranah praksis.

Pada ranah wacana, globalisasi memberikan makna yang lebih konkret dari kalangan Muslim dalam mendefinisikan konsep umat. Organisasi-organisasi filantropi Islam internasional memiliki rumusan dan interpretasi yang lebih konkret tentang umat di era globalisasi, dimana konsep umat dapat dimaknai sebagai sebuah ikatan berdasarkan agama di kalangan Muslim dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, aktivitas kemanusiaan yang dilakukan organisasi filantropi Islam dari negara-negara Barat maupun Timur Tengah di daerah-daerah bencana di Indonesia, telah

mendapatkan justifikasi normatif dari konsep Islam tentang umat, di satu sisi, dan difasilitasi oleh konteks masyarakat global di sisi yang lain. Sementara pada ranah praksis, globalisasi juga berdampak pada semakin luasnya cakupan atau jangkauan wilayah kerja sebuah organisasi filantropi. Sebuah lembaga filantropi Islam yang didukung secara financial oleh sebuah komunitas Muslim dari suatu negara, dapat menjalankan program-program kemanusiaannya di wilayah lain yang dianggap membutuhkan bantuan, termasuk di lokasi-lokasi bencana.

Antara Orientasi Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan

Lembaga-lembaga filantropi Islam internasional yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda antara satu sama lain dilihat dari orientasi gerakannya, apakah lebih menekankan pada aspek sosial-kemanusiaan ataukah sosial-keagamaan. Meskipun demikian, secara umum, orientasi sosial-kemanusiaan dan sosial-keagamaan dari lembaga filantropi Islam internasional agak sulit untuk dipisahkan. Pasalnya, rumusan konsep kemanusiaan dalam organisasi filantropi Islam diasari oleh prinsip-prinsip atau nilai-nilai keagamaan yang terkandung di dalam agama Islam, seperti kewajiban tolong menolong antar sesama umat manusia, konsep persaudaraan Islam, kewajiban memberikan bantuan bagi kaum miskin, serta keharusan membangun sikap yang dermawan dan peduli dengan sesama.

Hal tersebut bisa dilihat dari model kegaitan kemanusiaan lembaga filantropi Islam di lokasi pasca bencana, dimana beberapa lembaga filantropi Islam yang beroperasi di Banda Aceh memiliki perhatian yang sama terhadap masalah anak-anak yatim piatu sebagai korban Tsunami. 10 Tahun pasca bencana Tsunami yang memakan ribuan korban jiwa di Aceh, lembaga filantropi Islam internasional masih menjalankan program sosial-kemanusiaannya, khususnya dalam menyantuni anak-anak yatim sampai mereka dipanjang “mandiri” pada usia 18 tahun. Tentu saja, konsep menyantuni anak-anak yatim adalah bagian dari ajaran Islam, yang alah staunya tersurat dalam al-Quran surat al-Maun. Di luar itu, kegiatan keagamaan masih tetap menjadi bagian dari misi lembaga filantropi Islam internasional, khususnya dalam mendukung kegiatan pendidikan keagamaan kaum Muslim. Hal ini ditandai dengan tetap kuatnya program-program pembangunan masjid, madrasa dan sekolah di beberapa daerah di Indonesia.

Model Kerjasama dengan Organisasi Kemanusiaan Lokal

Lembaga filantropi Islam internasional memiliki berbagai strategi dalam mengimplementasikan program dan menjalankan programnya di luar negeri, termasuk di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan adalah membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi kemanusiaan atau lembaga filantropi yang dijalankan oleh masyarakat lokal. Hal ini bisa dilihat dari kemitraan yang dilakukan oleh organisasi seperti OIC Alliance di Aceh yang dalam menjalankan kerja-kerja kemanusiaannya bekerjasama dengan Rumah Zakat dan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat). Hal itu dilakukan ketika OIC Alliance mengelola bantuan untuk anak-anak yatim piatu di Aceh yang jumlahnya mencapai ribuan. Sementara itu, Muslim Aid Indonesia di Banda Aceh juga menjalin kerjasama strategis di bidang kesehatan dengan BSMI (Bulan Sabit Merah Indonesia). Namun strategi seperti itu tidak selalu dipakai oleh organisasi sejenis. Qatar Charity, misalnya, dalam mengelola bantuan kemanusiaan untuk anak-anak yatim piatu korban bencana Tsunami di Aceh lebih cenderung untuk merekrut relawan-relawan lokal dan mengelola programnya secara mandiri.

Aspek yang juga menarik untuk dikaji adalah bagaimana lembaga-lembaga filantropi Islam internasional melihat posisi negara dan tanggung jawab negara dalam mengentaskan kemiskinan maupun dalam menyantuni anak-anak yatim. Dalam kasus di Aceh, tidak terdapat indikasi adanya bangunan kerjasama dan kemitraan antara lembaga filantropi Islam internasional dengan lembaga filantropi domestik yang disponsori oleh negara, seperti Baitulmal Banda Aceh. Padahal, salah satu agenda utama dari Baitulmal juga adalah menyantuni anak-anak yatim. Tidak hanya itu, koordinasi antara Baitulmal dan lembaga filantropi Islam internasional tidak pernah dilakukan dalam konteks menjalankan program bersama. Risiko yang muncul dari itu semua adalah akan terjadinya redundansi atau tumpang tindih dari sebuah program yang sama. Bila tidak disertai dengan verifikasi yang cermat akan sangat mungkin seorang anak yatim mendapatkan bantuan dari dua lembaga yang berbeda atau lebih.

Dampak Sosial bagi Kesejahteraan Masyarakat

Di tengah dinamika aktivisme sosial lembaga filantropi Islam internasional yang menjalankan program-programnya di Indonesia pasca bencana, terdapat beberapa

dampak sosial-ekonomi dan keagamaan yang dirasakan oleh masyarakat. Di bidang ekonomi, sebagian anggota masyarakat miskin mendapatkan bantuan yang sifatnya sementara maupun program pemberdayaan ekonomi. Kesejahteraan keluarga miskin terbantu, termasuk bagi anak-anak keluarga miskin yang mendapatkan akses untuk melanjutkan pendidikan. Dengan kata lain, lembaga filantropi Islam internasional telah “menggambil” sebagian peran yang seharusnya dipikul oleh negara tempat mereka beroperasi, seperti memberikan beasiswa dan memberikan santunan rutin sampai anak-anak yatim menjadi dewasa dan mandiri, sesuai yang diamanatkan konstitusi di Indonesia. Di bidang keagamaan, perbaikan dan pendirian tempat ibadah menjadi hal lain yang menjadi dampak dari kehadiran lembaga filantropi Islam internasional. Setidaknya, masjid dan tempat peribatan yang dibangun secara permanen dan baik secara tidak langsung mengikat kerekatan sosial masyarakat dan menjadi modal untuk meningkatkan kegiatan sosial secara mandiri.

BAB VI

PENELITIAN LANJUTAN

Dari hasil penelitian tahun pertama, terdapat beberapa aspek yang masih membutuhkan kajian lebih dalam atau studi lanjutan untuk tahun kedua sebagaimana penelitian ini di telah dirancang. Bila pada tahun pertama penelitian lapangan lebih dititik beratkan pada kunjungan kepada kantor-kantor lembaga filantropi Islam dan mewawancarai para aktivisnya, maka pada tahun kedua penelitian lapangan akan difokuskan pada mitra lembaga filantropi Islam internasional, baik berupa yayasan-yayasan lokal, LSM-LSM atau lembaga filantropi nasional, serta para penerima manfaatnya secara langsung. Cakupan penelitiannya pun akan diperluas, dengan memasukan wilayah kepulauan Nias sebagai lokasi yang terdampak bencana sebagai salah satu fokusnya. Kajian terhadap pulau Nias (Sumatra Utara) ataupun Pulau Mentawai yang berada di wilayah Sumatra Barat penting untuk dilakukan untuk dapat melihat lebih dekat, dan membandingkannya dengan apa yang terjadi di Aceh dan Yogyakarta. Analisa komparatif terhadap relasi dan model kerjasama lembaga filantropi Islam di daerah-daerah tersebut akan memperkuat bangunan teoretis yang akan dirumuskan dan dikembangkan dalam penelitian ini. Studi awal kajian perbandingan ini akan dipresentasikan dalam konferensi di Universitas Kyoto, Jepang

pada tgl 12-13 Desember, dimana peneliti termasuk salah satu panelis untuk sesi Religion and Development in Southeast Asia. Luaran yang akan dicapai dalam penelitian lanjutan adalah publikasi di Jurnal Internasional atau satu *chapter* yang dimuat dalam Edited Volume yang dipublikasikan secara internasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahnaf, M. Iqbal. "Between Revolution and Reform: The Future of Hizbut Tahrir Indonesia," *Dynamics of Asymmetric Conflict* (July, 2009), 1-17.
- Ali, Muhammad. "The Rise of Liberal Islam Networks (JIL) in Contemporary Indonesia," in *American Journal of Islamic Social Sciences*, Volume 22, Number 1, (Winter 2005), pp. 1-27
- Bamualim, Chaider S. et al (ed.), *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia* (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Benthall, Jonathan. "The Overreaction against Islamic Charities," *ISIM Bulletin* (2007).
- , 'Islamic Charities, Faith-based Organizations and the International Aid System', in J. Alterman and K. van Hippel, eds., *Understanding Islamic Charities* (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2007), 1-14.
- Burr, J. Millard and Collins, Robert O. *Alms for Jihad: Charity Terrorism in the Islamic World*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Eldridge, Phillip J. *Non-Governmental Organizations and Democratic Participation in Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 1995)
- Fauzia, Amelia. (ed.), *Filantropi untuk Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2006).
- Federspiel, Howard M. . *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project, 1970).
- Ganie-Rochman. Meuthia. *An Uphill Struggle: Advocacy NGOs under Soeharto's New Order*, (Jakarta: LabSosio Universitas Indonesia, 2002)
- Hadiwinata, Bob. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing Movement* (London: RoudledgeCurzon, 1999).
- Hasan, Noorhaidi. "Between Transnational Interest and Domestic Politics: Understanding Middle Eastern fatwas on Jihad in the Moluccas," *Islamic Law and Society*, 12, 1 (2005).
- Hamayotsu, Kikue. "The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia," *Asian Survey*, vol. 51 (2011), 971-992.
- Hamilton, James Shaw. "Recognizing the Umma in Humanitarianism: International Regulation of Islamic Charities," in Jon B. Alterman and Karin von Hippel (eds.), *Understanding Islamic Charities*, (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2007)
- Harvey, Claire Isobel. "Muslim Intellectualism in Indonesia: the Liberal Islam Network (JIL) Controversy," *Review of Indonesian and Malaysian affairs*, Vol. 43, No. 2 (2009), 13-52).

- Kaag, Mayke. "Aid, Ulama and Politics: Transnational Islamic NGOs in Chad," in Benjamin F. Soares and René Otayek, *Islam and Muslim Politics in Africa* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 85-102.
- Khudhori, Darwis. *Menuju Kampung Pemerdakaan: Mambangun Masyarakat Sipil dari akar-akarnya, belajar dari Romo Mangun di pinggir Kali Code* (Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat, 2002).
- Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: Gramedia, 2010)
- , *Politik Filantropi Islam di Indonesia: negara, Pasar dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- "Islam and Humanitarian Affairs in Indonesia: the Middle Class and New Patterns of Social Activism," in Kees van Dijk and Jajat Burhanuddin (eds.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam: Amsterdam University Press-ICAS, 2012)
- , "Health Provision for the Poor: Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia," *Journal of Southeast Asia Research*, 18, 3 (September 2010), 503-553;
- , "Symbolic and Ideological Contestation over Humanitarian Emblems: The Red Crescent in Islamizing Indonesia," *Studia Islamika*, Vol. 18, No. 2 (2011), 249-286.
- , "Islam and Humanitarian Affairs in Indonesia: the Middle Class and New Patterns of Social Activism in Indonesia," in Kees van Dijk and Jajat Burhanuddin (eds.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012).
- , "Strengthening Humanity or Serving Congregation?: Islamic Charities and Dakwah Movements in a Muslim Minority Island," a paper presented in *the 12th Annual International Conference on Islamic Studies*, held in Surabaya 5-8 November 2012, East Java, co-sponsored by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia and IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Peterson, Marie Juul. "Islamizing Aid: Transnational Muslim NGOs after 9.11," *Voluntas*, 23 (2012): 126-155.
- , "For Humanity or for the Umma: Ideologies of aid in four Transnational Muslim NGOs," *Dissertation*, University of Copenhagen, 2011
- Roy, Olivier. *Globalized Islam: the Search for a New Umma* (London: Hurst & Company)
- Sadouni, Samadia. "New Religious Actors in South Africa: The Example of Islamic Humanitarianism," in Benjamin F. Soares and René Otayek, *Islam and Muslim Politics in Africa* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 103-120
- Sinaga, Kastorius. *NGOs in Indonesia: A Study of the Role of Non Governmental Organizations in the Development Process* (Verlag fur Entisklungspolitik: Saarbucken, 1995).

Steenbrink, Kareel. "The Power of Money: Development Aid for and through Christian Churches in Modern Indonesia, 1965-1980," in Susane Schöter (ed.), *Christianity in Indonesia: Perspectives of Power* (Berlin: Lit., 2010).

Wahid, Marzuki. "Ma`had 'Ali: Nestapa Tradisionalisme dan Tradisi Akademik yang Hilang", *Jurnal Istiqra*, Vol. 4, No. 1 (2005), 89-112.

DRAFT LUARAN

Beberapa aspek dari draft luaran penelitian tahun pertama ini dipresentasikan dalam pelbagai forum seminar, antara lain:

1. Seminar and Public Lecture: *Transforming the Culture of Giving in Indonesia: The Muslim Middle Class, Crisis, and Philanthropy*, Nanzan University, Nagoya & Sophia University Tokyo, October 20-26, 2015
2. *The 2nd Indonesian Frontiers of Social Sciences and Humanities Symposium, Indonesian Academy of Sciences (Akademi Ilmu Pengetahuan Indoensia-AIPI)*, Aston Bogor, West Java, October 4-6, 2015.

Sementara bagian studi awal untuk Penelitian tahap 2, akan dipresentasikan dalam

1. Colloquium, “Religion en Assie: Critique Sociale, Integration et Disintegration,” *Sorbonne-Paris, Centre de Recherches Internationales*, November 26-27, 2015.
2. Panel session on Religion and NGOs in Southeast Asia, *SEASIA 2015 Conference* Kyoto Dec 12-13, 2015

The Presence of International Islamic Aid Agencies in Post Disaster Indonesia

Hilman Latief

(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Abstract

This article analyzes the extent to which Islamic aid associations from the West and the Middle East define and address domestic welfare issues, establish partnership with local institutions, as well as place their missions in the Indonesia's social, cultural and political landscape. This research will also take a look further at the socio-political implication of the flow of international aid agencies for domestic Islamic charities as well as for the communities in disaster affected areas. This paper focuses on four Muslim NGOs, which are two UK-based Muslim NGOs (The Muslim Aid [MA] and Islamic Relief [IR]), as well as two Middle East-based Muslim NGOs (Qatar Charity [QC] and Asian Muslim Charity Foundation [AMCF]). While acting as philanthropic organizations in their country of origin, these four Muslim NGOs have emerged in the Indonesia soon after 2004 Tsunami disaster as well as in the aftermath of the 2006 Yogya earthquake. In particular, the objective of this research is to discover the impact of the presence of international Islamic aid agencies in Indonesia on the welfare of the communities, in general, as well as on the institutional capacity of grassroots institutions.

Keywords: Islamic Philanthropy, international aid, disaster relief, community development

Introduction

One of the intriguing phenomena in the recent globalized non-state welfare agencies is the multiplicity roles played by Islamic charities in alternating the state as a welfare provider. Islamic charities in present-times have increasingly become a global movement crossing the borders of the continents. Islamic charities from developed countries, in general, and Gulf countries, in particular, have played

extensive roles in running a sort of ‘international development project’ by providing aid for people in Asia and Africa.¹ Observers have pointed out that the internationalization of Islamic charities cannot be detached from the economic growth of the Gulf countries and the process of global ‘islamization’ sponsored by such wealth Muslim countries as Saudi, Kuwait, UAE and others.² Islamic charities may also proliferate and witness institutional transformation as a response to the crises taking places in certain places where the Muslim communities are resided and become the victims of the conflicts. In Palestine, international Islamic aid agencies landed and domestic charities grew rapidly in response to the crises in the region of the occupied territory.³ Both natural and man-made crises that took place in African and Asian countries which engaged Muslims, had also stimulated Petro-dollar countries to be involved in humanitarian activities by establishing NGOs specifically working on relief.⁴

In the past two decades, Petrodollar countries-sponsored Islamic charitable associations, and Muslim voluntary welfare organizations from the West have began operating extensive relief and development projects in many regions. The inception of International Islamic Relief Organizations (*IIROSA-Haiah al-Igasah al-Islamiyyah al-Alamiyyah*) in 1979, sponsored by the Muslim World League (*Rabitah ‘Alam Islami*), can be seen as a major breakthrough in the evolvement of relief NGOs in the Muslim World.⁵ In the following decades, especially in the 1980s and

¹See for example, Mayke Kaag, “Aid, Ulama and Politics: Transnational Islamic NGOs in Chad,” in Benjamin F. Soares and René Otayek, *Islam and Muslim Politics in Africa* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 85-102.

²Samadia Sadouni, “New Religious Actors in South Africa: The Example of Islamic Humanitarianism,” in Benjamin F. Soares and René Otayek, *Islam and Muslim Politics in Africa* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 103-120; also J. Millard Burr and Robert O. Collins, *Alms for Jihad: Charity Terrorism in the Islamic World* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

³Matthew Levit, *Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad* (New Haven and London: Yale University Press, 2006), 143-170.

⁴Jonathan Benthall and Jerome Bellian-Jourdan, *The Charitable Crescent: Politics of Aid in the Muslim World* (London & New York: I.B. Tauris, 2003)

⁵Despite the fact that, as observers have noted, since its inception IIRO has appeared as a transnational Islamic association which has actively sponsored salafi-*dakwa* movements, and has been allegedly accused of having sponsored Islamic radical groups, it is no doubt that IIRO is now becoming one the World largest Islamic aid agencies operating in many countries.

1990s, a number of International Islamic aid agencies were founded in the West and the Middle East. While observing the dynamics of the geo-political context in the Muslim world, scholars also pay much attention to the role and growth of Islamic charities in the Muslim World, especially in the post September 11 attack. There has even been a sort of, what Jonathan Benthall has called, “overreaction against Islamic charities”,⁶ partly due to frequent violent actions organized by Muslim hardliners who are believed to be financed by charitable giving, both domestically and internationally. Using a security perspective, policy makers and observers have seen the possible ties between radical groups and the Islamic transnational movements. For instance, soon after the 9/11 and Bali bombings, some Islamic charitable associations have been accused of having supported violence actions and terrorism. As a result, activities and financial sources of numerous Islamic foundations were frozen by the international community, especially the United States, the United Nations and other European countries.

This is not to say that vibrant activities of Islamic charities can easily be exterminated by the United Nations’ policies. Instead of hiding from the public, some Islamic charities become visible in public life.⁷ Islamic charities attempt to increase their accountability and organizational capacity, and at the same time to expand the process of ‘Islamization of aid’.⁸ Whereas western countries are now still installing surveillance programs towards Islamic charities, humanitarian intervention in conflict and disaster affected zones by Islamic charitable associations, including those considered radical Islam, never come to an end. Therefore, questions about how International Islamic aid agencies from the West and Gulf countries determine domestic counterparts and how the political dynamics in the domestic context affects the orientation of international aid agencies are still interesting to pursue, especially

⁶ Benthall, Jonathan. “The Overreaction against Islamic Charities,” *ISIM Bulletin* (2007).

⁷ See further Jonathan Benthall, “The Overreaction against Islamic Charities,” *ISIM Bulletin* (2007).

⁸ See for example, Marie Juul Peterson, “Islamizing Aid: Transnational Muslim NGOs after 9.11,” *Voluntas*, 23 (2012): 126-155.

in a country like Indonesia where Muslims adhere to—and were influenced by—different types of Islamic orientation from other parts Muslim countries.

In Indonesia, not only has the presence of international Islamic charities enriched the Muslim NGO sector, both discursively and practically, but also has dramatically shaped the patterns of Islamic social activism at large. Indonesian Muslim NGOs and philanthropic organizations can be regarded as being part of—and cannot be detached from—the growth of Muslim NGOs in global arena. But in recent studies of the Indonesia's NGO sector, Islamic philanthropic organizations have been under-represented. While there have been studies on the profound development of Islamic philanthropic organizations in fostering social welfare in Indonesia,⁹ the role of international Islamic aid agencies in their dealing with domestic welfare issues remains unexplored. Islamic aid agencies, in fact, have played considerable roles in providing various types of charitable enterprises, ranging from disaster relief to poor relief, from healthcare to micro-finance projects.

This paper analyzes the extent to which Islamic aid associations from the West and the Middle East define and address domestic welfare issues, establish partnership with local institutions, as well as place their missions in the Indonesia's social, cultural and political landscape. This paper will also take a look further at the socio-political implication of the flow of international aid agencies for domestic Islamic charities. In order to narrow my analysis on this topic, this paper focuses on four Muslim NGOs, which are two UK-based Muslim NGOs (The Muslim Aid [MA] and Islamic Relief [IR]), as well as two Middle East-based Muslim NGOs (Qatar Charity [QC] and Asian Muslim Charity Foundation [AMCF]). While acting as philanthropic organizations in their country of origin, these four Muslim NGOs

⁹Some studies have been devoted to the study of Islamic philanthropy and social development in Indonesia, see Bamualim, Chaider S. et al (ed.), *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia* (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2006); Fauzia, Amelia. (ed.), *Filantropi untuk Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2006).

have emerged in the Indonesia soon after Tsunami disaster. The following is a brief profile of the Muslim NGOs to observe:

- Islamic Relief Worldwide (IR) is one of the largest Islamic NGOs. Established in 1984, IR has carried out humanitarian aid and development projects around the globe from its headquarters in Birmingham, the United Kingdom. Its fundraising targets are not restricted to Muslim communities within the United Kingdom, but are also based in a variety of countries, ranging from the United States and Western Europe to South Africa and Malaysia.
- The Muslim Aid, which was established in 1985 and its headquarter is based in London. Muslim Aid has played a similar role to that of Islamic Relief, acting as a worldwide Muslim NGO specialising in disaster relief and development. Muslim Aid Indonesia (MAI) has been active in Indonesia since 2005 in response to the Aceh Tsunami.
- Asian Muslim Charity Foundation (AMCF-*Muassasah Muslimy Asia Al-Khairiyah*) of the United Arab Emirate represents one of the most active *dakwa* movements in Indonesia. The establishment of this foundation can be traced back to 1992, when the Muhammadiyah and Dar al-Bir Society made an agreement to establish a joint secretary (*'sekretariat bersama'*) to run programs in education, relief and social activities. Organizationally, AMCF has become a national foundation. Under the banner of *Yayasan Muslim Asia* (Asian Muslim Foundation), AMCF has officially been registered to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia since 2002.
- Qatar Charity was founded by the Emir of Qatar (Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani) 1992 and has emerged as a non-profit organization specifically working on three main programs: sustainable development program, preparedness and disaster response program, and seasonal program. As a fruit of the Memorandum of Understanding with the Ministry of Religious Affairs

of the Republic of Indonesia in 2002, Qatar Charity Indonesia (QCI) founded its Indonesian branch office in Jakarta in 2006.

Aid, Solidarity and the Islamic Transnational Movements

The culture of giving in Muslim societies has become a major factor stimulating the growth of Islamic charitable associations. Muslims are urged to save and spent some portions of their wealth in order to help the needy, to cater to those underprivileged, and to provide assistance for their fellow Muslims who face a difficult situation and crises caused by natural and man-made disaster. To Muslims, Islam is not simply a religion based on spiritual text, but also a symbol of solidity among its adherents around the globe. The Quran and the prophetic narratives place much emphasis on the necessity of strengthening brotherhood, according to which believers are urged to build reciprocal relations (*al-takaful*) among community members.¹⁰ The notion of Muslim cohesiveness can be manifested in various forms, including giving social, financial and political support to community members (*umma*) who are suffering because of injustices in the social, economic, and political system. Muslim NGOs' vibrant engagement to help, protect, and defend the unity of *umma* (the Islamic community) by delivering aid, is very dynamic and somewhat triggers political and scholarly debates among observers and policy makers. .

Literatures on Islamic aid and transnational Muslim NGOs have lead to different issues. In studying the influence of transnational Muslim NGOs to the political dynamics in Chad, Mayke Kaag, argues that for Muslim NGOs, “aid and *umma* are tightly entangled.”¹¹ *Umma*, which means ‘the Islamic community’, is an essential concept utilized by Muslim communities in projecting their social, economic and political activities. Fostering the welfare of the *umma*, as conceived by Muslim NGOs, may comprise a wide range of meanings, such as protecting the

¹⁰See for example Olivier Roy, *Globalized Islam: the Search for a New Umma* (London: Hurst & Company), 65.

¹¹Mayke Kaag, “Aid, Ulama and Politics,” 86.

Muslim communities from the threat, strengthening Muslim economic activities, and upholding the superiority of Islam or the ‘Islamization’ in the social and political sphere. Through their aid, Muslim NGOs can also become political actors as “others suspect them of using aid to enlarge the *umma*.”¹² Another observer addresses the issues of Islamic aid from the security perspective. As transnational Muslim NGOs can work worldwide and at the same time have held different ideological patterns, the imposition of regulation on the internationalization of Islamic aid is needed.¹³

In recent times, Islamic charities have increasingly become a global phenomenon, as they operate not only in the Middle East or Africa, but also in Western—notably developed—countries such as the United States, Australia, the United Kingdom, and other Western European countries. With various motives, ranging from visions of faith-based welfare to politically-driven resistance movements, Muslim communities in Western countries have endeavoured to become involved in humanitarian missions by making the notion of giving a key discursive centre. An interesting observation on the ideology of international Islamic aid agencies has been made by Marie Juul Petersen who argues that there have been two types of strategies used by Islamic aid agencies in the global arena: “developmentalising Islamic aid” and “Islamising development aid”. The former, “developmentalising Islamic aid”, signifies the endeavors of Muslim NGOs from Gulf countries “to adjust their ideologies to the culture of development aid, thereby hoping to create resonance with other international agencies.” While the later, “Islamising development aid”, indicates the efforts of Muslim NGOs from the West “to create ideologies that simultaneously appeal to conservative Muslim donors and secular aid agencies.”¹⁴

¹²Mayke Kaag, “Aid, Ulama and Politics,” 86.

¹³James Shaw Hamilton, “Recognizing the Umma in Humanitarianism: International Regulation of Islamic Charities,” in Jon B. Alterman and Karin von Hippel (eds.), *Understanding Islamic Charities*, (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2007), 15.

¹⁴These arguments is based on Marie-Juul Petersen’s studies on four Muslim NGOs, which are the Muslim Aid, Islamic Relief (IR), Saudi-based-International Islamic Relief Organization (IIROSA), and Kuwait-based International Islamic Charitable Organisation (IICO). Marie-Juul Petersen further notes: “The two Gulf-based organisations and their audiences are firmly positioned in a Middle

Based on the above observation, in discerning international Islamic aid agencies in Indonesia, one should not overlook the roles of the Islamic transnational movements at large, which in the past two decades have increasingly drawn observers' attention. There is a burgeoning literature concerning the Islamic transnational movements in numerous academic disciplines. The presence of the Islamic transnational movements from petrodollar countries and the wave of the salafi-movements in Southeast Asia have received considerable attention from observers and policy makers, partly because this Saudi-sponsored Islamic movement had come to the fore in the public sphere, especially in the 1980s and 1990s. The spread of salafi-oriented educational institutions, the flourish of foundations working on religious propagation and social services, as well as the proliferation of Islamic relief NGOs in such countries as Indonesia, Malaysia, Thailand, and Philippines can partly be seen as of a fruit of the linkages between Southeast Asian Muslims and the transnational movements from gulf countries.

The emergence of the Salaf communities in Indonesia, which in some ways fanned the flame of communal tension among the mainstream religious groups, either the 'modernist' or 'traditionalist', can be regarded as a successful effort of Saudi Arabia in the promotion of its "leadership position in the global politics of the Muslim world" and its "transnational Islamic policy".¹⁵ Likewise, the transnational Islamist movements, such as Hizbut Tahrir of Palestine¹⁶ and the Muslim Brotherhood of Egypt,¹⁷ have also had a considerable impact on the present-day Indonesia's public sphere as well as on the dynamics of political Islam.

Eastern Islamic aid culture, but at the same time, they are beginning to reach out to audiences in the development culture. The two UK-based organisations, on the other hand, have become increasingly embedded in a Western development culture, but seek to maintain strong relations to the culture of Islamic aid." Marie Juul Petersen, "For Humanity or for the Umma: Ideologies of aid in four Transnational Muslim NGOs," Dissertation, University of Copenhagen, 2011, 15-16.

¹⁵Noorhaidi hasan, "Between Transnational Interest and Domestic Politics: Understanding Middle Eastern fatwas on Jihad in the Moluccas," *Islamic Law and Society*, 12, 1 (2005), 91.

¹⁶M. Iqbal Ahnaf, "Between Revolution and Reform: The Future of Hizbut Tahrir Indonesia," *Dynamics of Asymmetric Conflict* (July, 2009), 1-17.

¹⁷For the profile of PKS, See Kikue Hamayotsu, "The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia," *Asian Survey*, vol. 51 (2011), 971-992.

Notwithstanding the government pays greater attention to the security issues as a consequence of the presence of the Islamic transnational movements which are very political in orientation, domestic Islamic charities in Indonesia increase significantly in number and played popular roles in poor rural and urban areas. Since the 1990s and especially after the economic crises, Indonesia has witnessed unprecedented development of Islamic charitable organizations whose financial sources are relied and both domestic giving and international funding.

It is worth noting that the presence of international Islamic aid agencies in Indonesia can partly be traced back to the massive operation of international NGOs for emergency relief in response to the 2004 Tsunami disaster in Aceh and 2006 earthquake in Yogyakarta-Central Java. At that juncture, hundreds of agencies from all over the world, including from Gulf countries, flowed into these two regions (Aceh and Yogyakarta) to deliver aid. The Muslim Aid (MA), Islamic Relief (IR), Qatar Charity (QC), and the Asian Muslim Charity Foundation (AMCF) were among the important players in reliving disaster in Aceh and Yogyakarta. Like others agencies, these NGOs have gained financial support from Muslim benefactors. These Muslim NGOs also concerns sustainable economic and social development projects and give provision for those in need affected by crises and conflicts. In a nutshell, disaster relief seems to have become the foremost reason stimulating Muslim NGOs to operate in Indonesia. It should be noted that unlike major Western-based aid agencies which enthusiastically promote issues such as democracy, gender and other structural issues, Islamic aid agencies are recognized publicly for their relief, religious and charitable activities.

The Profile of International Islamic Aid Agencies

International Muslim NGOs	Country of Origin, and Headquarter Office	Date of Inception	Arrival in Indonesia	Main activities
----------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------	------------------------

Muslim Aid	London, United Kingdom	1985	2005	Disaster relief, reconstruction project, livelihoods
Islamic Relief	Birmingham, United Kingdom	1984	2005	Disaster relief, reconstruction project, livelihoods
Qatar Charity	Qatar	1992	2006	Disaster relief & reconstruction project
Asian Muslim Charity Foundation	The United Arab Emirate	1992	First arrival in 1992, and officially registered 2002	Islamic propagation, poor relief, and Islamic education
OIC Alliance	Saudi Arabia	2005	2005	Relief of the poor, livelihood, scholarship

Religion, Development and NGOs

Before exploring the types of activities run by Muslim NGOs discussed previously, it is worth comparing the culture of ‘Western charity’ and Islamic charity. This comparison will provide us a conceptual framework for analyzing the nature of transnational Muslim NGOs and domestic NGOs in Indonesia. Like elsewhere, there have been competitions between ‘Western Aid’ and ‘Islamic Aid’. Studies by Jerome Bellion Jourdan of the presence of Islamic aid agencies in Sudan, by Samadia Sadouni in South Africa, and Mayke Kaag in Chad, suggests that Islamic aid has been much influenced by da’wa vision, and at the same time characterized by the tensions between islamists and moderate Muslims, between those NGOs with charitable and development orientations, between Muslim and Christian missionaries, as well as between Islamic aid agencies and Western NGOs.

In the Indonesian context, there has been a trend among Muslim voluntary associations working for the poor to label themselves generically as ‘philanthropic’ associations, despite their overwhelming ‘charitable’ role. This suggests that the two terms, ‘charity’ and ‘philanthropy’, in spite of their similarities, have often been thought of differently. Charity is more often associated with the relief of the poor, with limited impact. By contrast, philanthropy is believed to have a greater impact on society, as it promotes social change. Indeed, the meaning of charity in present-days scholarly works has connotations of short-term relief projects, and from the perspective of development, the term ‘charity’ tends to be seen as perhaps less impressive than philanthropy.

Moreover, although both charity and philanthropy are frequently employed interchangeably in practice, scholars have made a sharp distinction between the two. As an approach to improve the quality of life in a society, ‘charity’ was extensively employed by religious institutions from the seventeenth to early nineteenth centuries. Charity practice has come to be considered an inadequate approach to the complexity of poverty in the social and political landscape of the twentieth and twenty-first centuries, as the charity approach very much ‘addresses symptoms rather than the causes’ of problems, and its impact is undoubtedly limited to ‘those lucky enough to benefit from the service ... but has not had an impact beyond that.’¹⁸

While charity is believed to have had a limited impact in society, both socially and economically, philanthropy is perceived to have had a broader social impact in terms of enhancing social justice and promoting the public good. Conceptually, philanthropy resembles charity, as both terms represent the idea of giving. In a more practical sense, philanthropy can be seen as ‘the act of giving money and other resources, including time, to aid individuals, causes, and

¹⁸Helmut K. Anheir and Diana Leat, *Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for the Twenty-First Century* (London and New York: Roudledge, 2006), 4.

organisations.’¹⁹ Beyond poverty relief, philanthropy, as a ‘voluntary action for public good’,²⁰ covers activities within which social change, social justice and the public good are heavily promoted within communities and negotiated with the political authorities. However, philanthropic action should constitute not only relief, but also the development and empowerment of those in unfortunate circumstances. Philanthropy, as observers have stated, may empower the underprivileged to claim back their social, economic, and political rights, restoring their self-reliance and strengthening their capacity to reach their social and economic goals.

Another key issue needs to be examined is how the culture of ‘western type of NGOs’ differs from Muslim charity. Western type of ‘development aid’ in Indonesia has been adopted by domestic NGOs in Indonesia. I would argue that the rise of Muslim NGOs with development and advocacy program are in part stimulated by the extensive role of ‘secular’ and Christian NGOs. The story begins with the presence of western aid agencies in the 1950s. Indonesian’s civil society organizations working on social enterprises, democracy, and education have been acquainted with international aid agencies at least since the 1960s. A number of foreign donors from the West, represented by international NGOs, have actively engaged domestic actors, including social foundations, religious denominations, and politically-active NGOs, in order to address a wide range of welfare-related issues, such as poverty alleviation and the promotion of social changes. Concomitant with the extensive role of ‘secular’ donor has been the spread of faith-based aid agencies from North America and Western Europe. In the eastern parts of Indonesia which are mainly inhabited by Christians, Christian aid agencies from the West (America, the Netherlands and Germany) have been working with local Churches.

¹⁹Angela M. Eikenberry, “Philanthropy Voluntary Organisation and Governance Beyond the State: Giving Circles, and Challenges for Democracy,” *Administration and Society*, Vol. 39, No. 7 (2007), 860.

²⁰Robert L. Payton and Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission* (Bloomington and Indianapolis, 2008), 27.

Religious denominations within Churches played as agents of social change in the communities by endeavoring to bridge the gap between local people and international aid agencies. Despite the fact that religious proselytizing had become part of their major agenda, social welfare enterprises and community development programs were broadly activated. In the 1950s, Churches were instrumental in the provision of aid for the communities. In the absence of NGOs specifically working for development and structural advocacy program at that time, churches and religious denominations became an effective agent for community-based development projects.²¹ In Flores-East Nusa Tenggara (NTT), for example, a wide range of relief, religious and development programs were supported by German government and Catholic churches under the framework the Flores-Timor Plan (FTP). In the same way, Protestant and Catholic churches from the Netherlands, organized by Dutch Protestant ICCO (*Interkerkelijk Commissie voor Contact inzake Ontwikkelings-samenwerking*) and Catholic CEBEMO (*Centrale voor Bemiddeling bij Medefinanciering van Ontwikkelingsprogramma's*), had contributed much to the operation of relief, healthcare, agricultural and educational projects which were jointly run in cooperation with domestic churches in Indonesia.

Unlike Christian churches that have gained considerable support from Western donors, only a few Islamic associations, especially in the 1960s and 1970s, could access funds from their Western counterparts. The absence of Muslim NGOs with specific development projects at that time became a major factor causing deficiencies in their external financial support. This condition, in turn, stimulated Muslim intellectuals and social activists in Indonesia to find their way to be able to finance their projects by creating NGOs specifically working for development and advocacy programs. In the 1970s, Muslim social activists and public intellectuals took initiative to establish NGOs specifically working for grassroots. Muslim

²¹Kareel Steenbrink, "The Power of Money: Development Aid for and through Christian Churches in Modern Indonesia, 1965-1980," in Susane Schöter (ed.), *Christianity in Indonesia: Perspectives of Power* (Berlin: Lit., 2010), 108-18 and 119-22.

activists and intellectuals which hold a more liberal and progressive view of Islam attempted to address specific themes, such as poverty eradication and microeconomic enterprises. Like their Christian counterparts, Muslim activists through their newly established NGOs also concern such issues as welfare, gender justice, democracy, and civil society.²² In the early 1980s, some Muslim NGOs, including P3M (Indonesian Society for Pesantren and Community Development), were founded by Muslim activists from both the modernist and traditionalist circles. With its development and grassroots-oriented projects, P3M, for example, became attractive to wider audiences, and started establishing partnership with major western donors, such as Friedrich Naumann Stiftung, HIVOS, the Asia Foundation, and Ford Foundation. Since then, the numbers of Muslim NGOs working on democracy, civil society, economic empowerment, and gender issues in Indonesia have increased sharply and Muslim NGOs have become strategic western donor's partners as well.

The Asia Foundation (TAF), in particular, has been very active in seeking partnership with domestic NGOs in Indonesia to work on advocacy and political issues. Research and training on public policy, good governance, building local capacity for policy analysis, and strengthening civil society initiative against poverty, as well as programs as a means of promoting democratic political culture have become TAF's major agenda. In particular, TAF's project on Muslim educational institutions-based response to human trafficking in Indonesia can be example of how this Western funding addresses domestic issues. In its campaign against human trafficking, TAF engaged pesantren (Islamic educational institutions) and Muslim NGOs in certain regions which are vulnerable for human trafficking, to participate in the prevention of human trafficking and promote gender justice.²³ In some cases, this US-based funding also engaged a more liberal Muslim circle to promote religious pluralism and to combat religious radicalism. In view of this, the notion of 'liberal'

²²Phillip J. Eldridge, *Non-Governmental Organizations and Democratic Participation in Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 173-8.

²³ See The Asia Foundation Report, "Strengthening Muslim and Pesantren-based Response to Human Trafficking in Indonesia, 2009.

and ‘anti-liberal’ among Indonesian Muslims have often been linked to the presence of foreign funding. It is widely acknowledged that certain modernist and conservative Muslims that attempt to advocate and preserve Islamic orthodoxy are under the support of aid agencies from petrodollar countries, while Muslim NGOs with a more liberal view have gained strong support from western aid agencies. The tension between ‘the liberal’ and ‘the conservative’ among Indonesian Muslims has often been characterized by the accusation that foreign donors are behind the tension.²⁴ The liberals have often alleged that Islamic donors from Saudi and other Islamic countries are responsible for the increase of Islamic radicalism in Indonesia; and the conservatives see that western agencies are at the back of the notion of liberal Muslims.

It can be said that the proliferation of Islamic charities in global arena is parallel to the rise of the newly-established Islamic charitable associations whose ideological and political orientation in the domestic politics varied. And, therefore, the presence of international aid agencies has had a great impact on the contestation among domestic NGOs in terms of shaping certain type of Indonesian Islam. It should be emphasized that while the role of Western donor in Indonesia is prevalent, there has been an indication of the increase of role of Islamic charitable organizations. One may wonder how the newly established domestic Islamic charitable organizations interact with transnational NGOs and act as non-state welfare agencies in the Indonesia’s social and political landscape, and what a sort of socio-political consequences of the partnership between domestic and international Islamic aid agencies for domestic actors (Islamic charitable associations and NGOs). These two issues are interesting to pose because there have been a large number of Islamic associations and relief agencies in Indonesia which also never become part

²⁴ For the controversy of debate over the issues of Liberal Islam in Indonesia, see for example Muhammad Ali, “The Rise of Liberal Islam Networks (JIL) in Contemporary Indonesia,” in *American Journal of Islamic Social Sciences*, Volume 22, Number 1, (Winter 2005), pp. 1-27; Claire Isobel Harvey, “Muslim Intellectualism in Indonesia: the Liberal Islam Network (JIL) Controversy,” *Review of Indonesian and Malaysian affairs*, Vol. 43, No. 2 (2009), 13-52).

of Western donor's partners, but receive considerably support from international Islamic aid agencies, such as Muslim Aid, Islamic Relief, Qatar Charity and AMCF. In this respect, I argue that the presence of international Islamic aid agencies provides opportunities to for domestic charitable organizations to enlarge their scope of activities, just like the arrival of western funding for development NGOs.

The Indonesian NGO sector, as noted previously, has been characterized by the emergent Islamic philanthropic foundations whose financial resources are mainly based on charitable giving among Muslims. In response to the economic crises after the fall of Soeharto regime in 1998, Islamic charities become increasingly visible in public life. Notably at the end of the 1990s, Islamic charitable associations first made their presence publicly felt in relief projects in response to deadly natural crises (floods, tsunami, earthquakes, and food shortages) and manmade crises (horizontal and communal conflicts). In this respect, one should be aware that the 'tarbiyah movement' in Indonesia, which established the *Partai Keadilan Sejahtera* (PKS-Prosperous Justice Party) after the fall of Soeharto regime, and represents the Indonesian 'branch' of Egypt's Muslim Brotherhood, has been of the most important players in running relief organisations that operate specifically in disaster-affected areas, both nationally and internationally. *Pos Keadilan Peduli Ummat* (PKPU-Centre for Justice and the Care of Society), *Bulan Sabit Merah Indonesia* (BSMI-Indonesian Red Crescent Societies) and the Medical Rescue Committee (Mer-C) are among those institutions with a very visible public profile. These Islamic relief organisations have significant international exposure, as they have operated medical relief projects in such Muslim countries as Iraq, Bosnia, and Afghanistan. For this reason, they have close relations with other international relief organisations, notably from the Muslim world.

In a larger context of the Muslim NGO sector in Indonesia, the long-established Islamic civil organizations such as the 'modernist' Muhammadiyah (founded in 1912) and the 'traditionalist' Nahdlatul Ulama (NU, founded in 1926)

cannot be neglected from our discussion. These two organizations have for decades sponsored a range of social welfare enterprises, and have represented the mainstreams of Indonesian Islam, in general, and moderate Islam in particular. Muhammadiyah has been renowned for its social welfare activities in the health and education sectors. Thousands of self-funded hospitals, clinics, schools, universities, and orphanages throughout Indonesia are managed by this modernist movement. In different style, Muslim activists from the traditionalist circle (NU), despite their engagement with Islamic education (*pesantren*) in many regions, have also dealt with the NGO sector. NU's young activists have set up development NGOs to advocate the grassroots and the politically underprivileged groups of society. On the other side, Islamist organizations with strong political orientation, and those organizations labeled hardliners, also started operating their humanitarian wings in response to the crises, such as communal conflicts and natural calamities. In short, the patterns of social expression of Islamic organizations in Indonesia have changed considerably.²⁵ It is under these conditions the arrival of international aid agencies in Indonesia found its significance in the local context.

Diversity in religious, social and political orientations among Indonesian Muslims has had a great impact on the way in which foreign donor engaged domestic counterparts. International Islamic aid organizations from petrodollar countries mainly engaged Muslim personalities or groups from the modernist circle to run relief and social welfare programs. The long established modernist organization, Muhammadiyah, has become a partner of Saudi sponsored institutions. Likewise, other modernist organizations, such as Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) and Persatuan Islam (PERSIS), have made close partnership with donors from petrodollar countries in *dakwah* (religious propagation) and social programs. The Muslim World League (*Rabitah 'Alam Islami*) and Asian Muslim

²⁵ See further Hilman Latief, "Islam and Humanitarian Affairs: the Middle Class and New Patterns of Social Activism," in Kees van Dijk and Jajat Burhanuddin (eds.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012), 173-194.

Charity Foundation (AMCF) are among major sponsor for the spread of Islamic schools and higher education institutions with salafi orientation.

There are factors that have an influence on establishing partnership, and these are related to shared-values, as well to the religious and cultural similarities between associations and their counterparts. Religion seems to have been imperative to the establishment of networks among philanthropic associations, as religious values are deeply embedded in their social activities. Philanthropic associations sharing a common interest are therefore able to cooperate with each other. For example, relief missions in disaster-prone spots have often been characterised by cooperation among faith-based humanitarian associations that bring and share similar values and interests. It should be noted, however, that sharing similar religious values and having similar identities may also result in a sort of competition, instead of cooperation, among faith-based philanthropic associations. This is because humanitarian associations or faith-based NGOs may represent different ideologies and interests sociologically, economically and politically, that to some extent can become determinant factors in shaping their activities in the field and the typical beneficiaries.

Islamic Aid:

‘Da`wa for Development’ and ‘Development for Da`wa’

The interplay between religious mission and relief or development projects has characterized the types of Muslim NGOs’ activities. This is partly because in Muslim societies, the Islamic values and mission are embedded in all activities, including in humanitarian work. Not all transnational Muslim NGOs, especially from the Middle East, can transform and modify their religious mission into development projects. Some Islamic charities have placed religious missionary activities before development projects, as we can observe from the activities of IIRO and AMCF. But others, such as the Muslim Aid and Islamic Relief seem to have influenced by

western charities despite the fact that these two UK based Muslim NGOs still carryout Islamic values in their activities. It appears that Qatar Charity resembles the Muslim Aid and Islamic Relief.

It should be noted that the above listed NGOs share similarities in term of formulating the basic concept of charity in Islamic teachings. It should be noted that aiding the poor, in general, and proving assistance for orphans, in particular, are commonly practiced by Muslim aid agencies. Islam teaching put much emphasis on the necessity of aid orphans, and *thus* many orphanages, either in disaster-affected areas on in urban areas, received considerable support from international aid agencies. For such aid agencies as the Muslim Aid, Islamic Relief, Qatar Charity, and AMCF, feeding and provided facilities for orphans become one of their amin activities. The reason is that the main benefactors of these aid agencies are Muslims, who entrusted their *zakat* (almsgiving) and *sadaqa* (voluntary giving) to these NGOs. This suggests that apart from being development NGOs, Islamic aid agencies are also managing *zakat* and *sadaqa* fund whose money should be dispensed in accord with Islamic principles or with the intension of the benefactors.

In post-disaster Aceh and Yogyakarta, Muslim NGOs, like their western and Christian counterparts, focused on emergency response and infrastructure reconstruction. In running relief projects, they did not work alone. Instead they engage both international and local partners to accomplish a wide range of reconstruction projects, such as building temporary shelters, permanent houses, as well as revitalizing other public facilities (government offices, schools, house of prayer, etc.). In order to run development and livelihood projects in post-disaster Aceh and Yogyakarta, these Muslim NGOs have selected domestic NGOs with similar concern, either ideologically or professionally, as their partners. In Aceh and Yogyakarta, these four aid agencies have lavishly distributed their money to certain orphanages. It is very common that in their reports and advertising, these Muslim NGOs enthusiastically mention the numbers of orphans they have served. In disaster

affected spots, almost all Muslim NGOs, and even non-Muslim NGOs, support the establishment of orphanages like what has happened in Aceh when there were a large number of orphans who needed appropriate shelters or orphanages. But in a normal situation, AMCF and Qatar Charity are more active than Muslim Aid and Islamic Relief in establishing orphanages and mosques.

For AMCF and Qatar Charity, building houses of prayer or mosques become part of their major programs as these two Middle East-based NGOs also concentrate on developing Islamic education. In the sector of education, Qatar Charity is known for its rigorous support to the establishment of educational institutions, notably Islamic basic and secondary education run by the Muslim communities. In Indonesia, especially after the decline of the New Order regime, Muslim groups that affiliate to the PKS (Prosperous Justice Party) have actively initiated the operation of the full day Islamic schools (SDIT). The term of *Sekolah Dasar Islam Terpadu* (SDIT), which literally means ‘Integrated Islamic Basic School’ has become increasingly popularized by the PKS’ activists. This full day schooling system provides an alternative educational system that in one way or another differs from the system offered by the traditional Islamic boarding schools (*pesantren*) and from that provided in the conventional schools. These schools can even compete with the long established-schools belonging to other Muslim organizations, both the modernist and traditionalist. This is partly because the Muslim middle class and especially upper middle class become increasingly interested in enrolling their children to SDIT rather than conventional Islamic schools.

AMCF is not less impressive to compare with Qatar Charity in building educational institutions. AMCF has strongly sponsored the establishment of *Ma`had ‘Ali*, Islamic Higher Education Institutions which concentrates on Arabic and Islamic Studies. AMCF does not work alone in running its educational institutions. Instead, it has engaged the long-established Islamic universities belonging to the modernist

movement, such as Muhammadiyah and PERSIS.²⁶ Until now, *Ma'had 'Ali* of the AMCF have operated in, among other things, Muhammadiyah Universities in Yogyakarta, Surakarta (Central Java) and West Sumatra. Meanwhile, in Bandung, West Java, the AMCF has cooperated with the PERSIS. There is no evidence that the AMCF has founded a partnership with the traditionalist circle, such as Nahdlatul Ulama. This is probably because the AMCF believes that Muhammadiyah and PERSIS hold a shared-value in promoting modernist Islam. It is partly from the newly-established Islamic educational institutions (*Ma'had 'Ali*) that AMCF can educate and produce a lot of young preachers, and some of whom have been sent for *da'wa* on the outer islands, such as Nias Island-North Sumatra and Mentawai Island-West Sumatra.²⁷ These young preachers are equipped with skills in Arabic (reading, speaking and writing) as well as with knowledge on Islamic tradition, Quranic exegesis, and *fiqh* (Islamic jurisprudence). Between 2006 and 2010, AMCF had organised eight batches of training for young preachers.²⁸

In the 'cultural sector', which means religious activities, AMCF is comparable Qatar Charity in a way that these two organizations also focus on the establishment of mosques in various regions, either in rural or urban areas. The

²⁶ PERSIS is a modernist association founded in 1923. It is concerned with 'purifying' Islamic practice in Indonesia. Ideologically speaking, PERSIS shares similarities with Muhammadiyah in terms of religious practices, as both can be regarded as puritan Muslim associations. However, Muhammadiyah tends to pay greater attention to welfare issues by establishing schools, clinics, orphanages and universities throughout Indonesia, compared to PERSIS, which mainly focuses on education by establishing *pesantren* in West Java. For an account of the profile of PERSIS, see Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project, 1970).

²⁷ It should be noted that in the past, DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), an Islamic propagation organization founded by the Prominent former Muslim politician in the 1960s, was instrumental in running dakwah activities on the outer Island. As historically, DDII has a strong connection with Rabithat Alam Islami (the World Muslim League), it has made a lot partnership with AMCF. Islamic Ideological proximity between DDII and AMCF has enabled preachers send by DDII and AMCF to work together.

²⁸ See Hilman Latief, "Strengthening Humanity or Serving Congregation?: Islamic Charities and Dakwah Movements in a Muslim Minority Island," a paper presented in *the 12th Annual International Conference on Islamic Studies*, held in Surabaya 5-8 November 2012, East Java, co-sponsored by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia and IAIN Sunan Ampel Surabaya.

reconstruction of mosques by Qatar Charity was implemented mainly in disaster affected areas, whereas the construction of new mosques was carried out in the environment of educational institutions (Islamic schools). In 2011, for example, QCI has constructed or reconstructed 41 mosques in Java and Sumatra Islands. Meanwhile the AMCF has recently run various projects, including building and reconstructing 850 mosques throughout Indonesia.²⁹ Although AMCF and Qatar Charity have shared many similarities, differences can be seen in their involvement in disaster relief. In fact, AMCF has acted more as *da'wa* (missionary) organizations instead of relief agencies. And, 'development perspective' conceived by AMCF is restricted to the provision of Islamic education by not going further to touch livelihood and the social and economic sector. By contrast, Qatar Charity has intensified its relief and development programs, such as healthcare (childcare, family and women), environment (water, sanitation, and hygiene), education and culture.³⁰ It should be noted that both Qatar Charity and AMCF required volunteers with strong background in Islamic education, and mainly these volunteers are close to the modernist circle. In particular volunteers who have been appointed to lead Qatar Charity and AMCF sub-field offices are mainly graduates from Islamic universities in Indonesia or the Middle East.

A quite different perspective in conceiving 'Islamic aid' can be seen in the profiles and experiences of two UK-based aid agencies, which are Muslim Aid and Islamic Relief. Like other international Muslim relief NGOs, Islamic Relief and Muslim Aid have been very active in humanitarian intervention and has adopted international humanitarian principles as part of its Code of Conduct.³¹ It is therefore unsurprising that in the Indonesian context, both Muslim Aid and Islamic Relief have recruited volunteers, professional workers and experienced persons with diverse educational background. As NGOs which have been supported by benefactors from

²⁹ Marzuki Wahid, "Ma'had 'Ali: Nestapa Tradisionalisme dan Tradisi Akademik yang Hilang", *Jurnal Istiqra*, Vol. 4, No. 1 (2005), 89-112.

³⁰ QCI Annual Reports, 2010 and 2011.

³¹ My visit to Islamic Relief Headquarter in Birmingham was carried out on 10 August 2009.

Western countries, as well as have made partnership with other larger funding who are mainly aware of the meaning and function of organizational transparency, accountability, and professionalism, Muslim Aid and Islamic Relief have emerged and grown as special NGOs working on disaster relief.

Despite the fact that Muslim Aid and Islamic Relief are still operating regular charitable activities, such as the distribution of *zakat* or *sadaqa* fund for poor families and that of *ifthar* (breakfast) for orphans and the needy during the Ramadan month, much of these NGOs' activities focus on livelihood projects such as economic empowerment, income generating projects, and the like. These two NGOs also received support from larger funding, including some internationally-recognized donors which are not necessarily 'religious' in character. Their projects in Indonesia, apart from being funded by their headquarter offices in UK, their also cooperated with OXFAM, UNDP, and IOM during the course of emergency relief in disaster affected areas. For example, thank to Muslim Aid's serious efforts to run small economic enterprises for the poor, Muslim Aid Indonesia has been selected by ADFP (Aceh-Economic Development Financing Activity), which is funded by Multi Donor Fund, in order to handle cattle breeder capacity development project in several regions of Aceh. This indicates that the roles of international aid agency in operating livelihoods project becomes increasingly prevalent, and both Islamic Relief and Muslim Aid have acted like domestic NGOs in bidding livelihoods project offered by larger donor agencies.

In staffing their institutions, both Muslim Aid and Islamic Relief employ professional with diverse education and religious background. An interesting case can be seen in Yogyakarta where the Muslim Aid employed Muslim and Christian volunteers or staff to run its sub-branch office.³² Having appointed a young Muslim

³² In Yogyakarta, Muslim Aid reconstructed some parts of Muhammadiyah's orphanage where until now Muslim Aid's branch office occupied one building of this orphanage. Akhyari Hananto, the former Muhammadiyah youth activist in Yogyakarta, was recruited to led this newly-established sub-field office for a couple of years. Under Hananto's leadership, MAI increased its capacity building and expanded networks with local institutions.

activist as head of its sub-branch office, the Muslim Aid had hired an Australian-Christian volunteer who had rich experience working in the NGO sector in the Middle East. It is rather uncommon for Islamic charitable organizations to appoint a Christian social activist as a head of branch office because Islamic missions (*da'wa*) may be embedded in social welfare activities. But it is also can be seen as MAI's effort to act professionally and to show publicly the inclusive character of this organization. I would not say that this effort simply as the Muslim Aid's strategy to attract larger benefactors in the West. Instead, my attention is paid to the way this UK-based Muslim NGO formulates its development perspective in a country like Indonesia. By installing a Christian staff who also acted as head of the branch-office, Muslim Aid could address more seriously development issues and at the same time transforming their Islamic vision into a more meaningful activities in the grassroots.

One example Muslim Aid's project concerns micro-finance. This project has been implemented in Kali Code (River of Code), the poor suburban areas in the city of Yogyakarta. The aims of micro-finance projects are to open wider access to economy; to restore people's business units; as well to give a vision to the communities how to manage their income. There some reasons why one of the Muslim Aid's urban livelihoods project was carried out in Kali Code. A middle staff working in MAI mentions that people in Kali Code has a 'unique characteristic' socially, religiously and economically: low in education and slow economic activities. Another most important reason stimulating MAI to operate in Kali Code is that poor people still borrow money from 'loan shark' (*lintah darat*) to run their small business. In this respect, MAI has emerged to compete with both money lenders and Christian NGOs. About 120 home micro industries to generate income of poor families in Kali Code were operated.³³

³³It should be noted that MAI is not the first NGO working in Kali Code. The prominent and multi-talented Catholic priest, Romo Mangunwijaya, had for many years worked on civil society empowerment. Mangunwijaya is renowned for his community development projects, and as architect he tried to restructure the life of the poor families along Kali Code by encouraging people to preserve the river, to build modest but colorful housing, and to strengthen the social cohesion of

Meanwhile, Islamic Relief is reluctant and acting carefully in engaging *da'wa* mission in their activities. Despite the fact that Islamic Relief's mission cannot detach from Islamic mission, the service provided by Islamic Relief is not based on religious denomination. Islamic Relief's relief mission is based on Code of Conduct derived from the international humanitarian principles. For example, during the course of reconstruction program in Aceh and Yogyakarta, Islamic Relief avoided activities that can generate controversy such building places of worship. This is because once Muslim NGOs, such as Muslim Aid and Islamic Relief build mosques for Muslims; they should also build such thing for other religious communities. Yet, in another context, the Islamic identity of Muslim NGOs is helpful. A professional volunteer from Jakarta who worked for Islamic Relief in Aceh told me that thank to 'Islamic identity', Islamic Relief can reach certain regions in Aceh that other international aid agencies cannot, especially to reach the hinterlands of Aceh where active or ex-combatants of the Aceh Free Movement (GAM) mainly reside.³⁴

Like other NGOs working for emergency response, one of the foremost steps taken by the Muslim Aid and Islamic Relief is to discover their domestic partners. In Indonesia, the largest Islamic relief NGO is PKPU (*Centre for Justice and the Care of Society*), an NGO which has a very close tie with PKS (Prosperous Justice Party). The political ideology of PKS is adapted to that of the Muslim Brotherhood of Egypt. As a PKS's humanitarian wing, PKPU has played a great role in emergency response throughout Indonesia. Acting as a zakat agency, it has also gained strong financial support from the communities. Internationally PKPU is recognized as an 'NGO with Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations'. Apart from engaging humanitarian NGOs, the Muslim Aid and

the communities. In strengthening civil society, Mangunwijaya was directly involved in the grassroots-oriented activities by publicly campaigning for the poor rights. See Darwis Khudhori, *Menuju Kampung Pemerdakaan: Mambangun Masyarakat Sipil dari akar-akarnya, belajar dari Romo Mangun di pinggir Kali Code* (Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat, 2002).

³⁴ Interview with the Head of Communication Department, Islamic Relief, in Banda Aceh, 24 November 2008. This has also been confirmed by other Muslim NGOs in Aceh, such as Muslim Aid and Qatar Charity in my visit May 2015.

Islamic Relief also cooperate with the modernist circle, such as the Muhammadiyah. Muhammadiyah's humanitarian wing, notably Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), in fact, has played extensive role in disaster relief become local partners of many international NGOs, both Muslim and non-Muslim NGOs.

The further question is how the Indonesian government reacts to the flow of foreign funding. As I have mentioned previously, foreign funding have arrived in Indonesia and interacted with domestic NGOs over decades. Indonesian government, never showed its objection to the flow of foreign funding, but if foreign funding is seen as star disturbing political stability and intervene Indonesia's sovereignty, the government show its reaction. Historically, foreign aid has always been political in the Indonesian context, like somewhere else. In 1964, the first President of the Republic of Indonesia, Soekarno, was renowned for his statement "go to hell with your aid." These words were addressed to the United States as Soekarno's expression of disappointment of the US intervention of the Indonesian sovereignty. Soekarno's statement was then continued with his decision to withdraw the Indonesian flag from the United Nations. In 1992, the second President of the Republic of Indonesia, Soeharto, refused to receive aid for Dutch country as a fruit of the dispute between Indonesia and Dutch Government over the massacre of mass demonstration in East Timor. At that time, Soeharto considered that Dutch government put too much pressure on Indonesian government on East Timor tragedy, and this pressure, as Soeharto thought, disturbed Indonesia's sovereignty. Soeharto then decided to end aid relationship between Indonesia and Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), a sort of aid consortium led by Dutch government. Still, in the era of Soeharto, foreign aid became controversial when Indonesia witnessed monetary crisis in 1997, and ended up with the intervention of IMF (International Monetary Fund).

In Post Soeharto era, the geo-political context changes and the political environment in Indonesia is more open. But like its Western counterparts, Indonesia began to watch the flow of foreign funding, especially from the Middle East. After passing Anti Terrorism Law in 2006 and Anti-Money Laundering Legislation in 2003, the Indonesian government starts “to track down and cut the sources of funding for terrorist activities, both domestically and internationally.”³⁵ In 2008, there was also a heated debate between the government and NGOs over the issues of foreign funding. This is partly because the government wanted to revive the 1985 Law on social organizations. It is mentioned that the government is allowed to suspend organizations that received foreign funding “without government permission.”³⁶ At that time, the government was worried about the power of foreign funding not only from the Middle East but also from the United States, which according to the Indonesian authority, are hard to tract. In 2011, the newly amended Zakat Law passed and this law will allow the government to persecute those who misused of charity fund by zakat agencies or charitable organizations as the government begin paying much attention to the corruption, the politization of charity fund, and acts of terrorism. This kind of legal framework has urged international aid agencies operating in Indonesia to work with government agencies or pass administrative requirement before they channel their moneys to the communities or local counterpart. Yet, the experience suggests that this type of rule has not been strictly implemented.

Concluding Remarks

The growth in number of Islamic aid agencies in Muslim societies, as noted by observers, has had far reaching consequences to the patterns of Islamic NGO sector, in general, and the types of discourse on Islamic humanitarianism, in

³⁵ <http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/15/editorial-fighting-rich-terrorists.html>

³⁶ <http://www.thefinancialexpress-bd.com/2008/12/20/53598.html>

particular. Globalization, in particular, has had an enormous impact on conceivable aspect of the Muslim communities in many parts of the World. The engagement of NGOs from developed countries with domestic issues in developing/poor countries has persistently increased, both in quantity and quality. Domestic charities in certain regions, either religious or ‘secular’ in orientation, become part of the ‘international aid system’³⁷ as Islamic charities originating from vibrant domestic activities are now able to operate in the areas far from their origin. At the state level, a number of prosperous countries, notably from the West and Gulf countries, have been running what is recently known as ‘international aid development’ project, a sort of aid system created and provided by wealthy countries for poorer countries.

It is not always easy for foreign NGOs to operate in a country with a strong religious sensitivity. With more than two million Muslims, Indonesia is still attractive for foreign Muslim NGOs. In many cases, overseas Islamic charities do not face a great barrier to operate in Indonesia. Cultural proximity between international charities and domestic civil society organizations has led to an open reception from domestic organizations to international aid agencies. It is unsurprising that in order to strengthen reciprocal relations with domestic civil society organizations, international Islamic charities have supported religious and social activities in the communities. This paper suggests that Islamic charities operating in Indonesia are mainly sponsored by Muslim modernists. In coherence with this, a number of gulf countries have also witnessed unprecedented development of the economic growth and the NGO sector.

As we have acknowledged, the programs offered by charitable associations, like most development NGOs, are mainly based on short-term projects. Therefore, at domestic level, there has been a trend among Muslim social activists, both the modernist and traditionalist circles, to address structural issues of justice and poverty and in turn to carry out advocacy program instead of working on charitable activities.

³⁷Jonathan Benthall, 'Islamic Charities, Faith-based Organizations and the International Aid System', in J. Alterman and K. van Hippel, eds., *Understanding Islamic Charities*, 1-14.

This is partly because some domestic NGOs realize that the roots of social and economic inequality in Indonesia stem from the state's unjust policies and the absence of the State's political will. It appears that international Islamic aid agencies, unlike Western agencies, still define themselves as charitable organizations working for relief projects. Consequently, Muslim NGOs who are critical to the state's policies have not yet become the partners of international Islamic aid agencies.

Bibliography

- Ahnaf, M. Iqbal. "Between Revolution and Reform: The Future of Hizbut Tahrir Indonesia," *Dynamics of Asymmetric Conflict* (July, 2009), 1-17.
- Ali, Muhammad. "The Rise of Liberal Islam Networks (JIL) in Contemporary Indonesia," in *American Journal of Islamic Social Sciences*, Volume 22, Number 1, (Winter 2005), pp. 1-27
- Bamualim, Chaider S. et al (ed.), *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia* (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Benthall, Jonathan. "The Overreaction against Islamic Charities," *ISIM Bulletin* (2007).
- , 'Islamic Charities, Faith-based Organizations and the International Aid System', in J. Alterman and K. van Hippel, eds., *Understanding Islamic Charities* (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2007), 1-14.
- Burr, J. Millard and Collins, Robert O. *Alms for Jihad: Charity Terrorism in the Islamic World*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Eldridge, Phillip J. *Non-Governmental Organizations and Democratic Participation in Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 1995)
- Fauzia, Amelia. (ed.), *Filantropi untuk Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2006).
- Federspiel, Howard M. . *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project, 1970).
- Ganie-Rochman. Meuthia. *An Uphill Struggle: Advocacy NGOs under Soeharto's New Order*, (Jakarta: LabSosio Universitas Indonesia, 2002)
- Hadiwinata, Bob. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing Movement* (London: RoudledgeCurzon, 1999).
- Hasan, Noorhaidi. "Between Transnational Interest and Domestic Politics: Understanding Middle Eastern fatwas on Jihad in the Moluccas," *Islamic Law and Society*, 12, 1 (2005).
- Hamayotsu, Kikue. "The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia," *Asian Survey*, vol. 51 (2011), 971-992.
- Hamilton, James Shaw. "Recognizing the Umma in Humanitarianism: International Regulation of Islamic Charities," in Jon B. Alterman and Karin von Hippel

- (eds.), *Understanding Islamic Charities*, (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2007)
- Harvey, Claire Isobel. "Muslim Intellectualism in Indonesia: the Liberal Islam Network (JIL) Controversy," *Review of Indonesian and Malaysian affairs*, Vol. 43, No. 2 (2009), 13-52).
- Kaag, Mayke. "Aid, Ulama and Politics: Transnational Islamic NGOs in Chad," in Benjamin F. Soares and René Otayek, *Islam and Muslim Politics in Africa* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 85-102.
- Khudhori, Darwis. *Menuju Kampung Pemerdakaan: Mambangun Masyarakat Sipil dari akar-akarnya, belajar dari Romo Mangun di pinggir Kali Code* (Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat, 2002).
- Latief, Hilman. "Islam and Humanitarian Affairs in Indonesia: the Middle Class and New Patterns of Social Activism," in Kees van Dijk and Jajat Burhanuddin (eds.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam: Amsterdam University Press-ICAS, 2012)
- , "Health Provision for the Poor: Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia," *Journal of Southeast Asia Research*, 18, 3 (September 2010), 503-553;
- , "Symbolic and Ideological Contestation over Humanitarian Emblems: The Red Crescent in Islamizing Indonesia," *Studia Islamika*, Vol. 18, No. 2 (2011), 249-286.
- , "Islam and Humanitarian Affairs in Indonesia: the Middle Class and New Patterns of Social Activism in Indonesia," in Kees van Dijk and Jajat Burhanuddin (eds.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012).
- , "Strengthening Humanity or Serving Congregation?: Islamic Charities and Dakwah Movements in a Muslim Minority Island," a paper presented in *the 12th Annual International Conference on Islamic Studies*, held in Surabaya 5-8 November 2012, East Java, co-sponsored by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia and IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Peterson, Marie Juul. "Islamizing Aid: Transnational Muslim NGOs after 9.11," *Voluntas*, 23 (2012): 126-155.
- , "For Humanity or for the Umma: Ideologies of aid in four Transnational Muslim NGOs," *Dissertation*, University of Copenhagen, 2011
- Roy, Olivier. *Globalized Islam: the Search for a New Umma* (London: Hurst & Company)

- Sadouni, Samadia. "New Religious Actors in South Africa: The Example of Islamic Humanitarianism," in Benjamin F. Soares and René Otayek, *Islam and Muslim Politics in Africa* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 103-120
- Sinaga, Kastorius. *NGOs in Indonesia: A Study of the Role of Non Governmental Organizations in the Development Process* (Verlag fur Entiscklungspolitik: Saarbucken, 1995).
- Steenbrink, Kareel. "The Power of Money: Development Aid for and through Christian Churches in Modern Indonesia, 1965-1980," in Susane Schöter (ed.), *Christianity in Indonesia: Perspectives of Power* (Berlin: Lit., 2010).
- Wahid, Marzuki. "Ma`had 'Ali: Nestapa Tradisionalisme dan Tradisi Akademik yang Hilang", *Jurnal Istiqra*, Vol. 4, No. 1 (2005), 89-112.

平成 27 年 8 月 31 日

滞在予定表

査証申請人 Hilman Latief 他 0 名の滞在予定は次のとおりです。

年月日	行動予定	連絡先	宿泊先
2015 年 10 月 19 日 (月)	インドネシア (ジョクジャカルタ) から GA254 便で出発、デンパサール 乗り継ぎ		
10 月 20 日 (火)	GA882 で、関西国際空港着	南山大学 外国語学 小林寧子 Phone : 052-832-3111 内線 3565	サーウィンスト ンホテル (名古屋 市)
10 月 21 日 (水)	南山大学外国語学部で講演		
10 月 22 日 (月)	南山大学アジア・太平洋研究センタ ーで講演		
10 月 23 日 (金)	東京へ移動 上智大学アジア文化研究所で講演		東京ステイ四谷
10 月 24 日 (土)	上智大学で研究打合せ		
10 月 25 日 (日)	休憩		
10 月 26 日 (月)	羽田国際空港から GA218 便でイン ドネシアへ帰国		

サーウィンストンホテル

〒466-0825 名古屋市昭和区八事本町 100-36 電話 052-861-7901

東京ステイ四谷

〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-1-3 電話 03-3354-0109

招へい理由書

平成27年8月31日

大使
在インドネシア共和国 日本国 殿
総領事

招へい人

住所：466-8673 名古屋市昭和区山里町18 南山大学
氏名：教授・南山大学外国語学部アジア学科長 森山幹弘
電話番号：052-832-3111（内線3611）

担当者所属先名・氏名：外国語学部 小林寧子
担当者電話番号：052-832-3111（内線3565）

査証申請人

国籍：インドネシア
職業：大学教員

氏名（漢字）：Hilman Latief （男・女）

生年月日：1975年 9月 12日生 39歳

上記の者の招へい目的等は次のとおりです。

（1）招へい目的

南山大学が主催する講演会（平成27年10月21日、22日）で講演するため。

（2）招へい経緯

南山大学はアジア地域の研究促進のために、国内外の研究者を招聘して講演会・研究会を行うなどして研究交流プログラムを実施してきた。同人は若手でありながら、国際的な学会ではすでに多くの経験を積んでおり、このたび招へいの運びとなったものである。講演会ならびに意見交換で学問的貢献が期待されている。また、同人は南山大学外国語学部アジア学科が言語実習を予定しているジョクジャカルタ（インドネシア）にあるイスラーム系大学に勤務しており、学生にも当地の事情を紹介して学生の異文化理解にも寄与することが期待される。

（3）申請人との関係

招へい人は、上記南山大学外国語学部アジア学科長であり、申請人の日本への招へいに当たり、全体的な責任を負っている。

身元保証書

平成27年8月31日

大使
在インドネシア共和国 日本国 殿
総領事

査証申請人

国籍：インドネシア

職業：大学教員

氏名：Hilman Latief (男・女)

生年月日：1975年 9月 12日生 39歳

上記の者の本邦入国に際し、下記の事項について保証します。

- 1、滞在費
- 2、帰国旅費
- 3、法令の遵守

上記のとおり相違ありません。

身元保証人

住所：〒466-8673 名古屋市昭和区山里町18 南山大学

職業：大学教員

氏名：小林 寧子



生年月日：1954年1月10日生 61歳

電話番号：052-832-3111 (内線3565)

申請人との関係：

身元保証人は、申請人の友人であり、かつ南山大学外国語学部教授を務めている。

{以下は、会社・団体等が招聘する場合に記入して下さい。}

担当者所属先名：南山大学外国語学部アジア学科

担当者：小林 寧子

電話番号：(052) 832-3111 (内線) 3565

31 August, 2015

Invitation Letter

The Department of Asian Studies, the Faculty of Foreign Studies, Nanzan University will invite an associate professor from Muhammadiyah University of Yogyakarta, Indonesia as follows.

1. Name of guest : Dr. Hilman Latief
2. Purpose of invitation : to give lectures on the subject
 - 1) "Muhammadiyah dan Kota Yogyakarta", on October 21, 2015, 13:30-15:00 am at Room L-B2, Nanzan University, Nagoya Campus
 - 2) "Transforming the Culture of Giving in Indonesia: the Middle Class Muslim, Crisis and Philanthropy", on October 22, 2015, 17:00-19:00 pm at Room N-301, Nanzan University, Nagoya Campus



Moriyama, Mikihiro

Head of the Department of Asian Studies,
the Faculty of Foreign Studies, Nanzan University.



AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA INDONESIAN ACADEMY OF SCIENCES

The 2nd Indonesian Frontiers of Social Sciences and Humanities Symposium Bogor, 4-6 November 2015

Wednesday, 4 November 2015

09.00 – 12.00 : Registration & put up poster

12.00 : Lunch

13.00 – 13.30 : Opening remarks

Sudirman Nasir (Chair of Organizing Committee)

Sangkot Marzuki (President of AIPI)

13.30 – 14.00 : Lecture I (Iwan Jaya Azis, Cornell University/University of Indonesia)

14.00 – 14.30 : Lecture I: Q & A

14.30 – 14.45 : Coffee break

Session I (Politics of Identity and Conflicts)

14.45 – 14.50 : Introduction, Inaya Rakhmani (Chair)

14.50 – 15.05 : Samsul Maarif (Gadjah Mada University, Yogyakarta)

15.05 – 15.20 : Raihani (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau)

15.20 – 15.35 : Alpha Amirrachman (Sultan Ageng Tirtayasa University, Banten)

15.35 – 16.35 : Q & A

16.35 – 18.00 : Put up poster

18.00 – 19.00 : Dinner

Session II (Indonesian Culture and Heritage)

19.00 – 19.05 : Introduction, Sahiron Syamsuddin (Chair)

19.05 – 19.20 : Zakiyuddin Baidhawiy (IAIN Salatiga, Central Java)

19.20 – 19.35 : M. Adlin Sila (R & D, Ministry of Religious Affairs)

19.35 – 19.50 : Dave Lumenta (University of Indonesia, Depok)

19.50 – 20.50 : Q & A

Thursday, 5 November 2015

Session III (Locality and Globalization)

08.30 – 08.35 : Introduction, Najib Burhani (Chair)

08.35 – 08.50 : Hilman Latief (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

08.50 – 09.05 : Fithra Faisal (University of Indonesia, Depok)

09.05 – 09.20 : Gietty Tambunan (University of Indonesia, Depok)

09.20 – 10.20 : Q & A

10.20 – 10.30 : Break

Session IV (New Forms of Inequality, Poverty, and Social Capital)

10.30 – 10.35 : Introduction, Teguh Dartanto (Chair)



AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA INDONESIAN ACADEMY OF SCIENCES

10.35 – 10.50 : Arief Anshory Yusuf (Padjajaran University, Bandung)

10.50 – 11.05 : Julius Ary Mollet (Cenderawasih University, Jayapura)

11.05 – 11.20 : Dina Afrianty (Australian Catholic University, Australia)

11.20 – 12.30 : Q & A

12.30 – 13.30 : Lunch

13.30 – 14.30 : Flash poster presentation

Session V (Digital Humanities and Democratization)

14.30 – 14.35 : Introduction, Roby Muhamad (Chair)

14.35 – 14.50 : Yanuar Nugroho (Presidential Staff Office of the Republic of Indonesia, Jakarta)

14.50 – 15.05 : Ruli Manurung (University of Indonesia, Depok)

15.05 – 15.20 : Asima Siahaan (University of North Sumatra, Medan)

15.20 – 16.20 : Q & A

16.20 – 16.30 : Coffee break

Session VI (Science, Technology, and Society)

16.30 – 16.35 : Introduction, Sudirman Nasir (Chair)

16.35 – 16.50 : Arif Satria (Bogor Agricultural University, Bogor)

16.50 – 17.05 : Irfan Syamsuddin (State Polytechnic of Ujung Pandang, Makassar)

17.05 – 17.20 : Yodi Mahendradhata (Gadjah Mada University, Yogyakarta)

17.20 – 18.20 : Q & A

18.20 – 19.30 : Break

19.30 : Dining out, de Leuit Restaurant

Friday, 6 November 2015

09.00 – 09.30 : Lecture II (Melani Budianta, University of Indonesia)

09.30 – 10.00 : Q & A

10.00 – 10.15 : Break

10.15 – 10.30 : Presentation of ALMI, Hasnawati Saleh (Indonesian Young Academy—Executive Secretary)

10.30 – 10.45 : Presentation of *SAINS45: Indonesian Science Agenda*, Alan Koropitan (Study Committee of SAINS45; Indonesian Young Academy)

10.45 – 11.15 : Discussion on what's next, Sudirman Nasir (all SCs)

11.15 – 11.30 : Closing Remarks, Budhi M. Suyitno (AIPI—General Secretary)

11.30 – 13.00 : Friday prayer & lunch (all attendees check-out)

13.00 – 15.00 : Free time at Istana Kepresidenan Bogor /Kebun Raya (luggage in the bus)*

15.00 : Depart for airport

*tentative/to be confirmed

Foto Foto Penelitian dan Seminar

Bersama dengan Ketua OIC Alliance



Kantor Qatar Charity Banda Aceh



Bersama anak-anak Yatim dan Pengurus Qatar Charity, Banda Aceh



Kantor OIC Alliance



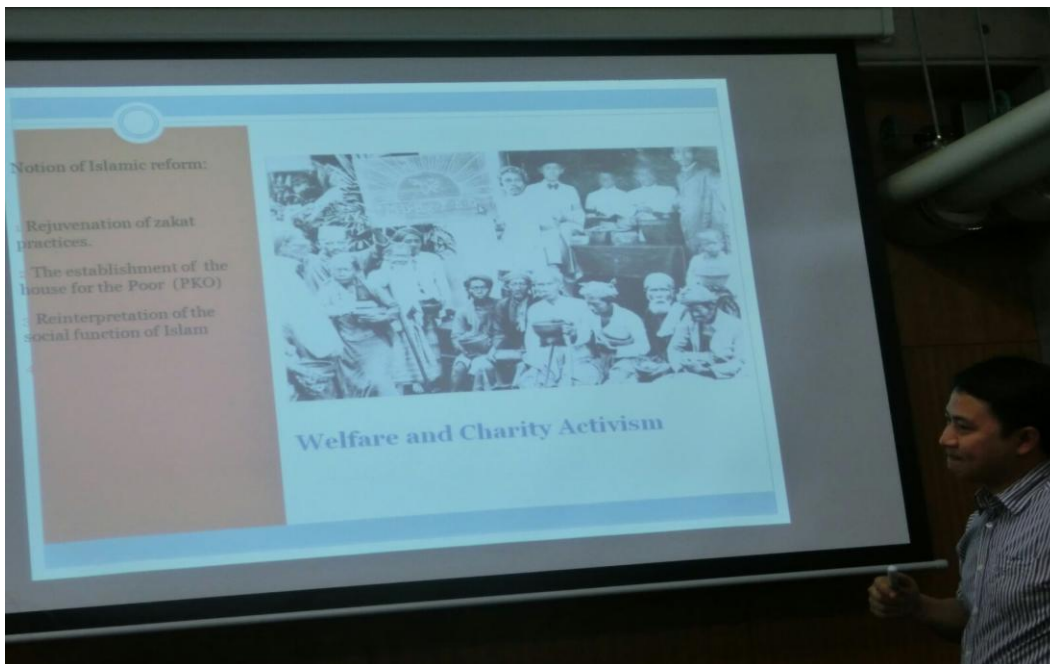
Di Depan Masjid Baiturrahman Banda Aceh



Bersama mahasiswa Nanzan University di depan Poster Seminar hasil Penelitian, Nagoya



Saat Presentasi di hadapan Peserta Seminar di Nanzan University, Nagoya-Jepang



Peserta Seminar (professor dan peneliti) di Sophia University, Tokyo

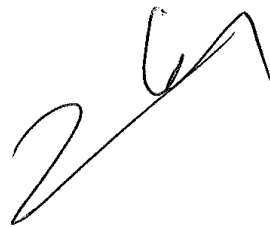


Paris, le 30 octobre 2015

ATTESTATION

Je soussigné, Alain Dieckhoff, directeur du Centre de Recherches internationales (CERI-Sciences Po) certifie par la présente que M. Hilman Latief, (né le 12 septembre 1975 à Tasikmalaya, Indonésie), professeur à l'*Universitas Muhammadiyah*, Yogyakarta , est invité au CERI (Sciences Po) du 24 au 28 novembre 2015. Il présentera une communication au colloque « Religions en Asie : critique sociale, intégration et désintégration » organisé dans le cadre du programme *Sociétés plurielles* de l'Université Sorbonne-Paris Cité.

Son voyage et son hébergement pendant le colloque sont pris en charge par l'INALCO dans le cadre de ce programme USPC.



Alain Dieckhoff

